



BAPPELITBANGDA
KAB. MOROWALI

BUKU I

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAUT RANDA



TELUK LASOLO

Kabupaten Banggai Kepulauan





**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPELITBANGDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2024;

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Juli 2023
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

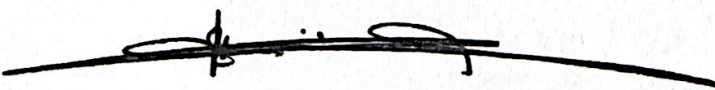
Diundangkan di Bungku
pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR: 025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina, Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-51
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	II-115
2.3 Evaluasi Capaian Indikator Makro.....	II-168
2.4 Evaluasi Kinerja Keuangan.....	II-171
2.4.1 Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah.....	II-172
2.4.2 Evaluasi Realisasi Belanja Daerah	II-175
2.4.2 Evaluasi Realisasi Pembiayaan Daerah	II-177
2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah.....	II-179
2.6 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-219
2.7 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-219
2.5.1 Urusan pendidikan.....	II-219
2.5.2 Urusan Kesehatan.....	II-220
2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-220
2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman.....	II-220
2.5.5 Urusan Sosial.....	II-221
2.5.6 Urusan Tenaga Kerja.....	II-221
2.5.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-221
2.5.8 Urusan Pangan.....	II-221
2.5.9 Urusan Lingkungan Hidup.....	II-222
2.5.10 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-222
2.5.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-222
2.5.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	II-222
2.5.13 Urusan Perhubungan.....	II-223
2.5.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-223
2.5.15 Urusan Penanaman Modal.....	II-223
2.5.16 Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-223

	2.5.17	Urusan Perpustakaan.....	II-224
	2.5.18	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-224
	2.5.19	Urusan Pariwisata.....	II-224
	2.5.20	Urusan Pertanian.....	II-225
	2.5.21	Urusan Perdagangan.....	II-225
	2.5.22	Urusan Perindustrian.....	II-225
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEUANGAN DAERAH.....	III-1
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1	Kondisi Ekonomi.....	III-2
	3.1.2	Proyeksi Perekonomian Kabupaten Morowali di Tahun 2024	III-29
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-29
	3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-30
	3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-35
	3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-39
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	IV-5
	4.2.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-5
	4.2.2	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali	IV-9
	4.2.3	Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-24
	4.2.4	Inovasi Daerah	IV-24
BAB V		RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH...	V-1
	5.1	Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
BAB VII		PENUTUP.....	VII-1
	7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
	7.2	Kesimpulan.....	VII-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021.....	II-1
Tabel 2.2	Luas lahan padi (Ha) menurut Jenis Irigasi dan Jenis Padi pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021.....	II-18
Tabel 2.3	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2021.....	II-19
Tabel 2.4	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2016-2021.....	II-20
Tabel 2.5	Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama...	II-22
Tabel 2.6	Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Buah.....	II-22
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2019 – 2022.....	II-26
Tabel 2.7	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022.....	II-27
Tabel 2.8	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-28
Tabel 2.9	Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah).....	II-32
Tabel 2.10	Kontribusi Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (%).	II-34
Tabel 2.11	Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah).....	II-35
Tabel 2.12	Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali (Juta Rupiah).....	II-37
Tabel 2.13	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali.....	II-38
Tabel 2.14	Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2022	II-41
Tabel 2.15	Nilai Tukar Kabupaten Morowali Tahun 2019-2022.....	II-42
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2022.....	II-44
Tabel 2.17	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2022.	II-46
Tabel 2.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), (2018 – 2022).....	II-47
Tabel 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 – 2022.....	II-48
Tabel 2.20	APM dan APK Menurut Kabupaten Morowali, 2020 – 2022.	II-51



Tabel 2.21	Angka Kelulusan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-54
Tabel 2.22	Angka Yang Melanjutkan Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.23	Perkembangan Angka <i>Stunting</i> Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2023.....	II-57
Tabel 2.24	Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-61
Tabel 2.25	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-62
Tabel 2.26	Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-63
Tabel 2.27	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-64
Tabel 2.28	Cakupan pertolongan persalinan (Persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-65
Tabel 2.29	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-67
Tabel 2.30	Rasio Elektrifikasi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-74
Tabel 2.31	Daya Terpasang Listrik (kw) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel 2.32	Indikator Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada Tahun 2018- 2022 di Kabupaten Morowali.....	II-75
Tabel 2.34	Ketersediaan Energi (Kkal) dan Protein (gr) per Kapita di Kabupaten Morowali Selama Tahun 2018-2022.....	II-85
Tabel 2.35	Ketersediaan database kependudukan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel 2.36	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel 2.37	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-89
Tabel 2.38	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel 2.39	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-91
Tabel 2.40	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel 2.41	Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-94
Tabel 2.42	Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-96
Tabel 2.43	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-98



Tabel 2.44	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Territorial Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali.....	II-100
Tabel 2.45	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-102
Tabel 2.46	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-103
Tabel 2.47	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON) Kabupaten Morowali Tahun (2018 – 2021).....	II-104
Tabel 2.48	Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 (Miliar).....	II-107
Tabel 2.49	Industri Prioritas Morowali.....	II-108
Tabel 2.50	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-112
Tabel 2.51	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-113
Tabel 2.52	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-114
Tabel 2.53	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-114
Tabel 2.54	Evaluasi Capaian Indikator Misi 1 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	II-117
Tabel 2.55	Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-123
Tabel 2.56	Evaluasi Capaian Indikator Misi 2 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	II-126
Tabel 2.57	Evaluasi Capaian Indikator Misi 3 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	II-148
Tabel 2.58	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	II-159
Tabel 2.59	Jumlah Orang Penerima Bantuan Listrik Gratis Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022.....	II-159
Tabel 2.60	Evaluasi Capaian Indikator Misi 4 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	II-162
Tabel 2.61	Evaluasi Capaian Indikator Misi 5 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	II-166
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Capaian Indikator Makro.....	II-168
Tabel 2.63	Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2019.....	II-169
Tabel 2.64	Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2020.....	II-169
Tabel 2.65	Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2021.....	II-170
Tabel 2.66	Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-171



Tabel 2.67	Analisis Realisasi Pendapatan daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-173
Tabel 2.68	Analisis Realisasi Belanja daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-176
Tabel 2.69	Analisis Realisasi Pembiayaan daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-178
Tabel 2.70	Evaluasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dan Status Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II-181
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	III-3
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	III-7
Tabel 3.3	Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	III-18
Tabel 3.4	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, Dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-27
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-29
Tabel 3.6	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-31
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali	IV-4
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	IV-5
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	IV-6
Tabel 4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020 – 2024	IV-10
Tabel 4.5	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2024 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	IV-13
Tabel 4.6	Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024...	IV-15
Tabel 4.7	Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-26
Tabel 5.1	Rencana Program Dan Kegiatan Rkpd Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	V-1
Tabel 6.1	Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	VI-1
Tabel 6.2	Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	VI-2
Tabel 6.3	Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	VI-5
Tabel 6.4	Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	VI-11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.....	I - 6
Gambar 2.1	Peta Administrasi.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Kemiringan.....	II-5
Gambar 2.3	Peta Topografi.....	II-5
Gambar 2.4.	Peta Geologi.....	II-7
Gambar 2.5.	Peta Hidrologi.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah.....	II-9
Gambar 2.7	Kondisi Iklim Morowali 2022.....	II-10
Gambar 2.8	Kondisi Iklim Morowali 2022.....	II-10
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan.....	II-11
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana.....	II-24
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-31
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022.....	II-31
Gambar 2.13	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, Dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-45
Gambar 2.14	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-45
Gambar 2.15	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-49
Gambar 2.16	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	II-50
Gambar 2.17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-53
Gambar 2.18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-53
Gambar 2.19	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali.....	II-54
Gambar 2.20	Angka <i>Stunting</i> Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022..	II-56
Gambar 2.21	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-58
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-60
Gambar 2.23	Proporsi panjang jalan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-66
Gambar 2.24	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022.....	II-68
Gambar 2.25	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-69



Gambar 2.26	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-70
Gambar 2.27	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018-2022.....	II-71
Gambar 2.28	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-71
Gambar 2.29	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-72
Gambar 2.30	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-73
Gambar 2.31	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-77
Gambar 2.32	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-78
Gambar 2.33	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-79
Gambar 2.34	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-80
Gambar 2.35	Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-80
Gambar 2.36	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2022.....	II-81
Gambar 2.37	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-82
Gambar 2.38	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-82
Gambar 2.39	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-83
Gambar 2.40	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-84
Gambar 2.41	Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-86
Gambar 2.42	Jumlah Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-87
Gambar 2.43	Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-88
Gambar 2.44	Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-89
Gambar 2.45	Pemasangan Rambu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-90
Gambar 2.46	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) Tahun 2019-2022.....	II-94
Gambar 2.47	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-97
Gambar 2.48	Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-99



Gambar 2.49	Rekapitulasi Capaian Indikator Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2022 dan Status Capaian Terhadap target Akhir Periode RPJMD.....	II-115
Gambar 3.2	Perbaikan Rumah Ibadah Dan Honorarium Pengurus Rumah Ibadah.....	II-118
Gambar 2.50	Jumlah Izin yang dikeluarkan (DPMPTSP) Tahun 2021-2022.....	II-119
Gambar 2.51	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali 2018-2022.....	II-120
Gambar 2.52	Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-121
Gambar 2.53	Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil di Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	II-124
Gambar 2.54	Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022....	II-124
Gambar 2.55	Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Akomodasi Makan Minum Terhadap PRDB.....	II-128
Gambar 2.56	Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	II-130
Gambar 2.57	Rekomendasi Dan Izin Yang Dikeluarkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	II-131
Gambar 2.58	Cargo Manivest Muatan Tol Laut.....	II-131
Gambar 2.59	Realisasi Investasi Kabupaten Morowali Tahun 2018 - 2022 (TW. III).....	II-133
Gambar 2.60	Jumlah PMDN dan PMA 2018 – 2022.....	II-133
Gambar 2.61	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	II-134
Gambar 2.62	Nilai Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	II-135
Gambar 2.63	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2019-2022.....	II-136
Gambar 2.64	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2019-2022.....	II-136
Gambar 2.65	Lembaga Keuangan Mikro (BPR dan Non BPS).....	II-137
Gambar 2.66	Jumlah Koperasi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021	II-137
Gambar 2.67	Jumlah Angkatan Kerja (orang) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-139
Gambar 2.68	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (orang) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-140
Gambar 2.69	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-140
Gambar 2.70	Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-142
Gambar 2.71	Produktivitas Pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-142
Gambar 2.72	Produksi dan Konsumsi Pangan (Konsumsi 1,45 Kg/Kapita/Minggu) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021.....	II-144
Gambar 2.73	Produksi Pertanian (Ton) Kabupaten Morowali Tahun	II-145



	2019-2021.....	
Gambar 2.74	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kuliah Tahun 2020-2022.....	II-152
Gambar 2.75	Bantuan Tablet Pembelajaran Bagi Siswa di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2022.....	II-153
Gambar 2.76	Perbandingan UHH Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022.....	II-154
Gambar 2.77	Perbandingan UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	II-154
Gambar 2.78	Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2019-2022.....	II-155
Gambar 2.79	Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2019-2022.....	II-156
Gambar 2.80	Trend Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022.....	II-156
Gambar 2.81	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Kab +NEGARA).....	II-158
Gambar 2.82	Cakupan jaringan listrik yang dibangun Selama Tahun 2019-2022.....	II-161
Gambar 2.83	Capaian Rumah Pasca Bencana Yang di Bangun.....	II-161
Gambar 2.84	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Tahun 2020-2022.....	II-164
Gambar 2.85	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Morowali Tahun 2020-2022.....	II-165
Gambar 2.87	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023...	II-173
Gambar 2.88	Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-176
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-5
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022.....	III-6
Gambar 3.3	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-8
Gambar 3.4	PDRB PerKapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022.....	III-9
Gambar 3.5	Perkembangan Inflasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-10
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-11
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	III-12
Gambar 3.8	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-13
Gambar 3.9	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	III-14



Gambar 3.10	Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali (Rp) Tahun 2018-2023.....	III-15
Gambar 3.11	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022.....	III-16
Gambar 3.12	Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	III-17
Gambar 3.13	Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil di Kabupaten Morowali Tahun 2022.....	III-19
Gambar 3.14	Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022....	III-20
Gambar 3.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-21
Gambar 3.16	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	III-22
Gambar 3.17	Persentase Penduduk Diatas Kemiskinan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-22
Gambar 3.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-23
Gambar 3.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	III-24
Gambar 3.20	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-24
Gambar 3.21	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	III-25
Gambar 3.22	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-27
Gambar 3.23	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	III-28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disusun melalui proses klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu, terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2024, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Kabupaten Morowali, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.



Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);



11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288,)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 13 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 Nomor: 033):
24. Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor: 023);
25. Peraturan Bupati Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 012);

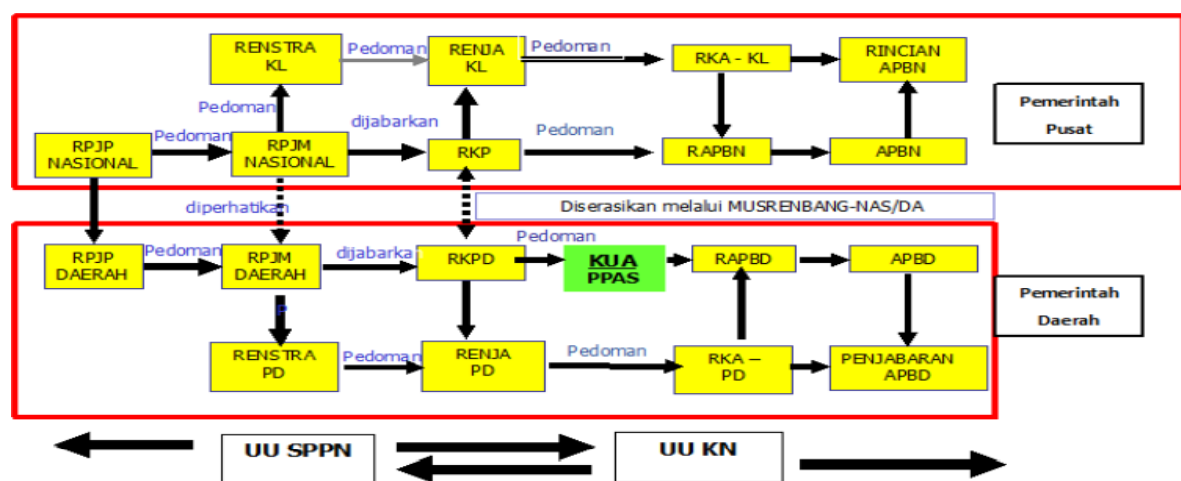
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka



regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD, (3) P-Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.2
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran lainnya



Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah/RPD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten Morowali tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan RKPD Morowali.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Morowali dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali maupun yang dilaksanakan bersama- sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD Tahun 2024; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen Rencana Pembangunan Daeran, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daeran, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Pemerintah Kabupaten Morowali, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Morowali.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali.

1.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan



dengan program pembangunan daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD)). Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sulawesi Tengah dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2024, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2024. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3. Arah Pembangunan Kewilayah

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Morowali yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Morowali.

5.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VII PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Secara Adiministrasi Kabupaten Morowali memiliki batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; - Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali (2022), luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari total wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada Tabel 2.1 Berikut ini :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Menui Kepulauan	223,63	4,09	23/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,75	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48



Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Witaponda	519,70	9,50	9	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan				Tanjung Harapan	
Luas Kabupaten	5.472,00	100,00	133		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan dan Pada tahun 2023 dilakukan pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². (1) Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi:

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70 Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Gambar 2.1
Peta Administrasi

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura,

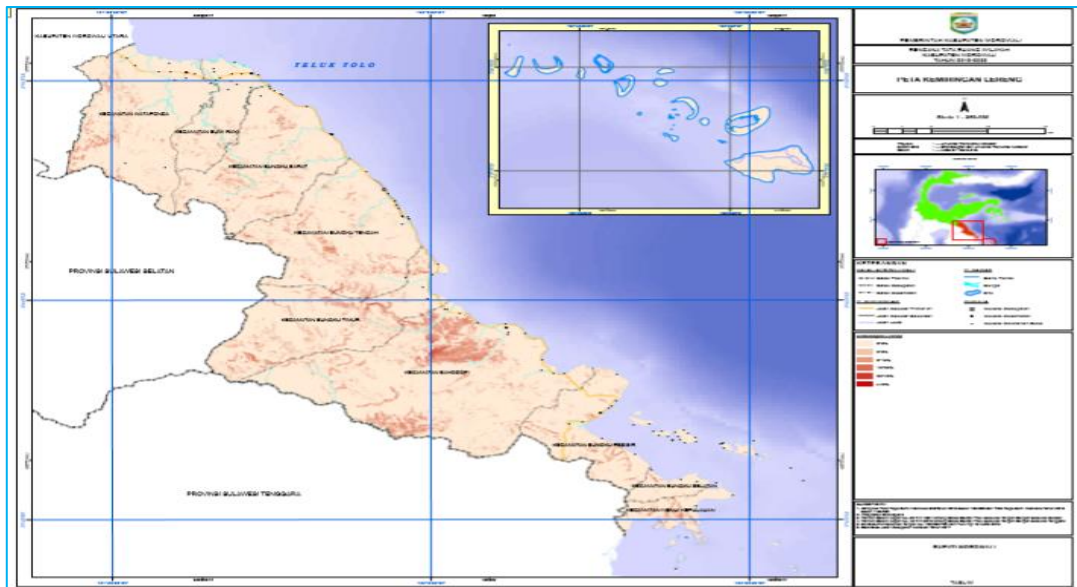


peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerangan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

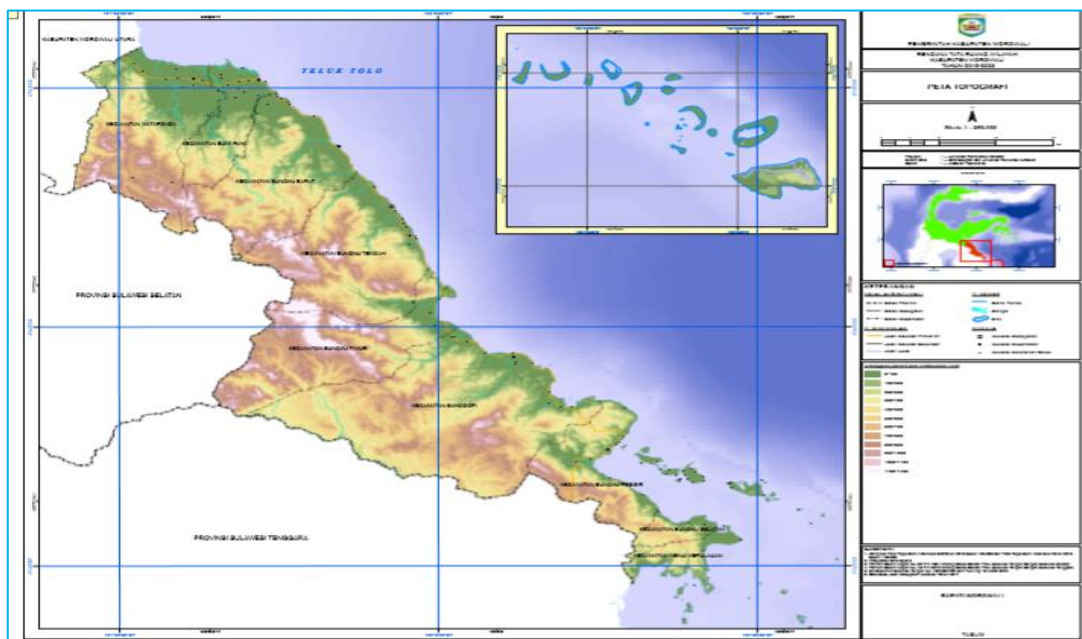
Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerangannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 % luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.2 Peta Topograpi dan Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng berikut ini :



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.2
Peta Kemiringan



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

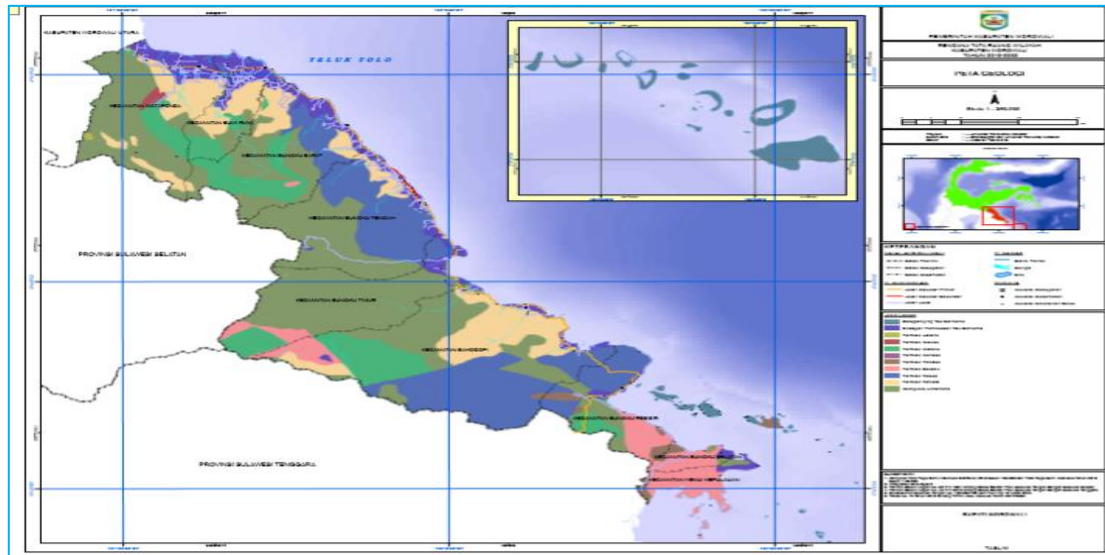
Gambar 2.3.
Peta Topografi



2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: - Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; - Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; - Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; - Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Selengkapnya tertera pada peta Geologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.4



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.4.
Peta Geologi

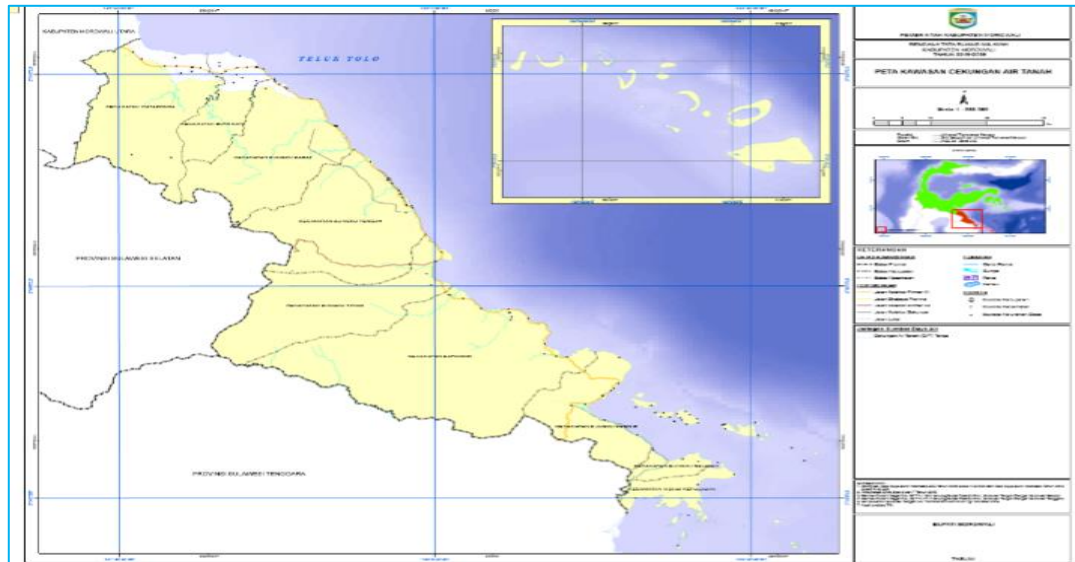
2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di

Gambar 2.5.
Peta Hidrologi

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6



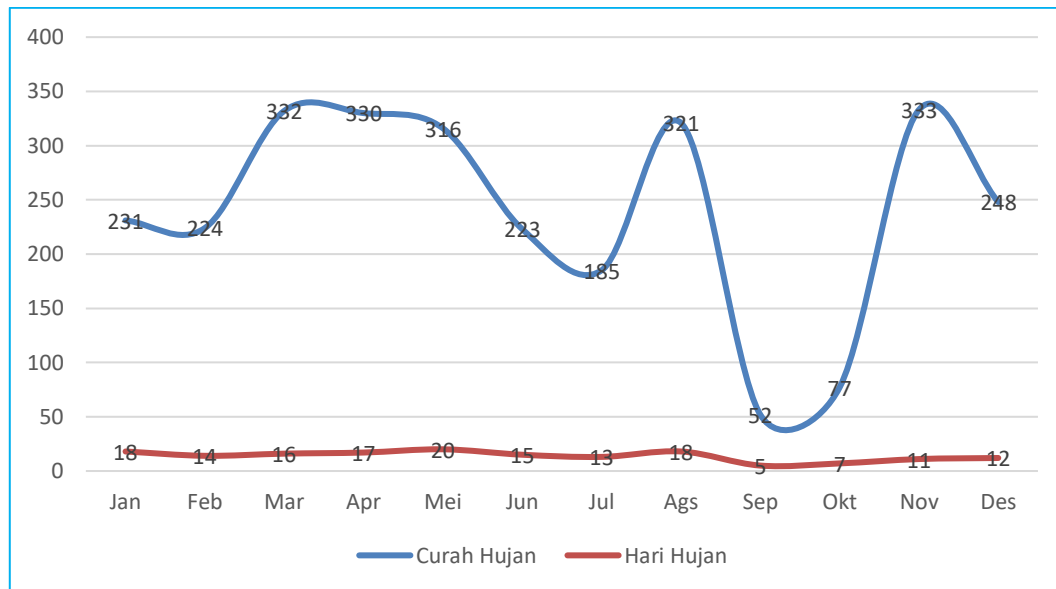
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.6
Peta Cekungan Air Tanah

2.1.1.1.6. Klimatologi

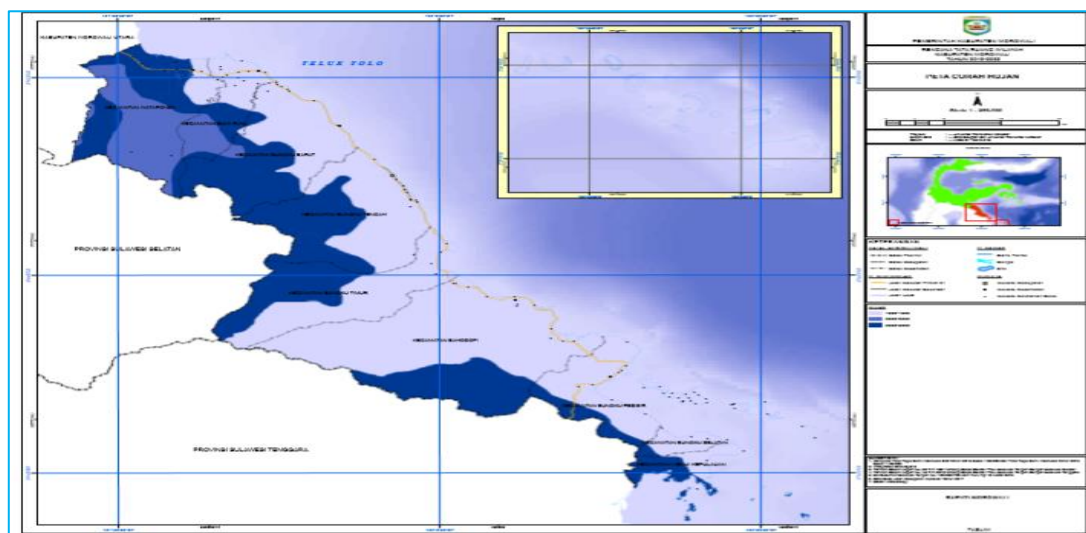
Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm³ dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm³ selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm³ selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm³ selama 7 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan gambar 2.8 peta Klimatologi Kabupaten Morowali



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2023

Gambar 2.7
Kondisi Iklim Morowali 2022



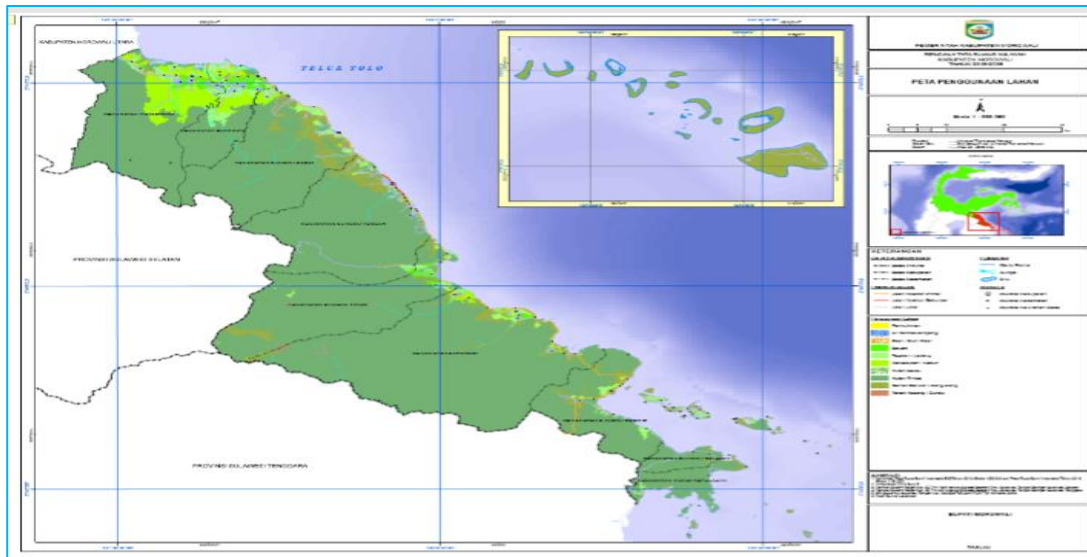
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.8
Kondisi Iklim Morowali 2022

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan

Perkebunan. Selengkapnya dijelaskan pada tabel 2.3 dan peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali pada Gambar 2.9.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.9

Peta Penggunaan Lahan

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 .



Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat di kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat,



- Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
 - e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
 - f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
 - g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
 - h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
 - i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan



- budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan



- Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
 - q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
 - r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
 - s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3).



- Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;
- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;



- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
- w. Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan;
- x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 1). permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

2.1.1.1.9.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.



1. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Luas lahan padi (Ha) menurut Jenis Irigasi dan Jenis Padi pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan 2022 (Ha)			Luas Tanam 2022 (Ha)		
		Irigasi	Non Irigasi	Total Luas Sawah	Sawah	Ladang	Total
1	Menui Kepulauan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bungku Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bahodopi	25,3	0,0	25,3	11,40	12,00	23,40
4	Bungku Pesisir	53,9	10,0	63,9	54,80	0	54,80
5	Bungku Tengah	37,5	10,0	47,5	12,70	0	12,70
6	Bungku Timur	432,6	30,0	462,6	464,60	0	464,60
7	Bungku Barat	438,0	300,0	738,0	751,70	17	768,70
8	Bumi Raya	1.847,8	20,0	1.867,8	3.617,70	24	3.641,70
9	Witaponda	2.039,0	17,0	2.056,0	3.982,30	26	4.008,30
	Total	4.874,1	387,0	5.261,1	8.895,20	79,00	8.974,20

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa potensi sumberdaya lahan untuk tanaman padi berada di Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya dan Bungku Barat. Dua kecamatan pertama memiliki lahan irigasi mencapai 2.000 Ha. Berdasarkan kondisi geografis, ketiga kecamatan dengan luas lahan padi terbesar memiliki topografi yang datar.

Potensi usaha tani untuk padi ladang hanya terdapat di dua kecamatan yakni Bungku Barat dan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS (2019), potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 4.476 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1.549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1.900 Ha (terluas di Bungku Barat (871 Ha) dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha (terluas di Bungku Barat 26.756 Ha). Luas panen



tanaman padi di Kabupaten Morowali Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, 2020. Namun luas panen komoditas palawija seperti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk komoditas tanaman palawija seperti kacang tanah luas panennya mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali,
Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Luas Tanam (Ha)
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Padi :						
√ Padi Sawah	10.695,50	11.264,30	9.852,00	9.343,00	8.516,70	8.507,65
√ Padi Ladang	-	-		90,0	-	-
Palawija :						
Jagung	1.530,40	1.179,70	1.814,40	1.040,10	1.204,20	633,30
Ubi Kayu	160,00	144,00	173,00	224,50	198,50	46,50
Ubi jalar	46,50	38,50	68,90	87,00	60,00	57,50
Kacang Tanah	51,50	52,50	53,00	69,90	52,00	55,12
Kacang Kedelai	1.543,70	61,00	229,00	190,00	243,00	267,30
Kacang Hijau	137,80	61,00	73,40	57,50	43,50	34,37

.Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.3, luas panen tanaman padi di Kabupaten Morowali tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8.516,70 Ha, di mana pada tahun sebelumnya Tahun 2021 luas panen tanaman padi seluas 9.343,00 Ha, Tahun 2020 seluas 9.852,00 Ha, demikian pula halnya dengan tanaman pangan lainnya juga mengalami penurunan seperti kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Sedangkan jagung dan kedelai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 luas panen tanaman padi tertinggi yaitu di Tahun 2019 sebesar 11.264,30 Ha.



Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi padi dan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 menurut jenis (ton) dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, produksi tanaman padi tertinggi yaitu sebesar 54.890,93 ton pada Tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 52.119,93 ton, namun kembali menurun hingga Tahun 2020 menjadi 44.915,27 ton, dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 46.221,70 Ton. Sama halnya dengan tanaman padi, jumlah produksi tanaman kacang kedelai tertinggi yaitu sebesar 2.046,95 ton pada Tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 34,5 ton, namun kembali menurun menjadi 190,00 ton Tahun 2021.

Tabel 2.4
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali,
Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	46.723,3	52.119,17	54.890,93	44.915,27	46.221,70	42.583,50
Jagung	2.898,4	5.654,83	4.358,99	80.190,58	4.368,42	4.937,22
Ubi Kayu	3.280,3	4.267,04	3.840,34	4.823,76	6.259,73	5.070,48
Ubi jalar	553,9	605,76	501,54	1.091,51	1.378,25	778,44
Kacang Tanah	40,3	64,84	66,10	59,47	78,43	55,12
Kacang Kedelai	34,5	2.046,95	80,89	303,88	190,00	267,30
Kacang Hijau	14,4	110,52	48,92	57,99	45,43	34,37

Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti padi tahun 2021 sebesar 46.221,70 Ton dan Tahun 2022 menjadi 42.583,50 Ton, ubi kayu pada tahun 2021 sebesar 6.259,73 ton dan pada tahun 2022 menjadi 5.070,48 ton, ubi jalar pada tahun 2021 sebesar 1.378,25 ton dan tahun 2022 menjadi 778,44 ton, Kacang tanah pada tahun 2021 sebesar 78,43 ton dan tahun 2022 menjadi 55,12 ton dan kacang hijau pada tahun 2021 sebesar 45,43 ton dan pada tahun 2022 menjadi 34,37 ton, sementara untuk jagung mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 sebesar 4.368,42 ton dan pada tahun 2022



menjadi 4.937,22 ton dan kacang kedelai pada tahun 2021 sebesar 190 Ton meningkat pada tahun 2022 menjadi 267,30 ton.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tanaman cabe rawit dan terung merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Merah	126	34	143	268	2.142,00
Cabe Rawit	5.161	5.87	2.624	8.516	9.619,00
Tomat	1.414	1.774	1.458	5.142	3.818,50
Kacang Panjang	-	2.505	1.54	3.351	3.431,40
Kangkung	-	2.5	1.138	3.259	3.499,10
Terung	-	2.201	1.554	2.745	3.984,00

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

Tabel 2.6
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Buah

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mangga	6.993	6.593	3.350	707	1.043,10
Durian	10.315	5.551	2.625	222	140
Jeruk Siam	884	474	286	428	776,2
Pisang	9.121	8.133	10.073	7.250	5.236,91
Pepaya	2.361	2.769	2.438	1.167	-
Salak	55	66	17	36	34,9
Rambutan	-	3.140	491	1.234	337,76
Langsat	-	8.605	5.667	2.425	4.620,00
Nangka	-	3.775	1.186	1.254	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan



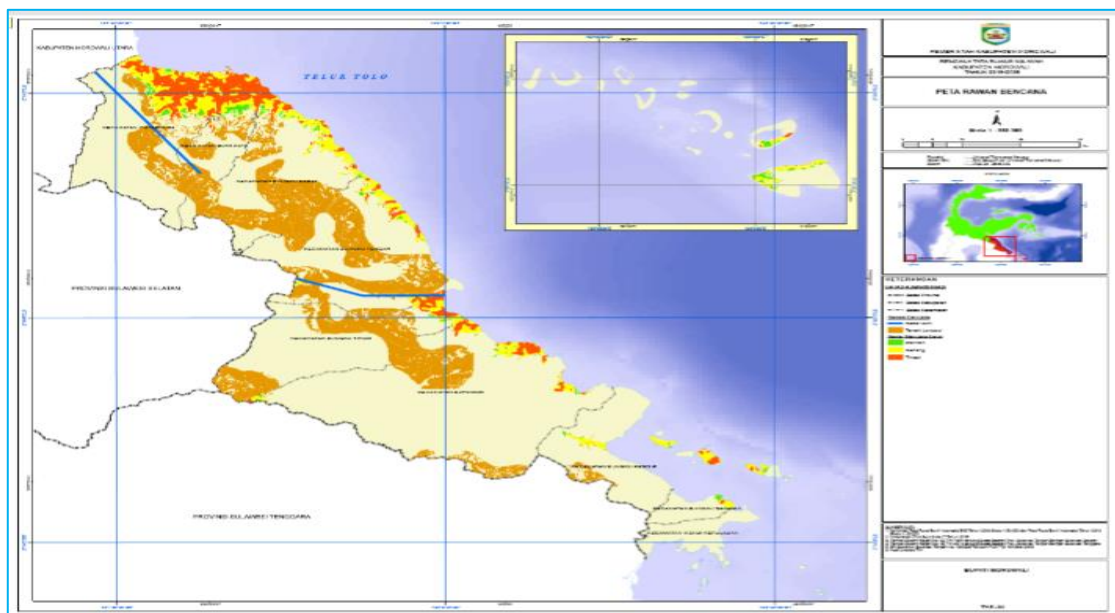
banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.11

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi



pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebanyak 121.296 jiwa meningkat sebesar 14,30 persen pada Tahun 2020 menjadi 161.727 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 161.727



jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,92 persen antara Tahun 2010-2018 dan 0,953 persen antara 2010-2020.

Tabel 2.6
**Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali, Tahun 2019 - 2022**

No	Kecamatan	Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) 2019-2022
		2019	2020	2021	2022	
1	Menui Kepulauan	13.609	13.232	13.043	12.948	(1,23)
2	Bungku Selatan	14.831	13.914	13.672	13.528	(1,59)
3	Bahodopi	7.754	37.322	43.121	50.171	18,42
4	Bungku Pesisir	4.745	6.625	6.771	6.968	2,93
5	Bungku Tengah	26.193	29.302	29.715	30.344	2,02
6	Bungku Timur	8.989	12.061	12.284	12.600	2,53
7	Bungku Barat	12.331	14.061	14.185	14.411	1,41
8	Bumi Raya	12.952	14.524	14.515	14.608	0,33
9	Witaponda	19.892	20.686	20.604	20.666	(0,06)
	Morowali	121.296	161.727	167.910	176.244	5,03

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2022 sekitar 5,03 persen (Tahun 2020-2022), tertinggi di Kecamatan Bahodopi antara Tahun 2020-2022 dan Bungku Pesisir. Lonjakan jumlah penduduk tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya bagi penduduk Pendatang yang bekerja di Kabupaten Morowali. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Morowali sangat tinggi, bukan karena angka kelahiran yang tinggi, melainkan banyak pendatang yang bekerja di Kabupaten Morowali dan berpindah kependudukan.

2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-



laki dengan penduduk perempuan.

Jika dilihat dengan cermat tabel 2.4, tergambarkan bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2022 dengan rasio sebesar 184,77, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 95,18. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
Menui Kepulauan	6.314	6.634	12.948	95,18
Bungku Selatan	6.755	6.773	13.528	99,73
Bahodopi	32.553	17.618	50.171	184,77
Bungku Pesisir	3.622	3.346	6.968	108,25
Bungku Tengah	15.855	14.489	30.344	109,43
Bungku Timur	6.450	6.150	12.600	104,88
Bungku Barat	7.515	6.896	14.411	108,98
Bumi Raya	7.403	7.205	14.608	102,75
Witaponda	10.442	10.224	20.666	102,13
	96.909	79.335	176.244	122,15

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terlihat *sex ratio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 95,18 sampai 184,77. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex ratio=100*) dengan angka rasio sebesar 122,15 dan bahkan terdapat kecenderungan *sex ratio* tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Ketimpangan rasio kelamin penduduk di Kabupaten Morowali dikarenakan Potensi wilayah kecamatan yang berbeda, seperti Kecamatan Bahodopi rasionya sangat tinggi karena merupakan wilayah industri yang mempekerjakan banyak penduduk laki-laki.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region.

PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020 Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,84	(2,76)	3,21	1,81
B	Pertambangan dan Penggalan	51,25	19,77	34,40	23,11	17,22
C	Industri Pengolahan	277,16	24,00	35,72	24,53	31,91



Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,25	1,98	4,47	2,69	11,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,17	0,17	0,11	9,06	2,33
F	Konstruksi	6,27	13,31	(14,62)	70,45	34,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	2,90	(4,98)	9,00	62,22
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	6,47	(28,38)	201,86	151,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,26)	4,01	(10,48)	14,19	56,23
J	Informasi dan Komunikasi	12,87	6,80	7,09	9,83	23,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	0,17	13,23	7,89	5,92
L	Real Estat	2,12	0,90	0,15	3,77	28,73
M,N	Jasa Perusahaan	(10,02)	4,98	(1,17)	1,27	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	5,05	1,06	4,59	(3,00)
P	Jasa Pendidikan	1,21	3,00	(0,18)	0,74	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,16	8,35	6,91	4,05	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,93	2,59	(0,44)	14,40	10,05
Produk Domestik Regional Bruto		112,20	20,20	28,93	25,15	28,21

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

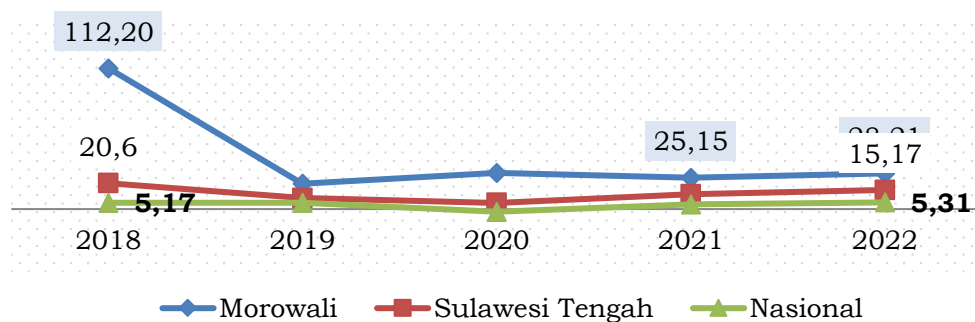
Pada Tabel 2.6 di atas ditunjukkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi



yakni sebesar 28,93%. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77 persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (-14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

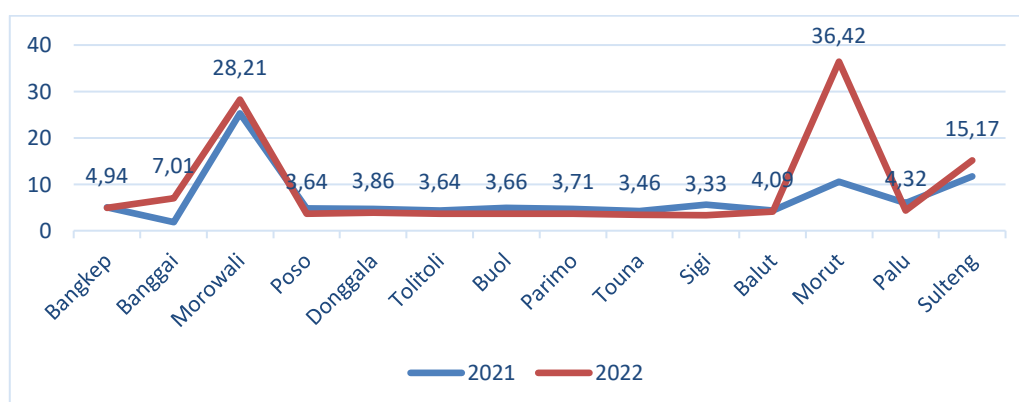
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2018-2022 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Dan hingga Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20,20 persen, tetap lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,15 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5,02 persen. Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat parah ada kondisi Perekonomian global termasuk Indonesia, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif (-2,10) persen. Namun perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, tetap tumbuh positif sebesar 4,86 persen. Sedangkan Kabupaten Morowali tumbuh sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21%, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional (5,31%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (15,17%) secara lengkap terdapat pada Gambar 2.11 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya, dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 36,42 persen dan di urutan ketiga Kabupaten Banggai sebesar 7,01 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sigi sebesar 3,33 persen, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,46 persen dan Kabupaten Poso, Tolitoli sebesar 3,64 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 dan tahun 2022, data terkait terdapat pada Gambar 2.12 berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022



a. Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Morowali

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Nilai PDRB ADHK 2010 kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebesar Rp28.358,40 miliar, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp43.947.504,40 juta dan ditahun 2022 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp70.515,62 miliar. Dalam periode Tahun 2018-2022 pertambahan nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali sebesar Rp 42.157,22 miliar. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.411,28	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63
B	Pertambangan dan Penggalian	6.408,96	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97
C	Industri Pengolahan	17.168,97	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,61	1,64	1,71	1,76	1,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,93	3,94	3,94	4,30	4,40
F	Konstruksi	1.980,84	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	603,13	620,63	589,75	642,84	1.042,81



Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	53,28	56,73	40,63	122,65	308,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,97	14,53	13,00	14,85	23,20
J	Informasi dan Komunikasi	170,84	182,45	195,38	214,59	265,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,77	106,95	121,10	130,65	138,39
L	Real Estat	106,05	107,00	107,16	111,20	143,15
M,N	Jasa Perusahaan	2,26	2,37	2,34	2,37	2,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	145,02	152,35	153,98	161,05	156,22
P	Jasa Pendidikan	82,84	85,32	85,17	85,80	86,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,81	63,72	68,12	70,88	72,45
R,S,T, U	Jasa lainnya	39,85	40,88	40,70	46,56	51,24
Produk Domestik Regional Bruto		28.358,40	34.085,70	43.947,50	55.001,24	70.515,62

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp47.464,37 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp14.888,97 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp4.396,97 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp 66.750,31 miliar, atau sebesar 94,66 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp1,96 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp2,71 miliar, serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp4,40



miliar. Selanjutnya jika dilihat dari aspek kontribusi setiap sektor dapat ditampilkan dan dijelaskan pada Tabel 2.10 sebagai berikut ini.

Tabel 2.10
Kontribusi Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (%)

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,98	4,22	3,18	2,62	2,08
B	Pertambangan dan Penggalian	22,6	22,52	23,48	23,09	21,11
C	Industri Pengolahan	60,54	62,46	65,74	65,42	67,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,99	6,58	4,36	5,94	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,13	1,82	1,34	1,17	1,48
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,17	0,09	0,22	0,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,6	0,54	0,44	0,39	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,31	0,28	0,24	0,20
L	Real Estat	0,37	0,31	0,24	0,20	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,45	0,35	0,29	0,22
P	Jasa Pendidikan	0,29	0,25	0,19	0,16	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,19	0,16	0,13	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,12	0,09	0,08	0,07
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)



Merujuk pada Tabel 2.10 di atas diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perekonomian Kabupaten Morowali. Terdapat 2 (dua) sektor yang berpengaruh besar dan berkontribusi tertinggi yakni Sektor Industri pengolahan dan sektor Pertambangan dan penggalian dengan kontribusi yakni masing-masing sebesar 67,31 persen dan 21,11 persen. Kedua sektor tersebut dalam periode Tahun 2018-2022 memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Morowali. Pertambangan nikel menjadi andalan dari perekonomian Kabupaten Morowali. Terdapat 10 perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga mencapai sekitaran 45 ribu jiwa. Tumbuhnya sektor pertambangan yang besar di Kabupaten Morowali menjadi daya tarik pencari kerja di wilayah Sulawesi bahkan di luar Sulawesi. Sektor lainnya dengan kontribusi besar dalam menopang perekonomian Morowali yakni Sektor Konstruksi sebesar 6,24 persen.

Sebaliknya, sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,001 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan 0,01 persen, serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,03 persen. Selanjutnya, Sektor Pertanian dengan kontribusi yang semakin menurun yakni sebesar 2,08 persen, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan setiap Tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan sektor ini terus tumbuh positif, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Morowali masih bekerja di sektor ini.

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2018-2022. Nilai PDRB ADHB Tahun 2018 sebesar Rp37.356,48 miliar, dan meningkat terus hingga Tahun 2022 menjadi sebesar Rp146.599,32 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11
Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.049,00	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57
B	Pertambangan	6.928,11	8.242,67	11.364,6	18.404,8	25.349,7



Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
	dan Penggalian			4	8	8
C	Industri Pengolahan	23.463,41	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,73	1,70	1,90	2,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,66	5,24	5,46	5,82	6,17
F	Konstruksi	2.976,24	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893,43	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17
H	Transportasi dan Pergudangan	70,97	81,34	59,90	183,05	496,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,03	21,35	19,04	22,75	39,19
J	Informasi dan Komunikasi	202,09	221,71	234,25	260,05	322,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	148,35	156,37	168,16	191,63	222,62
L	Real Estat	138,88	145,54	148,42	151,95	201,46
M, N	Jasa Perusahaan	3,36	3,77	3,74	3,82	4,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,40	254,34	261,51	278,72	277,91
P	Jasa Pendidikan	111,57	119,10	120,36	121,85	127,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,35	80,83	87,84	97,66	100,19
R, S, T, U	Jasa lainnya	55,95	59,56	59,73	79,73	89,43
Produk Domestik Regional Bruto		37.356,48	45.244,73	61.985,63	98.916,81	146.599,32

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Melihat data Tabel 2.11 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha ter-besar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp107.299,77 miliar, Sektor Pertambangan dan



Penggalian sebesar Rp25.349,78 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp7.880,45 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp140.530,00 miliar atau sebesar 95,86 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,13 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp4,40 miliar serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp6,17 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp2.346,57 miliar.

Selanjutnya melihat data pada Tabel 2.10 di bawah, diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perkenomian Kabupaten Morowali. Yakni 2 (dua) sektor yang dominan yakni Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi masing-masing sebesar 73,19 persen dan 17,29 persen, kemudian Sektor Kontruksi sebesar 5,38 persen. Serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,60 persen, menurun sangat signifikan. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Tabel 2.12
Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,48	4,56	3,27	2,17	1,60
B	Pertambangan dan Penggalian	18,55	18,22	18,33	18,61	17,29
C	Industri Pengolahan	62,81	64,86	69,98	71,13	73,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
F	Konstruksi	7,97	7,69	5	5,60	5,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,39	2,12	1,53	1,08	1,25
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,18	0,1	0,19	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,05	0,03	0,02	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,49	0,38	0,26	0,22



Lapangan Usaha		Tahun (%) -				
		2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	0,35	0,27	0,19	0,15
L	Real Estat	0,37	0,32	0,24	0,15	0,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,57	0,56	0,42	0,28	0,19
P	Jasa Pendidikan	0,3	0,26	0,19	0,12	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,2	0,18	0,14	0,10	0,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,15	0,13	0,1	0,08	0,06
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Selanjutnya dari Tabel 2.12 di atas sektor yang kontribusi terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,001 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan 0,001 persen, serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,03 persen. Sektor Pertanian masih berkontribusi cukup rendah yakni sebesar 1,60 persen, namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. Data kontribusi sektor dalam PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADHB
dan PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali

Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,48	4,98	4,56	4,22	3,27	3,18	2,17	2,62	1,60	2,08	3,42	3,42
B	Pertambangan dan Pengalihan	18,55	22,60	18,22	22,52	18,33	23,48	18,61	23,09	17,29	21,11	18,20	22,56



Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
C	Industri Pengolahan	62,81	60,54	64,86	62,46	69,98	65,74	71,13	65,42	73,19	67,31	68,40	64,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,97	6,99	7,69	6,58	5,00	4,36	5,60	5,94	5,38	6,24	6,33	6,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,39	2,13	2,12	1,82	1,53	1,34	1,08	1,17	1,25	1,48	1,67	1,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,19	0,18	0,17	0,10	0,09	0,19	0,22	0,34	0,44	0,20	0,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04



Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	Minum												
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,60	0,49	0,54	0,38	0,44	0,26	0,39	0,22	0,38	0,38	0,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,38	0,35	0,31	0,27	0,28	0,19	0,24	0,15	0,20	0,27	0,28
L	Real Estat	0,37	0,37	0,32	0,31	0,24	0,24	0,15	0,20	0,14	0,20	0,24	0,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,57	0,51	0,56	0,45	0,42	0,35	0,28	0,29	0,19	0,22	0,41	0,36
P	Jasa Pendidikan	0,30	0,29	0,26	0,25	0,19	0,19	0,12	0,16	0,09	0,12	0,19	0,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,21	0,18	0,19	0,14	0,16	0,10	0,13	0,07	0,10	0,14	0,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07	0,10	0,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)



Selanjutnya pada Tabel 2.14 di bawah ditunjukkan pertumbuhan kontribusi sektoral pada PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali selama periode 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.14
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB ADHB
dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2022

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)	
		Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,27	1,81
B	Pertambangan dan Penggalian	37,73	17,22
C	Industri Pengolahan	52,51	31,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,11	11,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,01	2,33
F	Konstruksi	42,16	34,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71,96	62,22
H	Transportasi dan Pergudangan	171,35	151,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,26	56,23
J	Informasi dan Komunikasi	24,20	23,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,17	5,92
L	Real Estat	32,58	28,73
M,N	Jasa Perusahaan	15,18	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,29	-3,00
P	Jasa Pendidikan	4,57	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,59	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,17	10,05

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Pertumbuhan kontribusi masing-masing sektor selama periode 2018-2022 di Kabupaten Morowali menunjukkan sektor-sektor yang memiliki peranan semakin meningkat, atau sebaliknya. Sektor-sektor yang memperlihatkan pertumbuhan positif, maka sektor tersebut memiliki peranan semakin meningkat. Di sisi lain, sektor-sektor dengan pertumbuhan negatif, maka sektor-sektor tersebut memiliki peranan semakin menurun. Merujuk pada data Tabel 2.12 di atas, diketahui bahwa seluruh sektor tersebut tumbuh positif selama 5 (lima) Tahun terakhir. Sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yakni Sektor Industri Pengolahan 64,30 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 22,56 persen dan Sektor Konstruksi 6,02,



serta Sektor Pertanian sebesar 3,42 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan rendah yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Sektor Jasa Perusahaan.

2.1.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani adalah indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani dikalikan dengan 100 %. Adapun Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Nilai Tukar Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2022

Wilayah	Nilai Tukar Petani			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Morowali	91,8	95,27	103,51	103,6

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali

Dari tabel 2.15 di ketahui Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali tahun 2019 yaitu sebesar 91,8 dan pada tahun 2022 menjadi 103,6. Peranan sector pertanian masih cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Secara agregat sudah mencapai 14,51 %. Dimana pertumbuhan sector pertanian menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 mencapai 3,78% menjadi 0,8 % Tahun 2018 kemudian kembali peningkatan menjadi 2,85 % pada Tahun 2019.

Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berkembang cukup pesat terutama dari pendatang, maka sector pertanian merupakan sector yang penting untuk dikembangkan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan penduduk akan bahan pangan yang tentu mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai dengan tingginya permintaan akan hasil pertanian di Kabupaten Morowali, justru tidak searah dengan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Hal ini kan membahayakan pembangunan di Kabupaten Morowali sendiri



dikarenakan potensi sektor pertanian cukup besar malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga in-deks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu



kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018- 2022. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28 yang ditampilkan pada Gambar 2.16 sebagai berikut ini.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota,
2017 – 2022

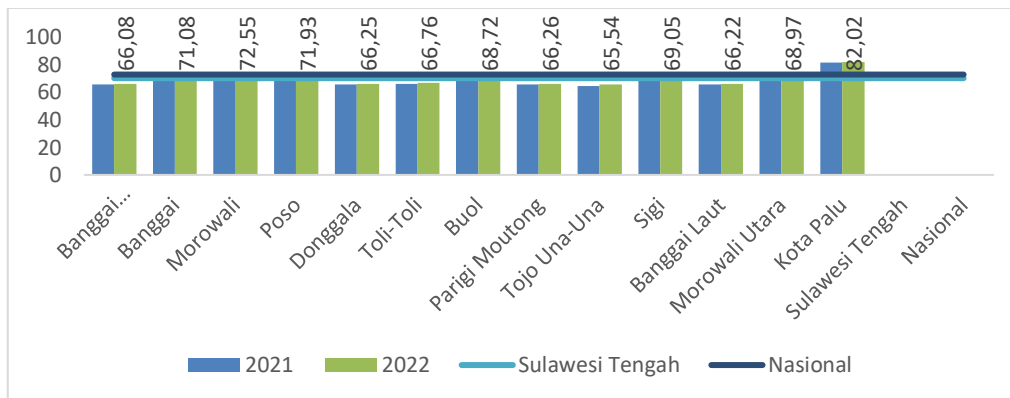
Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	64,07	64,68	65,13	65,42	65,61	
Banggai	69,00	69,85	70,36	70,52	70,60	
Morowali	70,41	71,14	72,02	72,21	72,29	72,55
Poso	69,78	70,68	71,40	71,28	71,45	
Donggala	64,66	65,14	65,49	65,56	65,72	
Toli-toli	64,05	64,60	65,42	65,69	66,30	
Buol	66,69	67,30	67,69	67,82	68,25	
Parigi Moutong	64,09	64,85	65,47	65,44	65,82	
Tojo Una-una	62,61	63,38	64,52	64,59	64,74	
Sigi	66,72	67,66	68,16	68,12	68,49	
Banggai Laut	64,08	64,80	65,27	65,43	65,65	
Morowali Utara	67,35	67,95	68,45	68,36	68,48	
Kota Palu	80,24	80,91	81,50	81,47	81,70	

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.16 menunjukkan nilai pertumbuhan IPM Kabupaten Morowali berada pada urutan ke dua setelah kota palu sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2017 dengan nilai 70,41 % sedangkan pada tahun 2022 yaitu mencapai 72,55 % sehingga mengalami perubahan status dari “ Sedang “ menjadi “Tinggi” dengan adanya perubahan status ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali.

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 menunjukkan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni

sebesar 82,02 masuk kategori **sangat tinggi**. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada gambar sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.13
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
Dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 2.20 di bawah ini ditampilkan peta IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, hingga Tahun 2022, hanya Kota Palu dengan status IPM **Sangat Tinggi**, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai pada kategori tinggi, sedangkan sisanya dalam kategoeri IPM sedang.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.14
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



2.1.2.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lainnya. Adapun kondisi kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Sulawesi Tengah, 2017 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	381 753	16,99	14,55
2018	402 292	17,03	14,34
2019	428 744	16,61	13,75
2020	463 140	16,50	13,43



Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2021	478 409	17,07	13,75
2022	507 523	15,86	12,58

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 2.17 terjadi kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 478.409 menjadi Rp. 507.523 pada tahun 2022, yang artinya bahwa apabila pengeluaran dalam satu bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali mencapai 15,86 ribu orang (12,58 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2021 yang sebesar 17.07 ribu orang (13,75 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor lainnya.

2.1.2.2.3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Penganggur adalah Tenaga Kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari dua jam pada minggu yang lalu. Tingkat pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Seseorang dikatakan Bekerja bila yang bersangkutan bekerja lebih dari 2 jam pada minggu yang lalu. Rasio Orang yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2018 – 2022)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banggai Kepulauan	72,97	71,98	74,63	71,98	74,63
2	Banggai	69,79	71,80	73,48	71,8	73,48



No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
3	Morowali	64,70	63,75	60,74	63,75	60,74
4	Poso	74,78	73,54	72,41	73,54	72,41
5	Donggala	63,93	67,47	72,03	67,47	72,03
6	Toli-Toli	65,95	64,04	64,70	64,04	64,7
7	Buol	69,75	67,52	69,18	67,52	69,18
8	Parigi Moutong	72,50	68,82	74,05	68,82	74,05
9	Tojo Una-Una	75,33	74,86	68,47	74,86	68,47
10	Sigi	69,24	70,76	72,69	70,76	72,69
11	Banggai Laut	67,20	61,42	58,37	61,42	58,37
12	Morowali Utara	69,85	68,47	69,93	68,47	69,93
13	Kota Palu	66,46	65,07	64,68	65,07	64,68
	Sulawesi Tengah	69,44	68,73	69,99	68,73	69,99

Sumber Data : Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Tabel 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Morowali	2.80	2.97	5.21	4,01	3,20

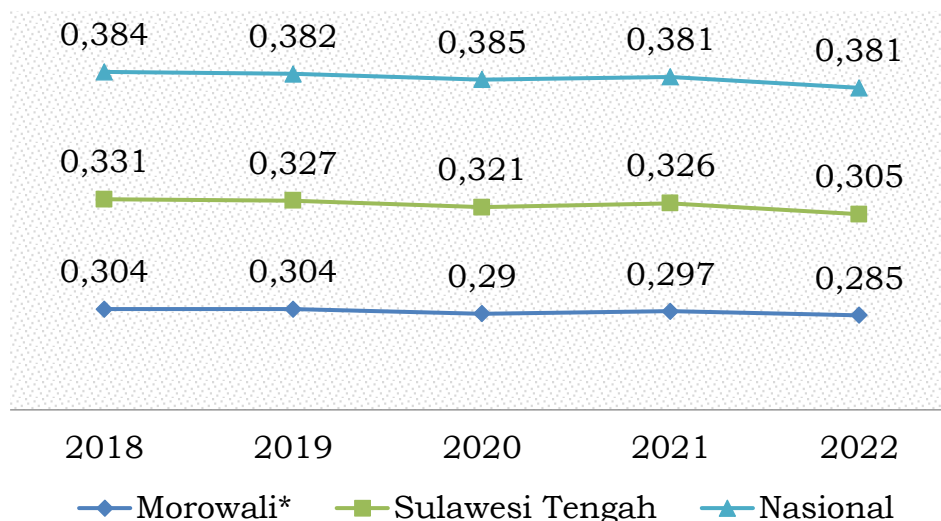
Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel 2.17 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2020 hanya mencapai 5,21 %. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali menurun sebesar 4,01% dan pada tahun 2022 menurun menjadi pada 3,20 %. Hal ini disebabkan adanya terbukanya lapangan kerja disektor industri yang ada di Kecamatan Bahodopi dan Bungku Barat.



2.1.2.2.4. Gini Ratio

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hamper tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.15 sebagai berikut.

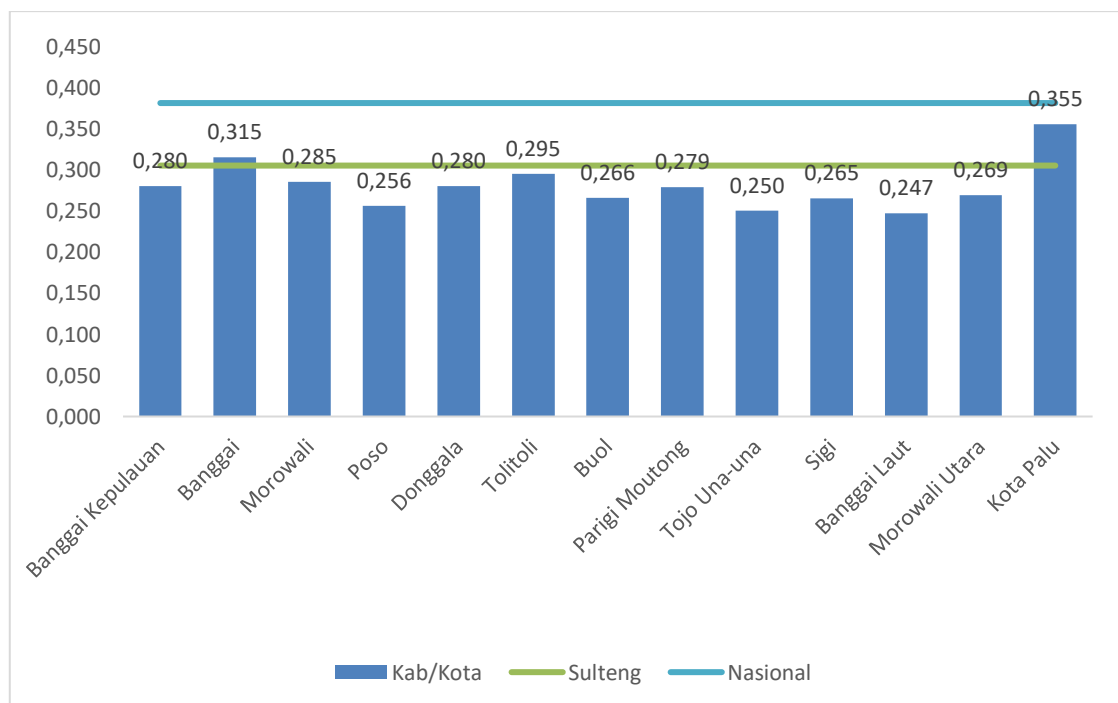


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.15
Indeks Gini Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 2.6 di atas disajikan besarnya indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional Tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

Selanjutnya jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indkes Gini tertinggi dalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.16 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.16
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
APM dan APK Menurut Kabupaten Morowali, 2020 – 2022

Jenjang Pendidikan	Capaian					
	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	94,72	95,07	93,67	108,95	109,42	109,40
SMP/MTs/Paket B	73,49	73,23	73,13	103,84	102,31	99,41
SMA/SMK/MA/Paket B	67,54	69,71	70,62	81,03	83,39	98,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

APM dan APK Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, capaian tersebut harus terus di jaga untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten morowali. Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Khusus pada wilayah kepulauan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan guru serta keterjangkauan dan aksesibilitas murid bersekolah. Pada beberapa wilayah



kecamatan khususnya kepulauan masih banyak terdapat gedung sekolah dengan kondisi belum layak dalam menjalankan proses belajar mengajar serta belum memadainya sarana prasarana seperti buku dan peralatan mengajar, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

B. Angka Putus Sekolah

Dalam rangka memastikan kualitas dan inklusivitas pendidikan, Undang-Undang Dasar 45 mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN/APBD di sektor pendidikan. Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Morowali dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya ada-lah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. zangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah.

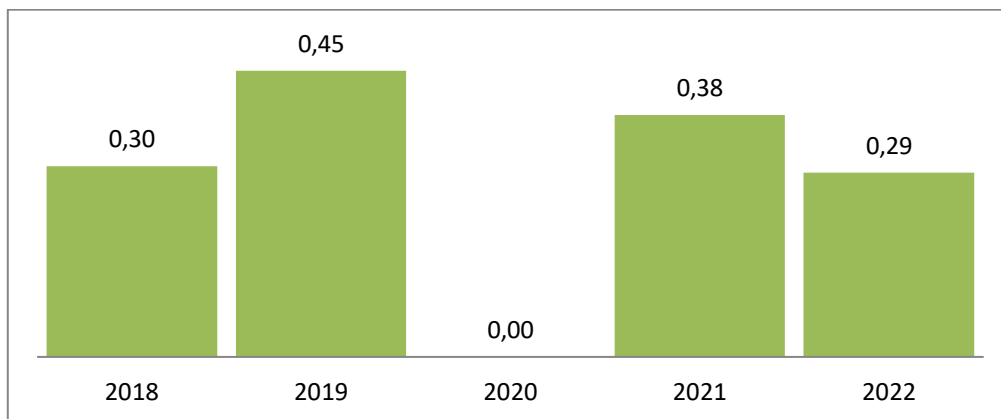
Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Di Kabupaten Morowali semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Pada Tahun 2022 sebesar 0,29 persen penduduk putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SMP/ sederajat yakni sebesar 0,18 persen. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SMA/ Sederajat mencapai 0,48 persen. Secara detail dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Pada periode Tahun 2018-2022 APS jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali masih terjadi, namun dalam proporsi yang masih rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Tahun 2018 APS jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali

sebesar 0,30 persen, tertinggi terjadi di Tahun 2022 sebesar 0,29 persen. Meningkat Tahun 2019 sebesar 0,45 persen, dan ditahun 2020 sebesar nol persen, tahun 2021 sebesar 0,38 persen dan ditahun 2022 sebesar 0,29 persen yang disajikan pada Gambar 2.17 sebagai berikut ini.

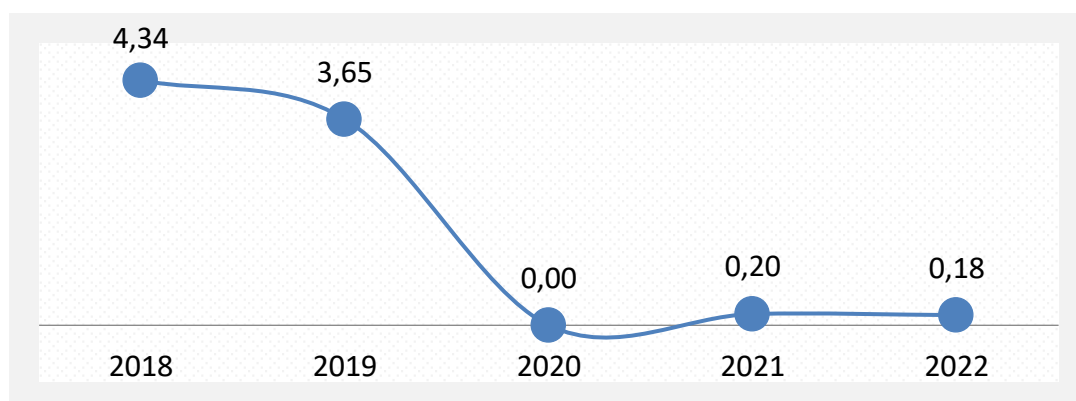


Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.17
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Morowali lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan SD/MI. Dalam kurun Tahun 2018 s/d 2022 APS jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung meningkat. Terlihat di Tahun 2018 yang sebesar 4,34 persen, meningkat hingga Tahun 2019 menurun menjadi 3,65 persen, dan ditahun 2020 sebesar nol persen, Tahun 2021 sebesar 0,20 persen dan tahun 2022 sebesar 0,18 persen seperti terdapat pada Gambar 2.18 sebagai berikut.

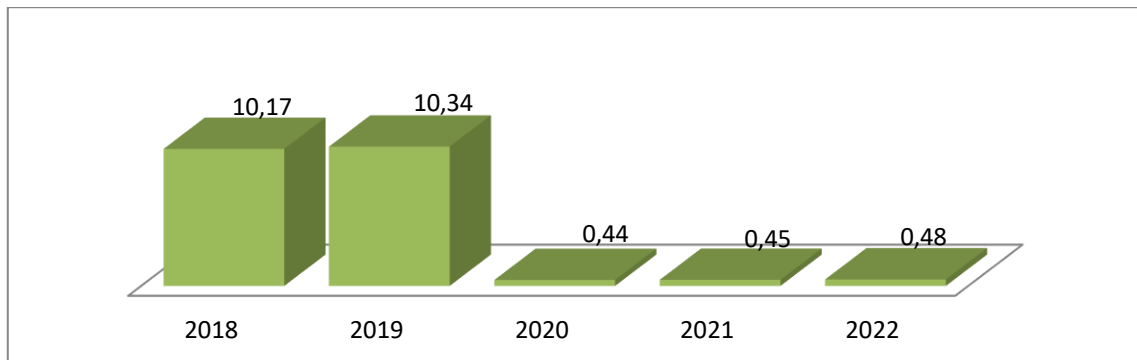


Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.18
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

APS pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat masih cukup tinggi pada periode Tahun 2018-2022. Rata-rata APS periode Tahun 2018 sebesar 10,17 persen. Dan Tahun 2020 sebesar 0,44 persen. Kemudian tahun 2022 sebesar 0,48 persen. Perkembangan APS jenjang pendidikan SMA/Sederajat Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.19 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.19
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali

C. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolok ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar. Angka kelulusan tinggi juga dianggap sebuah prestasi bagi sekolah yang bersangkutan. angka kelulusan yang tinggi menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru sehingga angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran. Data angka kelulusan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.21 sebagai berikut.

Tabel 2.21
Angka Kelulusan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100
3	SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)



Berdasarkan data pada Tabel 2.21 di atas, periode Tahun 2018-2022 angka kelulusan Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan mencapai 100 persen. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang semua jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali, Hal ini disebabkan secara umum angka kelulusan yang mencapai angka sempurna yaitu 100 persen.

Siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya diharapkan semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk mendorong masyarakatnya untuk sekolah hingga pendidikan tinggi. Dalam meningkatkan minat siswa untuk terus bersekolah pemerintah memberikan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hingga Tahun 2022 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100 persen, meningkat dari Tahun 2018 yang sebesar 99,80 persen. Selanjutnya Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2018 sebesar 100,00 persen meningkat hingga Tahun 2022 sebesar 99,71 persen. Namun Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi menurun Tahun 2022 menjadi 76,41 persen. Penurunan lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dikarenakan sebagian siswa pada jenjang tersebut setelah tamat sekolah lebih memilih untuk bekerja di perusahaan, dan lain sebagainya. Data yang melanjutkan di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.22 sebagai berikut.

Tabel 2.22
Angka Yang Melanjutkan
Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2020	2021	2022
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,80	100,00	100,00	100,00
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	98,90	99,71
3	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	70,00	73,18	76,80	76,41

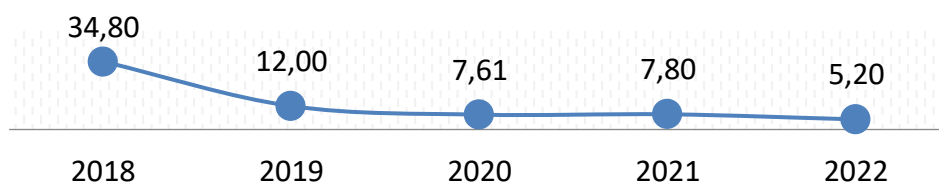
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali 2023 (diolah)

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Persentase Balita Stunting

Istilah *underweight* sendiri merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan berdasarkan umur antara gizi buruk dan gizi kurang ($BB/U < -2$ SD) stunting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil pengukuran tinggi/panjang badan berdasarkan umur antara sangat pendek dan pendek ($TB/U < -2$ SD) sedangkan wasting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan dibandingkan hasil pengukuran tinggi/panjang badan antara sangat kurus dan kurus ($BB/TB < -2$ SD). Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek diantaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan (kognitif, motorik, bicara), meningkatnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas kerja.

Penanganan *stunting* di Kabupaten Morowali menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari angka stunting yang menurun sangat signifikan. Tahun 2018 angka *stunting* di Kabupaten Morowali sebesar 34,80 persen. Namun Tahun 2019 menurun sangat signifikan menjadi 12,00 persen, kemudian pada tahun 2020 angka stunting kabupaten Morowali sudah menurun sangat signifikan menjadi 7,61 persen, sampai dengan tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Morowali sebesar 5,20 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja kesehatan dalam penanganan *stunting* di daerah setempat semakin baik. Beragam intervensi yang dilakukan mulai dari alokasi dana APBD dan pemanfaatan dana desa dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Morowali.



Sumber: Profil Kesehatan Sulteng 2023 (diolah)

Gambar 2.20
Angka Stunting Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022



Secara umum di Propinsi Sulawesi Tengah masalah gizi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pemberian makanan tambahan bagi anak gizi kurang tidak dipantau sehingga pemberian tidak tepat sasaran dan tidak sesuai petunjuk teknis yang diberikan.
2. Dengan adanya kegiatan surveilans gizi melalui e-PPGBM yang mengharuskan capaian *by name by address* sehingga didapat kasus yang lebih banyak.
3. Masih ada tenaga pengelola gizi yang bukan berlatar belakang ilmu gizi (*nutrisionist*).

Selanjutnya, angka perkembangan *stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Tabel 2.23 sebagai berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan Angka *Stunting* Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2023

Kab/Kota	Prevalensi TB/U				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sigi	43,0	24,6	19,0	16,3	14,5
Tojo Una-Una	26,2	26,0	22,7	22,7	18,8
Bangkep	40,5	22,6	23,0	15,1	21,5
Palu	24,1	17,0	14,0	14,0	7,8
Parimo	33,7	21,5	11,4	11,4	10,9
Poso	26,2	21,8	16,8	16,8	12,4
Morowali	34,8	12,0	7,6	7,8	5,2
Banggai	31,9	19,9	17,9	17,9	14,0
Balut	34,2	20,7	20,8	20,8	10,3
Morut	28,5	24,0	17,4	17,4	7,6
Donggala	36,0	34,9	16,8	16,8	21,4
Toli-Toli	31,7	11,2	9,8	9,8	13,2
Buol	34,2	9,4	11,7	11,7	8,5
Sulteng	32,3	21,4	16,2	13,2	13,1

Sumber: Profil Kesehatan Sulteng 2023 (diolah)

Angka *stunting* di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 13,10 persen. Kabupaten dengan prevalensi angka *stunting* terbesar adalah Kabupaten

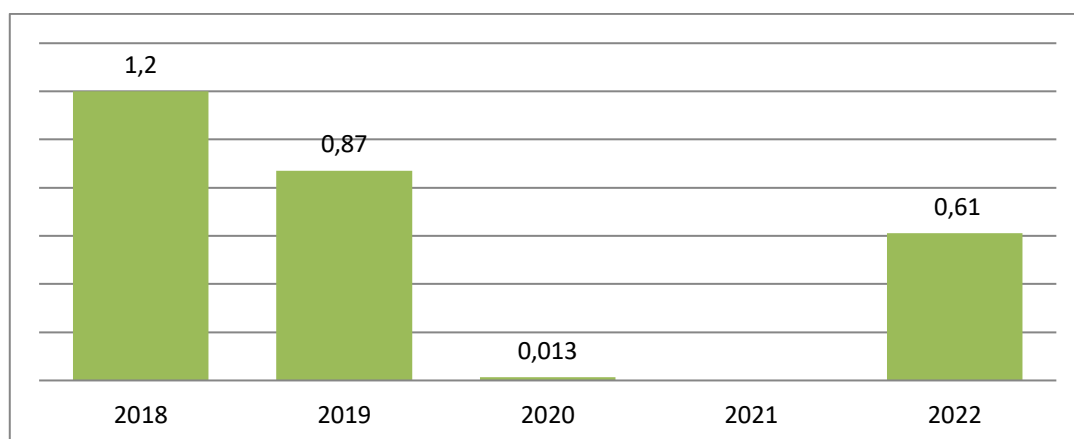


Banggai Kepulauan sebesar 21,50 persen, dan Kabupaten Donggala sebesar 21,40 persen. Sedangkan terendah Kabupaten Morowali.

B. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu dan bayi merupakan satu dari beberapa indikator derajat kesehatan, pendarahan dan prevalensi anemia menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan. Pantauan kesehatan ibu semasa kehamilan baik keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu.

Bayi adalah sebutan untuk anak usia 0–1 Tahun dan makhluk hidup yang baru saja dilahirkan dari Rahim ibu. Bayi adalah anak dari manusia atau hewan yang masih berusia sangat muda. Ketika bayi sudah mulai berjalan, disebut dengan balita. Umumnya istilah bayi diberikan kepada anak manusia yang berusia di bawah 12 bulan, namun definisi di berbagai tempat dapat bervariasi, bahkan ada yang hingga 2 tahun. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut *neonata* (dari bahasa latin *neonatus*, "yang baru dilahirkan") (Sumber: Wikipedia). Data angka kematian bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.21 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.21
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu Tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu Tahun tertentu. Berdasarkan data yang tersaji pada gambar di atas menunjukkan informasi mengenai perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali periode waktu 2018-2022, terus



mengalami fluktuasi di mana pada Tahun 2018 sebesar 1,20 per 1000 kelahiran hidup yang bermakna setiap kelahiran 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali kurun waktu 2018-2022 angka kematian bayi cenderung konstan dengan angka terbesar terjadi pada Tahun 2020 mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia sebelum usia 1 Tahun, hingga ditahun 2022 sebesar 0,61 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang artinya masih terdapat 1 bayi meninggal setiap 1000 kelahiran. Walaupun per 1000 kelahiran jumlah yang meninggal konstan yaitu 1 jiwa.

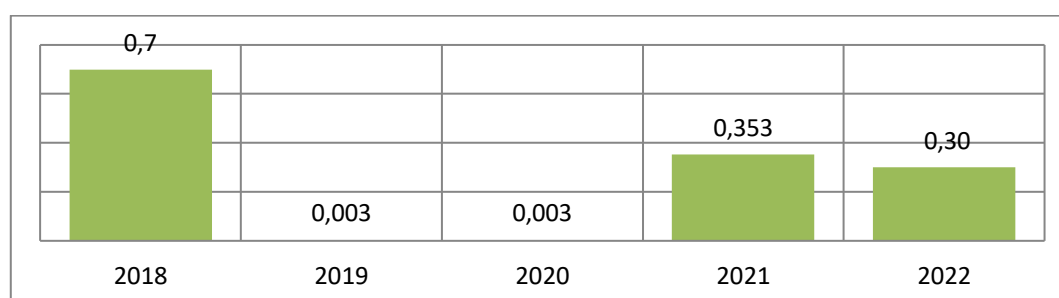
Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu Tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah *maternal death* – atau kematian ibu, yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal*

mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75 persen dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014). Data Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.22 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2022, data diolah

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Kurun waktu 2018-2022, angka kematian ibu di Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan capaian terburuk Tahun 2018 dengan 0,70 dengan jumlah kejadian kematian ibu per 100.000 kelahiran. Pada Tahun 2019 angka kematian ibu di Kabupaten Morowali 0,003 per 100.000 kelahiran hidup yang bermakna setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali terjadi peristiwa kematian ibu sebanyak 1 kematian ibu. Tahun 2022 angka kematian ibu adalah 0,30, yang artinya tidak ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali. Makin rendah nilai indikator ini, maka merupakan gambaran awal cukup baiknya pelayanan kesehatan bagi ibu baik yang sedang hamil ataupun pasca melahirkan.

- **Safe Motherhood Initiative dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)**

Tingginya angka kasus kematian ibu sebenarnya bukanlah masalah yang terbilang baru. Upaya penanganan kasus kematian ibu merupakan diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak abad ke 17. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Death in Childbed from the Eighteenth Century to 1935*," Loudon menjelaskan bahwa catatan-catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul pada awal abad ke-17, seiring dengan berkembangnya praktik kebidanan di masyarakat



Inggris (Loudon, 1986). Tetapi, komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian ibu agaknya baru hadir di akhir abad ke-20. Pada Tahun 1987, kekhawatiran terkait dampak dari tingginya kasus kematian ibu mendorong WHO dan organisasi-organisasi internasional lain untuk melahirkan *The Safe Motherhood Initiative* (Women & Children First, 2015).

Konsep *safe motherhood* sendiri mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *prenatal*, *delivery*, dan *postpartum* yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan (USAID, 2005). Mengacu pada modul yang disusun oleh *The Health Policy Project* (2003), konsep *safe motherhood* sendiri memiliki enam pilar utama.

C. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk adalah jumlah seluruh puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1000 penduduk. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan. Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit. Gambaran Tentang Rasio Puskesmas, Rasio Pustu dan Rasio Poskesdes di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.24 sebagai berikut.

Tabel 2.24
Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas	9	9	11	13	13
Poliklinik	1	5	4	8	8
Pustu	30	30	26	24	24
Jumlah Faskes	40	44	41	45	45
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,335	0,363	0,254	0,268	0,255
<i>Rasio Puskesmas</i>	<i>0,075</i>	<i>0,074</i>	<i>0,068</i>	<i>0,077</i>	<i>0,074</i>
<i>Rasio Poliklinik</i>	<i>0,008</i>	<i>0,041</i>	<i>0,025</i>	<i>0,048</i>	<i>0,045</i>



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Rasio Pustu</i>	0,251	0,247	0,161	0,143	0,136

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.24 di atas diketahui bahwa rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Morowali semakin membaik, Rasio Puskesmas, Poliklinik Rasio Pustu Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebesar 0,335, dan hingga Tahun 2022 menjadi 0,255. Selanjutnya untuk puskesmas pada Tahun 2022 rasionya sebesar 0,074. Sementara itu, ketersediaan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2022 sebesar 0,136 lebih baik dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Rasio Poliklinik terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali di Tahun 2022 sebesar 0,045 meningkat dari Tahun sebelumnya. Rasio yang semakin baik tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Morowali dalam pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat.

D. Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Capaian indikator ini disajikan pada Tabel 2.25 sebagai berikut ini.

Tabel 2.25
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	3
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,017	0,016	0,012	0,012	0,017

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Periode 2018-2022 jumlah rumah sakit di Kabupaten Morowali mengalami penambahan dengan rasio terhadap penduduk 0,017 ditahun 2018 dan untuk Tahun 2022 jumlah rumah sakit bertambah 1 sehingga rasio terhadap penduduk meningkat menjadi 0,017.



E. Rasio dokter per satuan penduduk

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dokter yang dimaksud di sini adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis, tetapi tidak termasuk dokter hewan. Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan dokter terhadap penduduk suatu daerah. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana kondisi idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Semakin banyak tenaga dokter yang tersedia dapat mengindikasikan layanan pengobatan semakin mudah dipenuhi. Rasio dokter per 10000 penduduk menurut standar pelayanan minimal adalah 40 persen dari 10000 penduduk. Data Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	38	73	64	85	77
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	0,319	0,602	0,396	0,506	0,437

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Standar Kementerian Kesehatan, yaitu sebanyak 26 dokter per 100.000 penduduk atau 0,26. Berdasarkan hasil perhitungan kurun waktu 2018-2022, rasio dokter di Kabupaten Morowali melampaui standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Dimana Tahun 2022 sudah mencapai sebesar 0,437 meningkat dari Tahun 2018 sebesar 0,319. Kondisi tersebut masih di atas standar yang ditetapkan kementerian Kesehatan sebesar 0,26 per 100.000 penduduk. Namun, yang perlu menjadi perhatian terkait distribusi dokter di seluruh kecamatan, atau hanya berada di wilayah tertentu saja (perkotaan). Kegunaan dari perhitungan rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat juga diinterpretasikan sebagai semakin tinggi kemampuan daerah



tersebut dalam menyelenggarakan layanan kesehatan dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi.

F. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1000 pddk)

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Dari sisi lain, rasio ini juga merupakan indikasi ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Data Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.27 sebagai berikut.

Tabel 2.27
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Perawat	188	173	220	228	432
Bidan	310	300	334	373	455
Medis	16	14	14	17	59
Farmasi	26	23	40	41	80
Kes. Lainnya	77	74	71	84	25
Total Tenaga Kesehatan	617	584	679	743	1051
Jumlah Penduduk	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Rasio	5,17	4,81	4,20	4,42	5,96

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas, jumlah Tenaga kesehatan pada Tahun 2018 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari Tahun 2018 rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebesar 5,17, meningkat hingga Tahun 2022 menjadi 5,96. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Morowali. Pada sisi lain, rasio kebutuhan tenaga kesehatan harus sesuai dengan target nasional di Kabupaten Morowali. Upaya kesehatan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan mencanangkan program Pencegahan Komplikasi Persalinan dan Kelas Ibu Hamil.



Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap kesehatan, dan makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan).

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan oleh tenaga kesehatan yang profesional seperti tenaga dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya adalah hal yang penting di lakukan. Diharapkan persalinan oleh tenaga kebidanan akan mengurangi resiko melahirkan pada ibu dan anak. Gambaran cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Morowali mayoritas telah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Data Cakupan pertolongan persalinan (Persen) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.28 sebagai berikut.

Tabel 2.28
Cakupan pertolongan persalinan (Persen)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter	32,28	40,9	34,35	39,35	44,35
Bidan/Tenaga Medis	62,13	53,2	65,65	60,65	55,65
Dukun	5,59	5,9	0	0	0
Famili Lainnya	0	0	0	0	0
	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

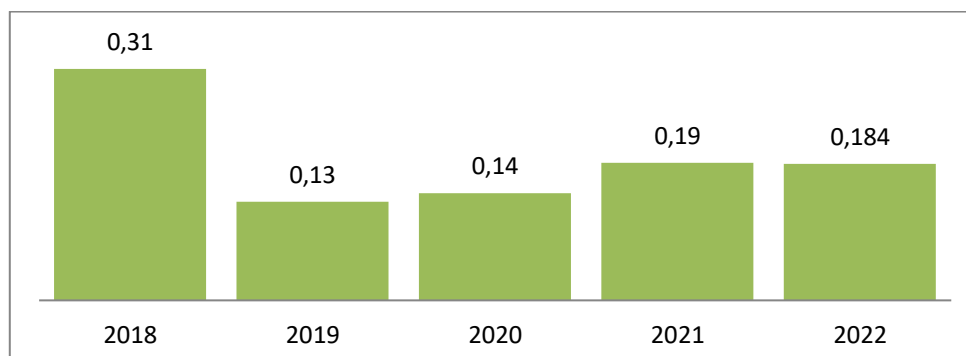
Merujuk pada Tabel 2.28 di atas diketahui bahwa pada Tahun 2022 cakupan persalinan oleh dokter sebesar 44,35 persen, Bidan/Tenaga Medis sebesar 55,65 persen. Hingga Tahun 2022 sudah tidak terdapat persalinan yang masih dilakukan oleh Dukun. Kondisi capaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat semakin membaik.

2.1.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan masih sangat rendah dari total panjang jalan yang ada. Secara keseluruhan tidak mencapai 50 persen dari Tahun 2018-2022. Tahun 2018 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali sebesar 0,31, menurun hingga Tahun 2019 menjadi 0,13, diakibatkan bencana alam yang terjadi berdampak pada banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Tahun tersebut menurun sangat signifikan menjadi 0,133 atau hanya sebesar 13,30 persen dari total panjang jalan yang ada, dan di tahun 2020 sebesar 0,14. Sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,184. Data proporsi Panjang jalan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 2.23 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2022 (diolah)

Gambar 2.23
Proporsi panjang jalan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022



2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi total panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti, setiap 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

Rasio panjang jalan terhadap penduduk pada Tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan kondisi pada Tahun 2018 sebesar 0,0076 dan hingga Tahun 2022 sebesar 0,0054 terdapat pada Tabel 2.29 sebagai berikut ini.

Tabel 2.29
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk (jiwa)	119.292	121.296	161.727	167.910	176.244
Total panjang jalan (km)	902,71	948,72	948,72	948,81	947,34
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,0076	0,0078	0,0059	0,0057	0,0054

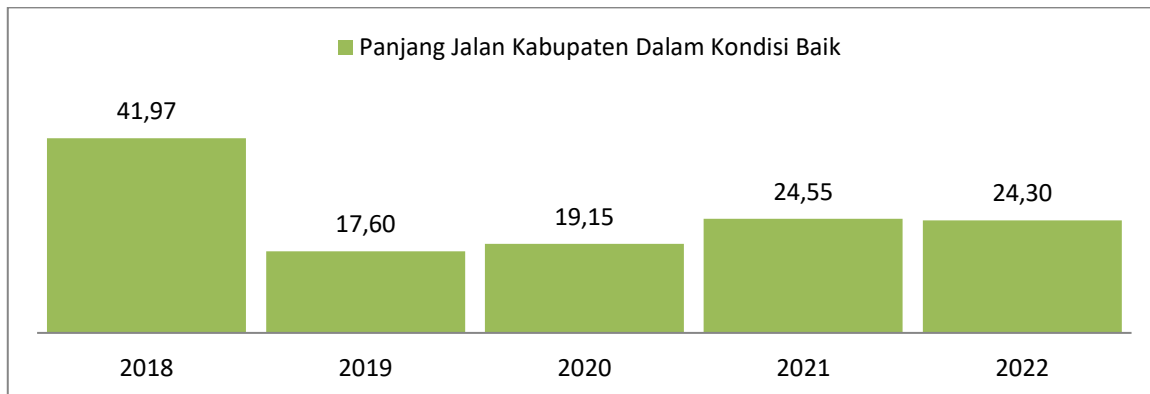
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2022 (diolah)

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan (meliputi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten). Mutu dan kualitas jalan di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap semua aktivitas penduduk di daerah tersebut, khususnya sektor kegiatan perdagangan dan transportasi ke daerah kantong produksi dengan pasar yang lebih besar.

Nilai indikator ini berguna untuk mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jaringan jalan yang ada. Hal ini merupakan indikator dari kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana serta prasana bagi publik. Semakin tinggi nilai indikatornya, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyediakan serta memelihara sarana dan prasarana

publik. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 disajikan pada Gambar 2.24 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

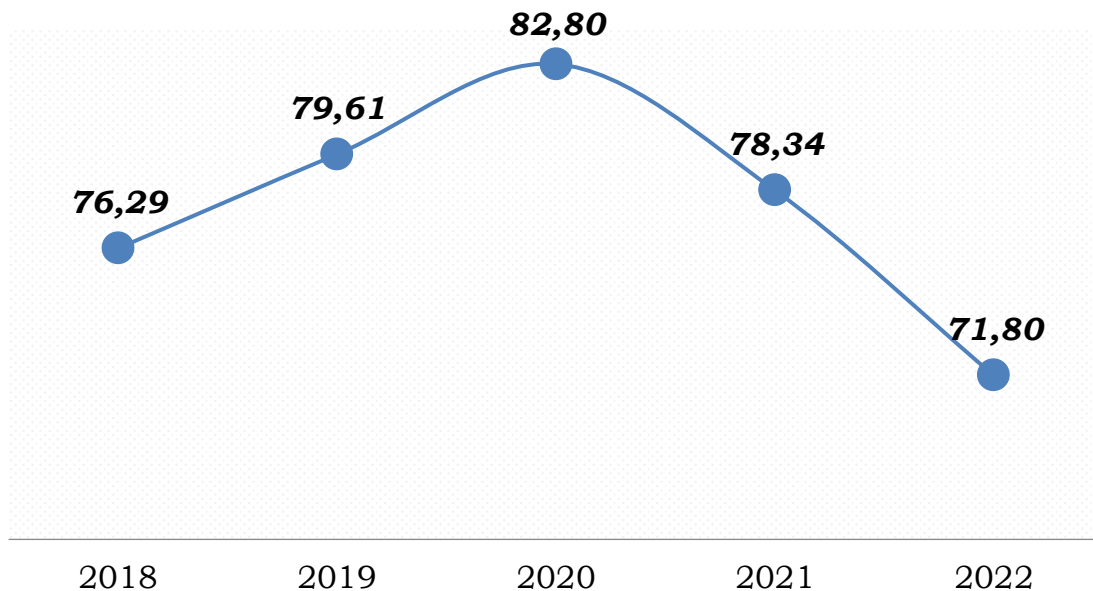
Gambar 2.24
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam), Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Dalam indikator ini, diasumsikan bahwa proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dengan kecepatan ≥ 40 km per jam. Berdasarkan data panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik berada di bawah 50 persen dari total panjang jalan bahkan menurun. Dari 41,97 persen pada Tahun 2018 menurun menjadi 24,30 persen ditahun 2022.

4. Persentase Rumah Tinggal bersanitasi

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Salah satu masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat diperlukan adalah fasilitas sanitasi yang layak. Banyak manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat apabila terdapat pengelolaan sanitiasi yang baik. Salah satunya adalah mengurangi angka masyarakat yang sakit. Dengan sanitasi masyarakat dapat mengurangi terjadinya dan penularan penyakit pada masyarakat sehingga produktivitas masyarakat dapat lebih maksimal dan kerugian yang dihasilkan menurun. Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Tahun 2018 menjadi 76,29 persen. Pada Tahun 2018-2020 meningkat setiap Tahunnya

hingga Tahun 2019 menjadi 79,61 persen, dan ditahun 2020 meningkat menjadi 82,80 persen. Namun dalam 2 tahun terakhir menurun hingga 71,80 persen di tahun 2022. Data Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Gambar 2.25 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

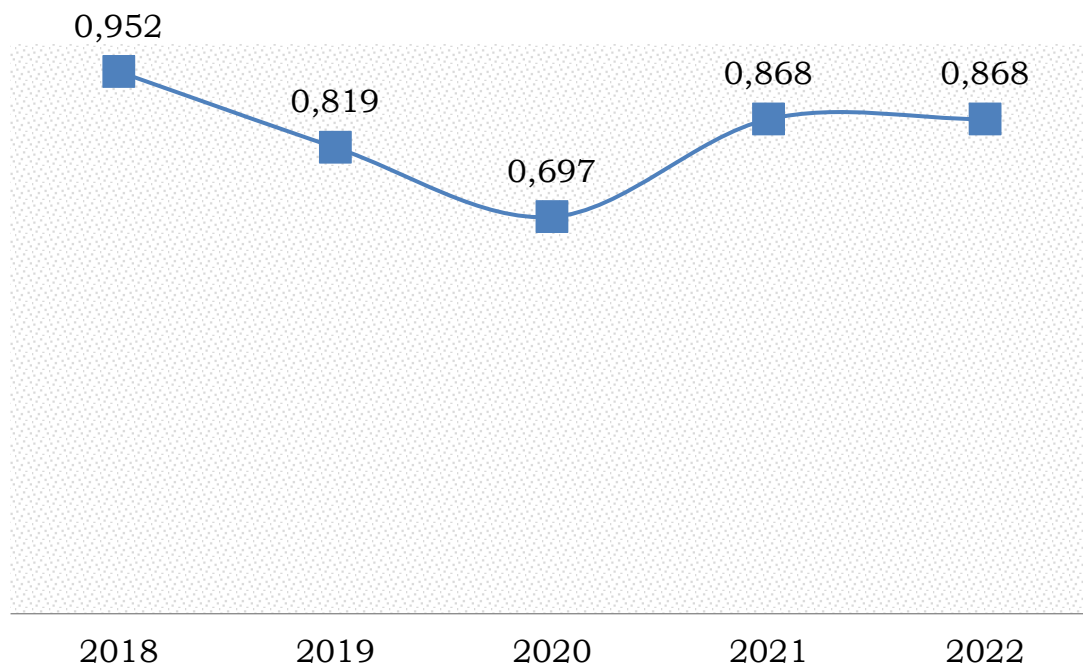
Gambar 2.25
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

5. Rasio Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan penggunaannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Upaya pemeliharaan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik Melalui pemeliharaan jaringan irigasi diharapkan kondisi jaringan irigasi dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya dan/atau dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya sama seperti sebelum terjadi kerusakan.

Rasio jaringan irigasi merupakan kondisi keberadaan jaringan irigasi yang berada dan mengairi lahan usahatani penduduk. Rasio jaringan irigasi diperoleh dari perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi pada periode Tahun 2018-2022 berkembang fluktuatif, Hal ini di tunjukan pada Tahun 2018 sebesar 0,952, kemudian tahun 2019 menurun

sebesar (0,819), dan ditahun 2020 sebesar 0,679. Selanjutnya meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,868, secara lengkap yang disajikan pada Gambar 2.26 sebagai berikut.

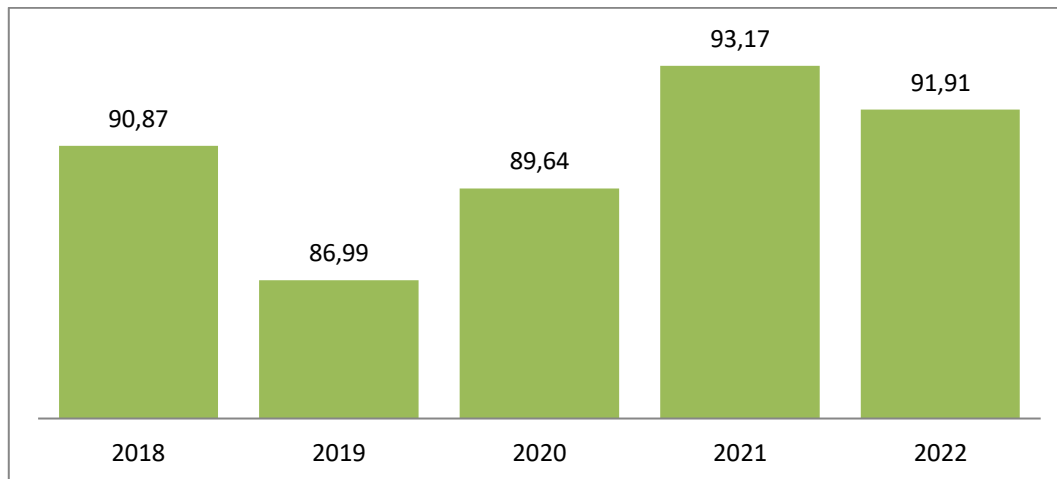


Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.26
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk yang berakses air minum diperoleh dari hasil pembagian antara banyaknya penduduk yang berakses air minum dengan jumlah total penduduk di daerah tersebut dikalikan 100. Berdasarkan data yang diperoleh dari gambar di bawah ini, persentase penduduk berakses air minum dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 90,87 persen pada Tahun 2018 menjadi 91,91 persen pada Tahun 2022. Capaian setiap Tahun yakni, Tahun 2018 (90,87 persen), 2019 (86,99). Tahun 2020 (89,64) dan ditahun 2021 sebesar (93,17). Hal ini mengindikasikan bahwa akses penduduk untuk mendapatkan air minum yang layak mengalami peningkatan. Data Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.27 sebagai berikut.

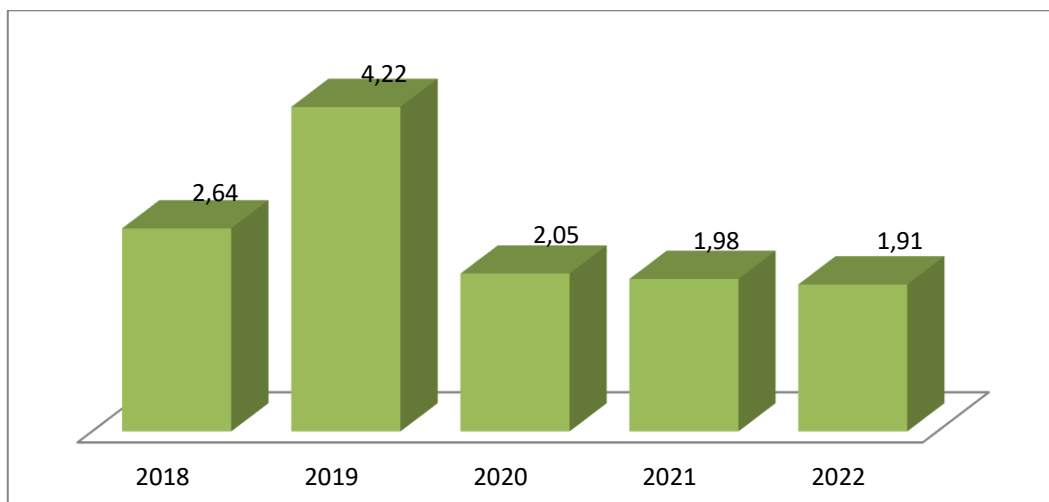


Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.27
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2018–2022

7. Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan dijamin oleh negara, karena beribadah merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah merupakan hak asasi dasar manusia yang harus difasilitasi pemerintah untuk dapat dilaksanakan setiap pemeluk agama. Pemerintah wajib menyediakan sarana beribadah bagi warga, sehingga dapat menjalankan kewajiban beribadah. Data Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.28 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

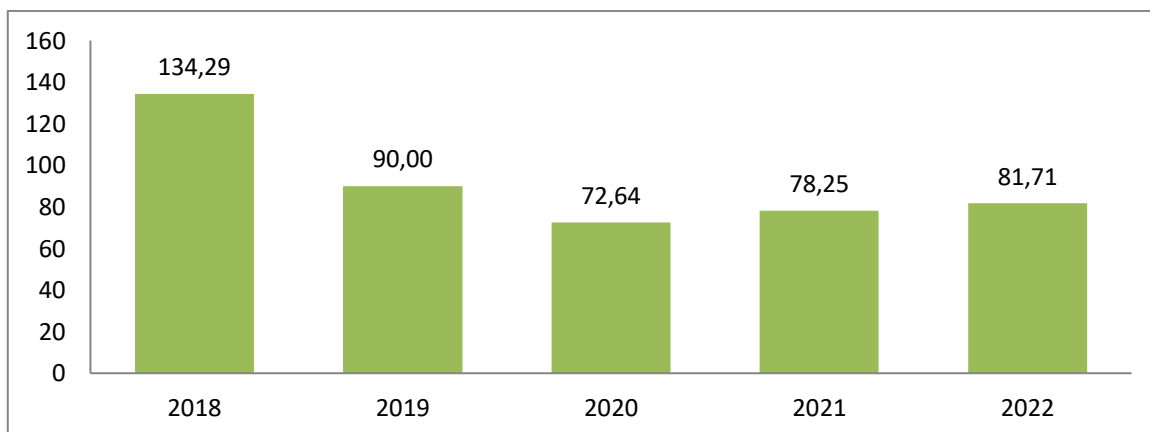
Gambar 2.28
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Morowali hingga Tahun 2018 mencapai 2,64, meningkat tahun 2019 sebesar 4,22, menurun ditahun 2020 sebesar 2,05. Kemudian menurun ditahun 2022 sebesar 1,91 per 1.000 penduduk. Angka ini semakin kecil, menunjukkan bahwa masih kurangnya tempat ibadah dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap Tahunnya.

2.1.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman

A. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rumah sederhana sehat, yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup. Data Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.29 sebagai berikut.



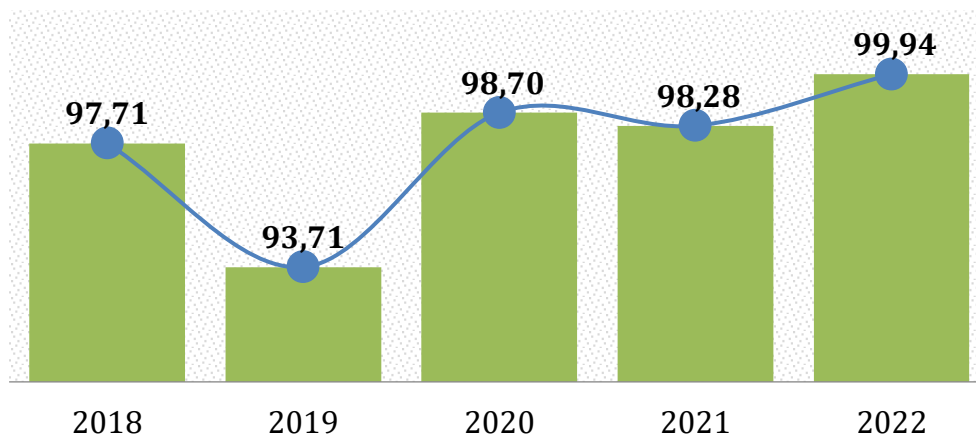
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, data diolah, SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Gambar 2.29
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi penduduk di abupaten Morowali pada kurun waktu 2018-2022. Hal ini diperlihatkan oleh semakin meningkatnya rasio rumah layak huni dengan jumlah penduduk yang menempati. Kemudian pada Tahun 2018-2022 telah mengalami peningkatan yang drastis.

B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Selama periode 2018-2022, pada Tahun 2018, proporsi rumah tangga pengguna listrik mencapai 97,71, namun menurun di Tahun 2019 menjadi 93,71 persen dan ditahun 2020 sebesar 98,70 persen, ditahun 2021 sebesar 98,28 persen, dan meningkat ditahun 2022 menjadi 99,94 persen. Artinya hanya tersisa 0,06 persen penduduk Kabupaten Morowali yang belum dapat mengakses listrik, data terkait terdapat pada Gambar 2.30 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.30
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Ketersediaan Energi Listrik menjadi tantangan pembangunan wilayah di Kabupaten Morowali utama di wilayah pesisir kepulauan dan terpencil seperti di Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan karena menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kepulauan. Di samping itu, adanya energi listrik sangat menunjang layanan publik terutama bila Rumah Sakit Pratama di Pulau Paku beroperasi menjadi satu-satunya rumah sakit yang melayani masyarakat kepulauan di luar Puskesmas Kaleroang dan Menui Kepulauan. Selanjutnya, menunjukan Kecamatan dengan rasio elektrifikasi terendah Bungku Pesisir sebesar 92,80 persen, dan Kecamatan Bumi Raya sebesar 96,32 persen. Rasio elektrifikasi setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.30 sebagai berikut ini.



Tabel 2.30
Rasio Elektrifikasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH KELUARGA			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			
			BERLISTRIK		BELUM BERLISTRIK	PLN	NON PLN	BELUM BERLISTRIK	TOTAL RASIO ELEKTRIFIKASI
			PLN	NON PLN					
1	MENUI KEPULAUAN	4.540	2.303	2.215	22	50,73	48,79	0,48	99,52
2	BUNGKU SELATAN	4.441	1.645	2.643	153	37,04	59,51	3,45	96,55
3	BAHODOPI	19.297	19.057	0	240	98,76	0	1,24	98,76
4	BUNGKU PESISIR	2.222	1.596	466	160	71,83	20,97	7,2	92,8
5	BUNGKU TENGAH	10.818	10.516	195	107	97,21	1,8	0,99	99,01
6	BUNGKU TIMUR	4.381	4.376	0	5	99,89	0	0,11	99,89
7	BUNGKU BARAT	4.927	4.639	181	107	94,15	3,67	2,17	97,83
8	BUMI RAYA	5.031	4.846	0	185	96,32	0	3,68	96,32
9	WITA PONDA	7.155	6.961	25	169	97,29	0,35	2,36	97,64
TOTAL		62.812	55.939	5.725	1.148	89,06	9,11	1,83	98,17

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2018-2022, daya listrik terpasang dari 28.898.000,00 watt di Tahun 2019. Dan pada Tahun 2020 daya terpasang mencapai 43.966.450,00, kemudian di tahun 2021 sebesar 43.966.450,00 kilo watt, dan di tahun 2022 mencapai 43.968.432 kilo watt yang tersaji pada Tabel 2.98 sebagai berikut.

Tabel 2.31
Daya Terpasang Listrik (kw) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Daya Terpasang (Kwh)	-	28.898.000,00	43.966.450,00	43.966.450,00	43.968.432,00

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)



2.1.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Terdapat 9 (Sembilan) indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang sosial. Namun, karena ketidaktersediaan data, dokumen P-RPJMD ini hanya memaparkan 6 (enam) indikator yang disajikan pada Tabel 2.32 sebagai berikut ini.

Tabel 2.32
Indikator Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada Tahun 2018- 2022 di Kabupaten Morowali

No	Indikator Capaian Urusan Sosial	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	48.887	47.091	50.330	50.680	51.030
2.	Persentase PMKS yang tertangani	68,99	68,99	99	107,67	116,34
3.	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	1	1
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100
5.	Korban bencana bencana alam (Jiwa/KK)	0	2.706	136	NA	NA
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,8	2,4	8	0	0

Sumber: EKPD Dinas Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.32 di atas ditunjukkan bahwa secara umum terdapat peningkatan realisasi pembangunan dalam bidang sosial, dan ada beberapa indikator yang belum diidentifikasi oleh OPD. Dalam hal indikator.



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan persentase PMKS yang tertangani, dan juga penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia menunjukkan peningkatan jumlah orang yang memperoleh bantuan (jaminan) sosial dari pemerintah daerah. Demikian pula dengan adanya kejadian bencana pada Tahun 2018-2022, seluruh korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

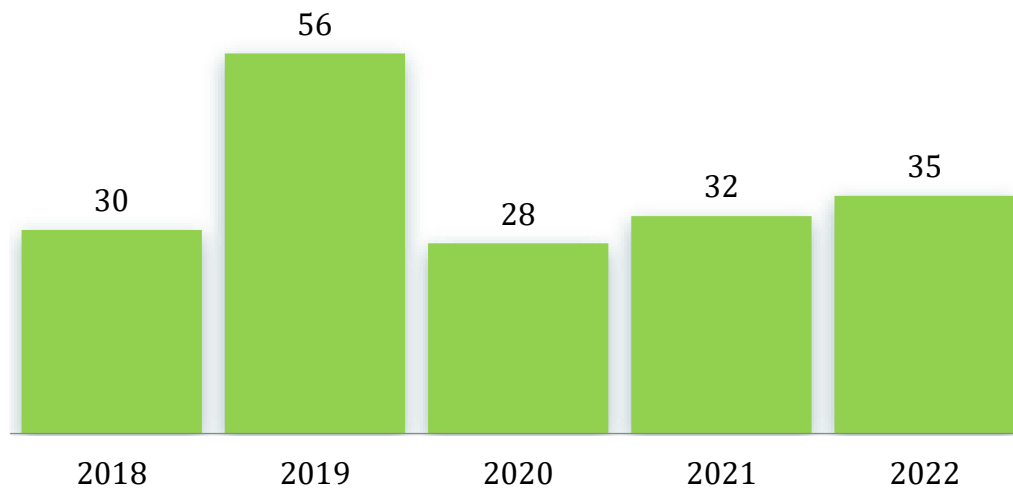
Terkait urusan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, terdapat dua belas indikator yang dapat diukur dalam menilai keberhasilan pembangunan selama lima Tahun terakhir. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli). Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Adapun beberapa indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sebagai daerah industri besar di Provinsi Sulawesi Tengah, sering



terjadi sengketa pengusaha dan pekerja setiap Tahunnya di Kabupaten Morowali. Angka sengketa pengusaha-pekerja cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah sengketa yang ada Tahun 2018 hanya sebanyak 30 sengketa hingga Tahun 2022 meningkat menjadi 35 sengketa. Sengketa terbanyak terjadi di Tahun 2019 yaitu 56 sengketa. Data Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang) Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.31 Sebagai berikut.

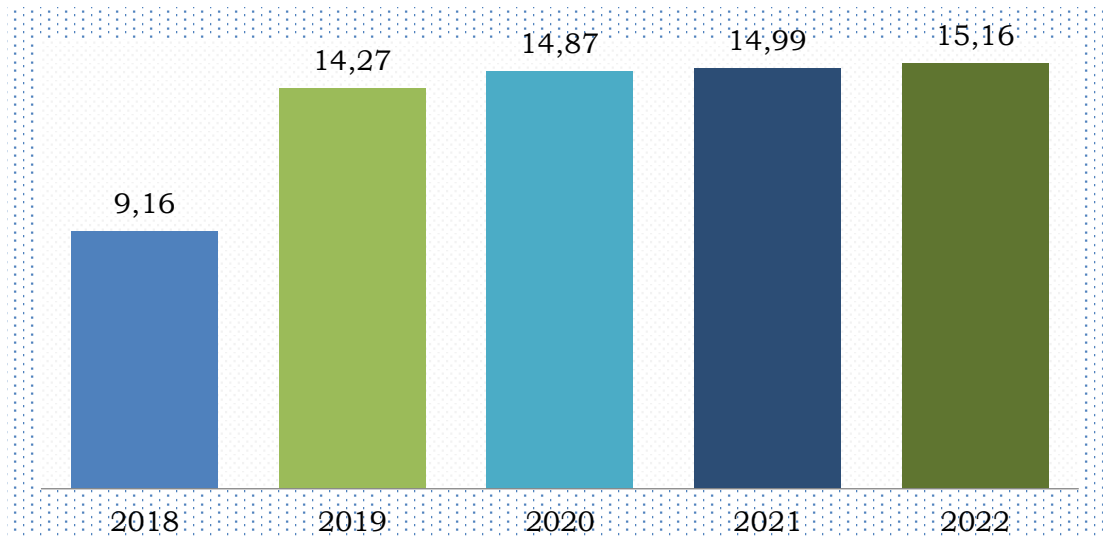


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.31
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang)
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1, S2 dan S3 Tahun 2018 sebesar 9,92 persen, menurun di Tahun 2019 sebesar 9,16 persen, tahun 2020 sebesar 14,27 persen. Sampai dengan tahun 2022 rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebesar 15,16 persen. Data Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 yang disajikan pada Gambar 2.32 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Morowali Tahun 2019-2023 (diolah)

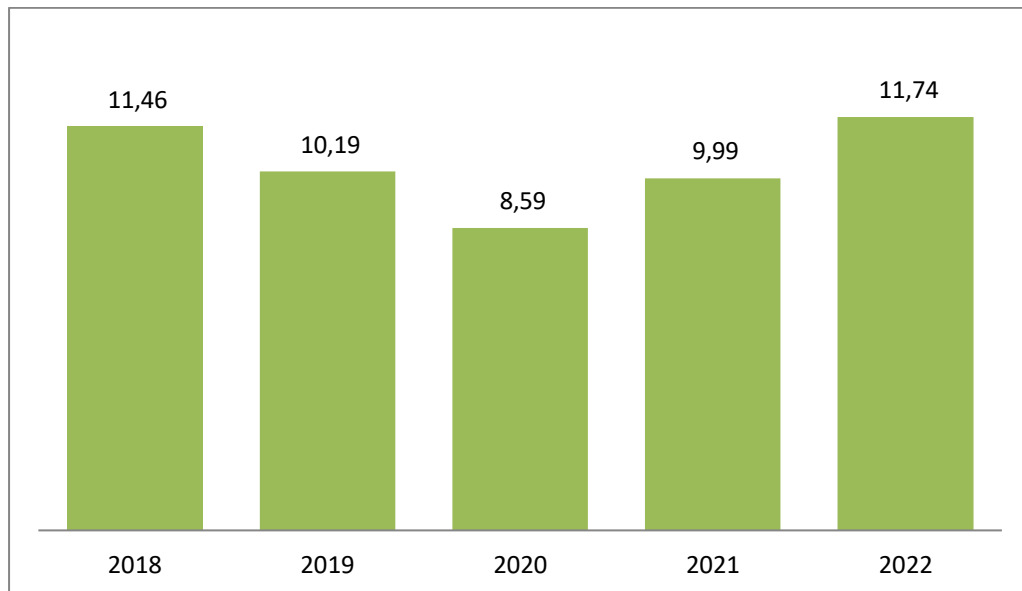
Gambar 2.32
Rasio Iulusan S1/S2/S3
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2.3.2.1. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terdapat 19 indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah. Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Morowali yang bekerja pada lembaga pemerintah dari Tahun 2018-2022 tidak terjadi perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dari Tahun 2018 sebesar 11,46 persen, menurun Tahun 2019 sebesar 10,19 persen, ditahun 2020 sebesar 8,59 persen. Kemudian meningkat ditahun 2021 menjadi 9,99 persen, dan ditahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 11,74 persen. Data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat pada Gambar 2.33 Sebagai berikut.

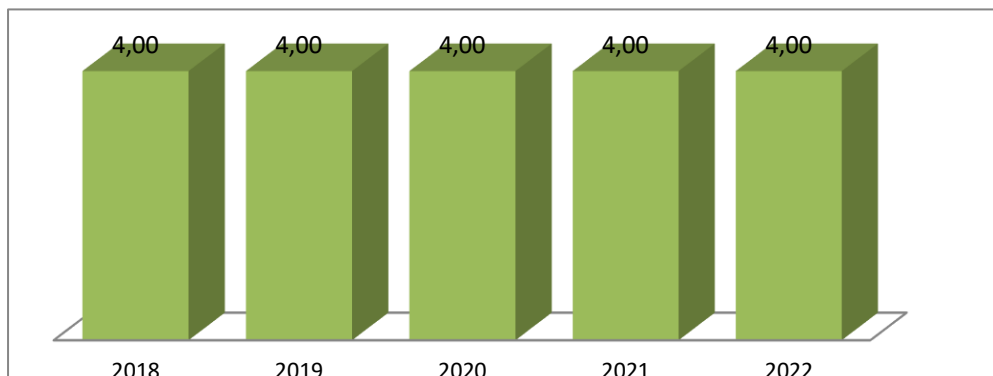


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.33
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tentang Kuota perempuan sebesar 30 persen dalam menduduki kursi DPRD. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan *affirmative action* keterwakilan perempuan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Morowali di periode 2014-2019 sebanyak 4 orang atau sebesar 16 persen, namun di Priode Tahun 2019-2024 hanya terdapat 1 anggota dewan perempuan atau sebesar 4 persen. Namun dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Morowali di Pemilu Tahun 2019 sebesar 30 persen atau sesuai aturan KPU. Data Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 yang tersaji pada Gambar 2.34 sebagai berikut.

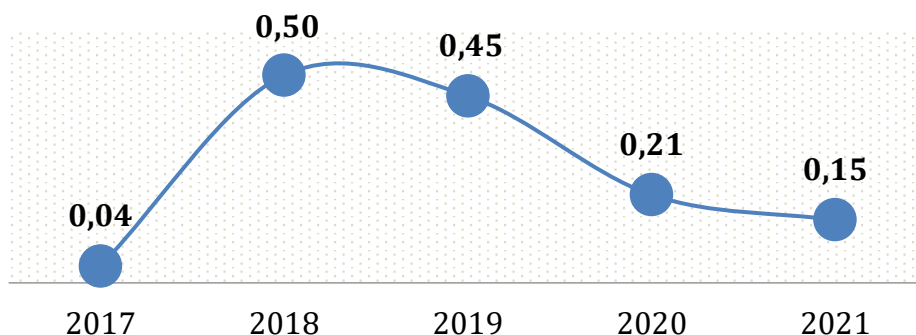


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.34
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

3. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Morowali perkembangannya berfluk-tuatif. Tahun 2018 rasio KDRT sebesar 0,04, dan hingga Tahun 2019 sebesar 0,45 persen, menurun dua tahun terakhir menjadi 0,15 ditahun 2022. Data Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Gambar 2.35 sebagai berikut.

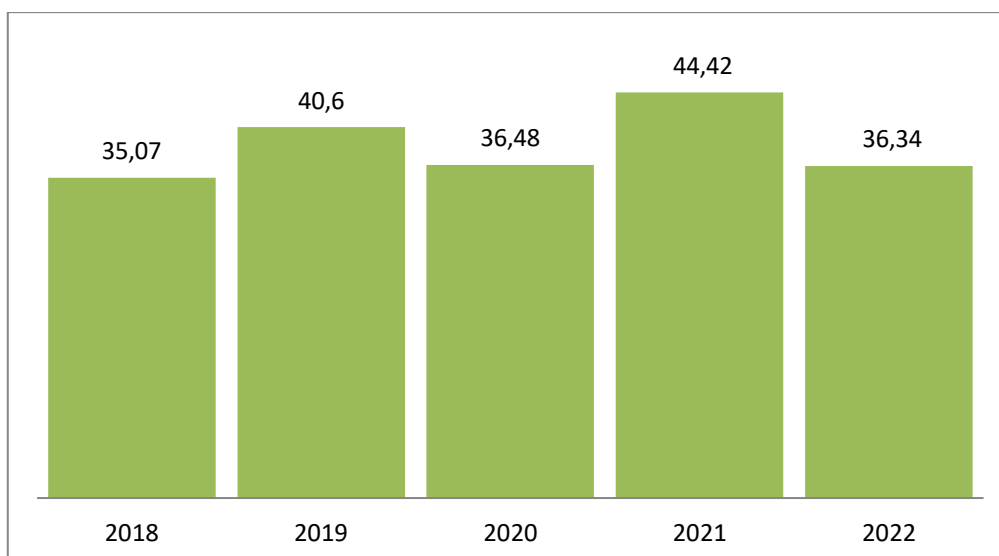


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2020 (diolah)
 BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2021-2022 (diolah)

Gambar 2.35
Rasio KDRT Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

4. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Perempuan terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 Tahun ke atas TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 sebesar 35,07 persen, meningkat Tahun 2019 sebesar 40,60 persen, namun menurun ditahun 2020 sebesar 36,48 persen, kembali meningkat pada tahun 2021, dan menurun ditahun 2022 sebesar 36,34 persen. Data terkait terdapat pada Gambar 2.36 sebagai berikut ini.

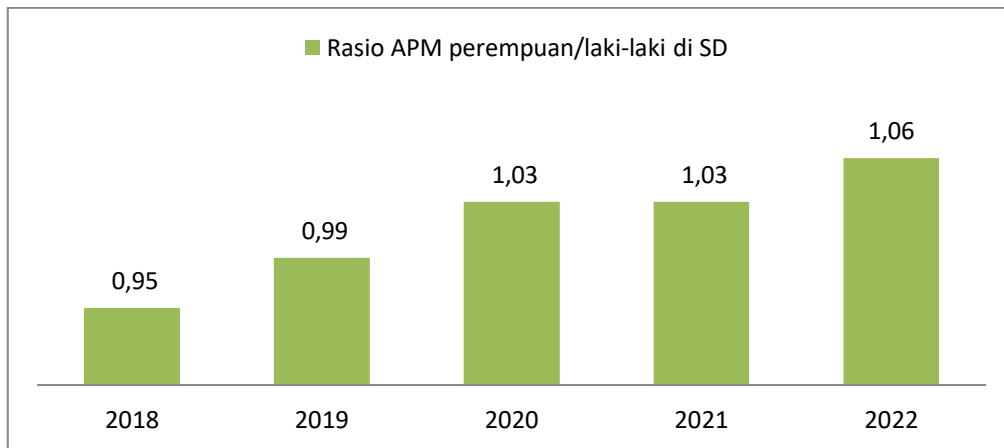


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.36
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2022

5. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun menunjukkan peningkatan, Tahun 2018 sebesar 0,95 meningkat di Tahun 2019 menjadi 0,99 dan ditahun 2020 sebesar 1,03, tahun 2021 1,03, dan ditahun 2022 meningkat menjadi 1,06 Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersajikan pada Gambar 2.37 sebagai berikut.

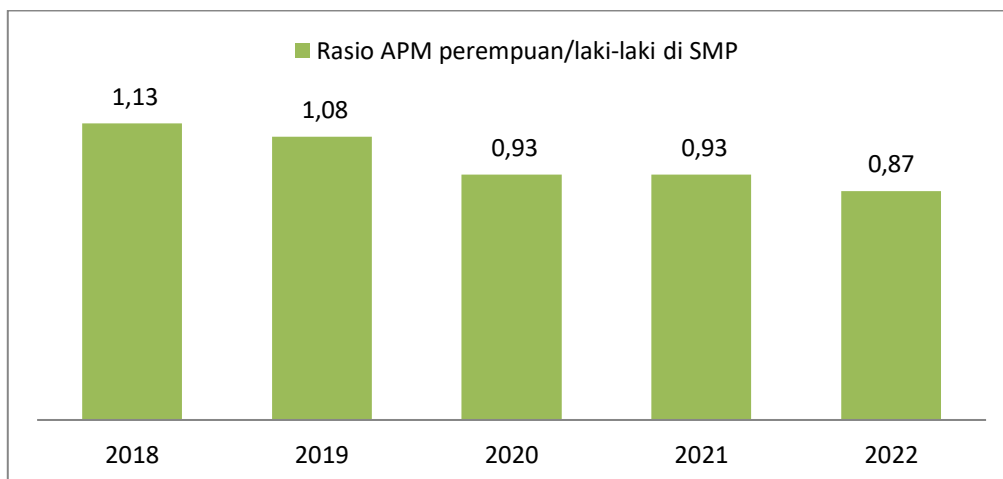


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.37
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

6. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun di atas 1 yang menunjukkan bahwa perempuan yang bersekolah pada umurnya lebih besar dibanding dengan laki-laki, hal ini ditunjukkan Tahun 2018 sebesar 1,13 dan Tahun 2019 sebesar 1,08, dan pada tahun 2020 sebesar 0,93. Sampai tahun 2022 menurun sebesar 0,06 poin menjadi 0,87. Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 tersaji pada Gambar 2.38 sebagai berikut.

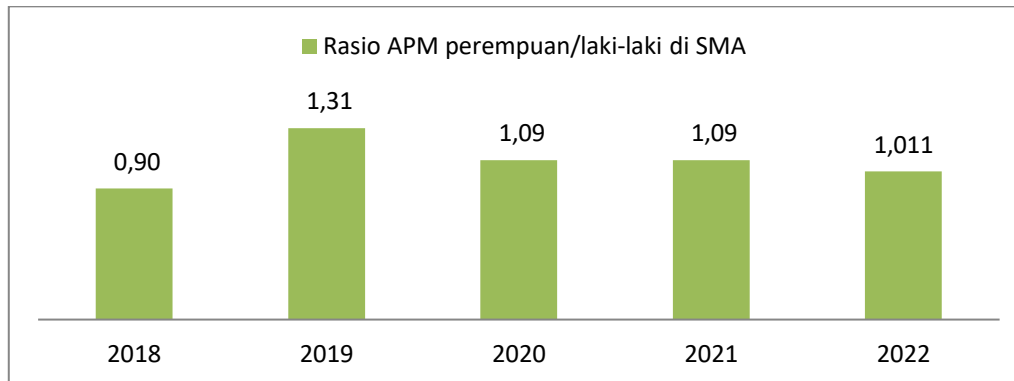


Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.38
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

7. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Selanjutnya untuk Perkembangan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA di Kabupaten Morowali dalam 2 Tahun menunjukkan peningkatan, Tahun 2018 sebesar 0,90 meningkat di Tahun 2019 menjadi 1,31, kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1,09. Tahun 2022 sebesar 1,011. Data Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022 terdapat Gambar 2.39 Sebagai berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.39
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA
Kabupaten Morowali Tahun 2018–2022

2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamandatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Ketersediaan pangan terkait dengan usaha produksi, distribusi dan perdagangan pangan. Ketahanan pangan di tingkat mikro dinilai dari ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein perkapita per hari (Suryana, 2004). Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi dalam penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman tersebut berasal apakah dari tanaman, ternak atau ikan bagi keluarga dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan dalam keluarga dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan (Baliwati dan Rosita, 2004). Urusan pangan dalam penyusunan RPD menyangkut tiga aspek yakni persentase ketersediaan pangan

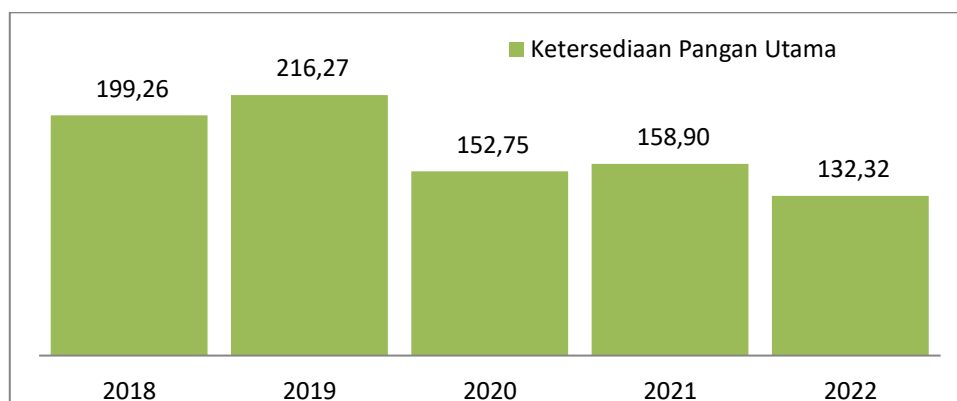


utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Analisis indikator ketersediaan pangan utama dilakukan dengan membandingkan ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk Kabupaten Morowali.

Ketersediaan pangan utama berdasarkan produksi dan konsumsi pangan utama, secara umum Kabupaten Morowali memiliki cadangan pangan setara beras yang cukup besar setiap Tahunnya. Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya yakni di Tahun 2018 sebesar 199,26 hingga Tahun 2022 menjadi 132,32 menurun dari tahun sebelumnya yang terdapat pada Gambar 2.40 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.40
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022



b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/ hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Hasil perhitungan ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.34 sebagai berikut.

Tabel 2.34
Ketersediaan Energi (Kkal) dan Protein (gr) per Kapita
di Kabupaten Morowali Selama Tahun 2018-2022

No	Ketersediaan Energi dan Protein	2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi (Kkal)	3.468	3.071	3.071	3.947	4.014
2	Protein (gr)	42,51	86,19	73,80	83,80	82,13

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2022 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.34 di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketersediaan energi per kapita per hari selama 5 Tahun terakhir mengalami penurunan hingga Tahun 2022 sebesar 4.014 Kkal, sebaliknya ketersediaan protein perhari mengalami peningkatan hingga Tahun 82,13 sebesar 86,19 gr.

2.1.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

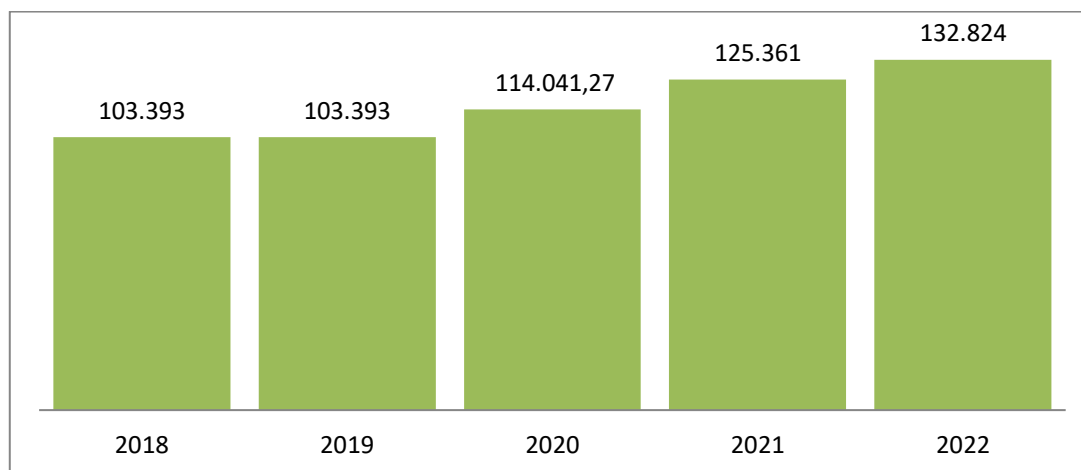
Indikator pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dievaluasi pencapaiannya adalah Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan KTP dan Cakupan penerbitan akte kelahiran. Capaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

KTP merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berlaku di Tanah Air. Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuh-kan identitas asli setempat. Yang wajib



memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 Tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 Tahun keatas (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Jumlah penduduk Ber KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebanyak 103.393 orang meningkat sampai Tahun 2020 sebesar 114.041, sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk ber-KTP sebanyak 132.824 orang. Peningkatan kepemilikan KTP selama empat Tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat pentingnya e-KTP yang ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP. Data Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 yang terdapat pada Gambar 2.41 sebagai berikut.

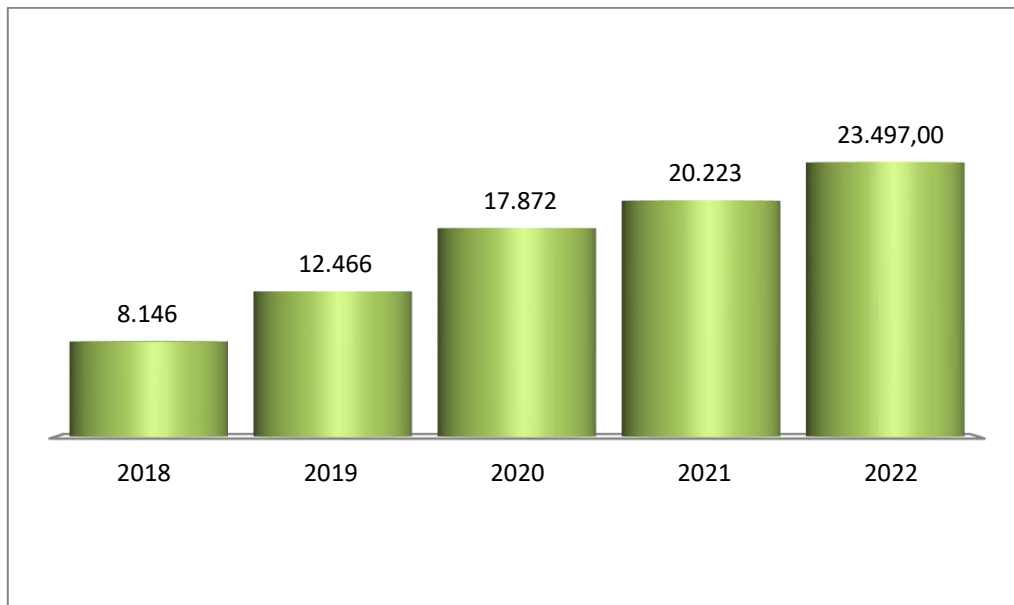


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.41
Jumlah Penduduk Per satuan KTP di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

2. Rasio bayi berakte kelahiran

Akta Kelahiran mempunyai banyak manfaat antara lain: Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang. Jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebanyak 8.146 bayi, kemudian Tahun 2022 sebesar 23.497 bayi terdapat pada Gambar 2.42 sebagai berikut ini.

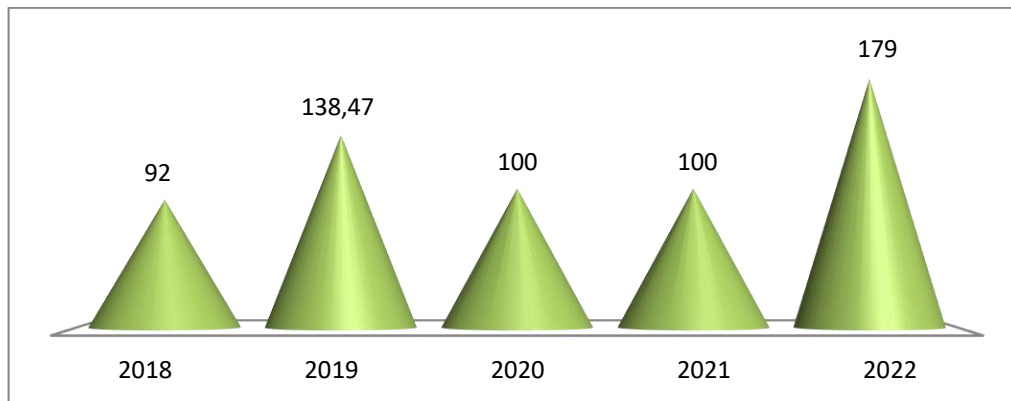


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.42
Jumlah Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

3. Rasio pasangan berakte nikah

setiap pasangan yang menikah harus memiliki akta perkawinan atau buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka. Akta perkawinan atau buku nikah memiliki banyak manfaat, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak dan keluarga mereka. Akta perkawinan atau buku nikah juga merupakan syarat untuk mengurus berbagai dokumen penting lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, paspor, dan lain-lain. Dengan demikian, akta perkawinan atau buku nikah adalah dokumen yang sangat penting bagi pasangan yang menikah dan harus segera dibuat setelah pernikahan dilaksanakan. Saat ini, pemerintah telah mempermudah proses pembuatan akta perkawinan atau buku nikah dengan menghadirkan layanan online yang dapat diakses melalui QR code yang terdapat di buku nikah. Jumlah pasangan berakte nikah di Kabupaten Morowali di Tahun 2018 sebanyak 92 pasangan, 2019 sebanyak 138 pasangan dan Tahun 2020 sebanyak 100 pasangan dan ditahun 2022 sebesar 179 persen, seperti yang terdapat pada Gambar 2.43 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

Gambar 2.43
Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Data base kependudukan di Kabupaten Morowali periode Tahun 2018-2022 telah tersedia ditampilkan pada Tabel 2.35 sebagai berikut ini.

Tabel 2.35
Ketersediaan database kependudukan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP nasional berbasis NIK merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dan diwajibkan untuk diterapkan di seluruh wilayah Rerpublik Indonesia. Data penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.36 berikut ini.

Tabel 2.36
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali, Tahun 2023.

2.1.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Dinas perhubungan Kabupaten Morowali memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk menetapkan arus lalu lintas dan jaringan jalan. Kinerja perhubungan di Kabupaten Morowali dapat dilihat dari kinerja Sub Sektor Angkutan dan Masih relatif kecilnya kontribusi sub sektor angkutan pada PDRB Kabupaten Morowali menunjukkan masih rendahnya tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang terjadi di daerah setempat.

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Data Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Morowali yang tersedia hanya angkutan laut. Dimana jumlah arus penumpang mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 17.000 orang hingga Tahun 2022 sebanyak 18.851 penumpang, seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.37 sebagai berikut ini.

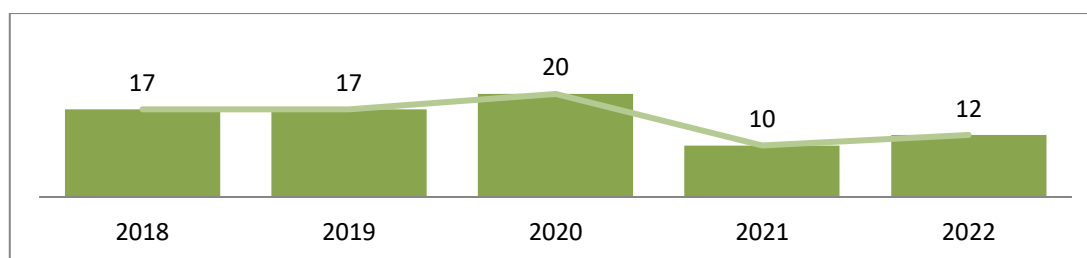
Tabel 2.37
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)	17.000	17.000	17.145	18.241	18.851

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

2. Rasio ijin trayek

Rasio Izin trayek yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018 yakni 17 per 10.000 penduduk. Rasio terus meningkat sampai Tahun 2022 sebanyak 12 per 10.000 penduduk yang terdapat pada Gambar 2.44 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan 2023 (diolah)

Gambar 2.44
Rasio Ijin Trayek
di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022



3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur perhubungan kepada masyarakat secara tidak langsung juga di nilai dari ketersediaan pelabuhan laut, udara dan darat yang miliki. Kabupaten Morowali memiliki masing-masing satu (1) pelabuhan laut, bandara udara, dan terminal Bis. Data mengenai jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang terdapat di kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.38 sebagai berikut.

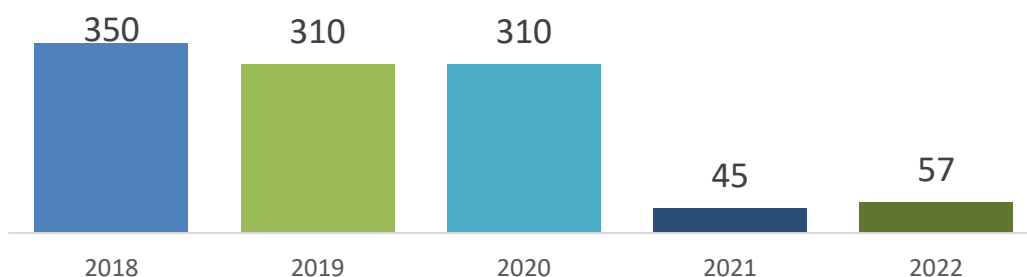
Tabel 2.38
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2023 (diolah)

4. Pemasangan Rambu-rambu

Masih tingginya tingkat kejadian kecelakaan khususnya pada transportasi jalan di Kabupaten Morowali masih menjadi masalah pada urusan perhubungan yang perlu diatas, salah satunya adalah melalui pemasangan rambu-rambu jalan. Rambu-rambu lalu lintas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Pemasangan rambu-rambu merupakan bagian dari fungsi perlengkapan jalan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan. Berikut ini di dapat dilihat mengenai persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Morowali. Hingga Tahun 2022 jumlah pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Morowali sebanyak 57 rambu jalan yang tersaji pada Gambar 2.45 berikut ini.



Sumber: Dinas Perhubungan 2023 (diolah)

Gambar 2.45
Pemasangan Rambu di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022



5. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan. Keterse-diaan sarana jalan memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi serta aktivitas lainnya. Meningkatnya kebutuhan perhubungan atau transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Secara lebih jelasnya Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Morowali, Tahun 2018-2022 terdapat pada Tabel 2.39 sebagai berikut.

Tabel 2.39
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:7	1:7	1:5	1:7	1:9

Sumber: Dinas Perhubungan 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.85 di atas, diketahui bahwa rasio penjang kalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2019 berada pada raiso 1:7, tahun 2020 sebesar 1:5 dan ditahun 2022 sebesar 1:9.

6. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun

Jumlah penumpang turun di Kabupaten Morowali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 8.564 di Tahun 2018 menjadi 9.677 pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penumpang naik juga meningkat sangat signifikan dari 8.419 penumpang di Tahun 2019 menjadi 9.719 Tahun 2022. Selanjutnya untuk jumlah barang yang di bongkar mengalami penurunan dari 197.027 ton di tahun 2018 menjadi 214.034 ton pada tahun 2022. Untuk Jumlah barang muat (ton) sebesar 439.419 ton pada Tahun 2018 meningkat sangat signifikan sebesar 500.409 ton pada Tahun 2022.

Sejak Tahun 2018 bandar udara Morowali beroperasi, dimana Tahun 2018 jumlah penumpang yang datang sebanyak 70.035 orang, menurun pada Tahun 2019 menjadi 32.301 penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat



sebanyak 45.977 orang Tahun 2018, juga menurun di Tahun 2019 sebanyak 33.266 penumpang. Pada Tahun 2019 sebesar 7.340 di Bandara Morowali sebesar 107.487 ton dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 77.498 ton. Selanjutnya pada tahun 2020 arus penumpang dan barang di bandara Udara Morowali tetap meningkat meskipun di tahun pandemic Covid-19, dimana larangan penerbangan, pembatasan jumlah penerbangan dan berbagai macam protokol kesehatan dilakukan. Jumlah penumpang yang datang sebanyak 58.447 orang sedangkan Jumlah Penumpang Berangkat sebanyak 15.247. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penumpang yang datang sebanyak 31.271 dan berangkat sebanyak 21.973 orang.

Kemudian untuk Jumlah Barang Bongkar sampai dengan tahun 2022 sebesar 244.256 (Ton) dan Jumlah barang muat (ton) sebesar 99.202, yang disajikan data pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

Tabel 2.40
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2019	2020
Angkutan Laut						
1	Jumlah Penumpang Turun	8.564	8.726	8.726	9.557	9.677
2	Jumlah Penumpang Naik	NA	8.419	8.419	9.195	9.719
3	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	197.027	200.751	200.751	210.789	214.034
4	Jumlah barang muat (ton)	439.419	447.724	447.724	470.110	500.409
Angkutan Udara						
5	Jumlah Penumpang Datang	70.035	32.301	58.447	31.271	31.271
6	Jumlah Penumpang Berangkat	45.977	33.266	15.247	21.973	21.973
7	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	NA	107.487	122.089	270.442	244.256
8	Jumlah barang muat (ton)	NA	77.498	39.268	100.059	99.202

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)



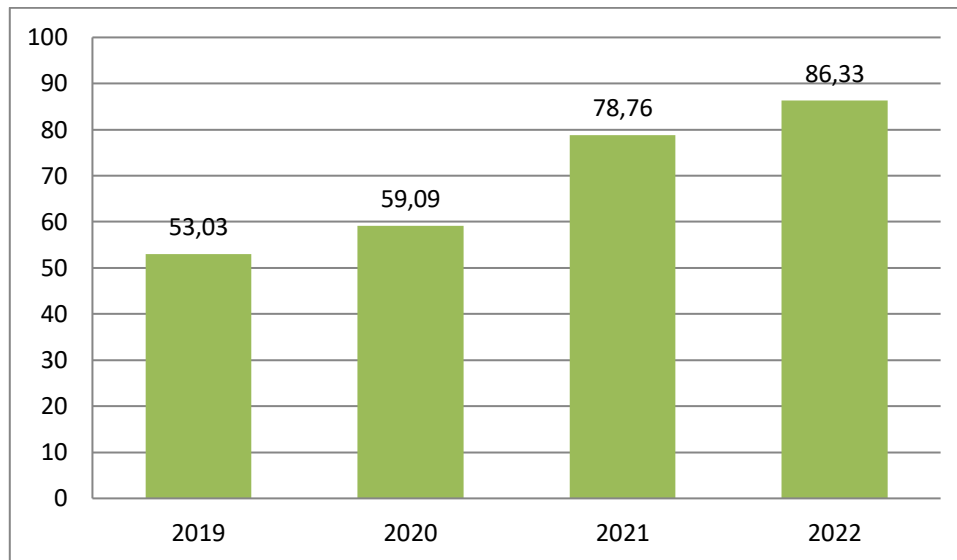
2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain. Karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data dan menyebarkan informasi. Data mengenai kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Morowali dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akses Jaringan Komunikasi

Akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali adalah salah satu faktor yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan akses jaringan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Akses jaringan informasi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Morowali. Selain itu, akses jaringan informasi juga dapat meningkatkan potensi pariwisata, investasi, dan industri di Kabupaten Morowali yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Namun, akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan provider telekomunikasi dan internet, serta bencana alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya akses telepon dan data di beberapa wilayah di Kabupaten Morowali³. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, provider telekomunikasi dan internet, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan informasi di Kabupaten Morowali. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) Tahun 2019-2022 dalam kurun waktu tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 55,03 persen di tahun 2019, meningkat hingga 86,33 persen pada tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Gambar 2.46
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%)
Tahun 2019-2022

2. Data Jaringan Tower

Data jaringan tower di Kabupaten Morowali seluruh telah tersedia di Semua kecamatan di Kabupaten Morowali, namun jenis jaringan masih belum merata 4G. Masih terdapat beberapa tower yang jaringannya masih 2G (hanya bisa menelpon dan mengirim pesan singkat), masih kesulitan untuk jaringan internet, diantaranya Desa Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, Solonsa Jaya Kecamatan Wita Ponda, Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan, Desa Bete-Bete dan Desa Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir terdapat pada Tabel 2.41 sebagai berikut ini.

Tabel 2.41
Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
1	Bahodopi	Fatufia	Ya	-	Ya
2	Bungku Tengah	Ipi	Ya	Ya	Ya
3	Bungku Tengah	Marsaoleh	Ya	Ya	Ya
4	Bumi Raya	Parilangke	Ya	Ya	Ya
5	Wita Ponda	Lantula Jaya	Ya	Ya	Ya
6	Bungku Barat	Wosu	Ya	Ya	Ya
7	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
8	Bumi Raya	Pebatae	Ya	Ya	Ya
9	Wita Ponda	Ungkaya	Ya	Ya	Ya
10	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya



No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
11	Bumi Raya	Limbo Makmur	Ya	Ya	Ya
12	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya
13	Menui Kepulauan	Ulunambo	Ya	-	-
14	Bumi Raya	Samarenda	Ya	-	Ya
15	Bungku Tengah	Lanona	Ya	Ya	Ya
16	Bungku Tengah	Matansala	Ya	Ya	Ya
17	Bungku Tengah	Tofuti	Ya	Ya	Ya
18	Bungku Tengah	Bahomoleo	Ya	Ya	Ya
19	Bungku Timur	Kapala	Ya	-	
20	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
21	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
22	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
23	Bahodopi	Bahomakmur	Ya	Ya	Ya
24	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	
25	Wita Ponda	Solonsa Jaya	Ya	-	
26	Bungku Barat	Tofogaro	Ya	Ya	Ya
27	Bungku Selatan	Kaleroang	Ya	-	
28	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
29	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
30	Bungku Pesisir	Laroenai	Ya	Ya	Ya
31	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
32	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
33	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
34	Bungku Tengah	Bungi	Ya	Ya	Ya
35	Bumi Raya	Umbele	Ya	Ya	Ya
36	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
37	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
38	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
39	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
40	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
41	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
42	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
43	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
44	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
45	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
46	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
47	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
48	Bungku Pesisir	Bete-Bete	Ya	-	
49	Bungku Pesisir	Tangofa	Ya	-	

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, Tahun 2023



3. Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

Data jaringan telekomunikasi terdapat pada Tabel 2.42 berikut ini.

Tabel 2.42
Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali Tahun 2022

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika, Tahun 2023

2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

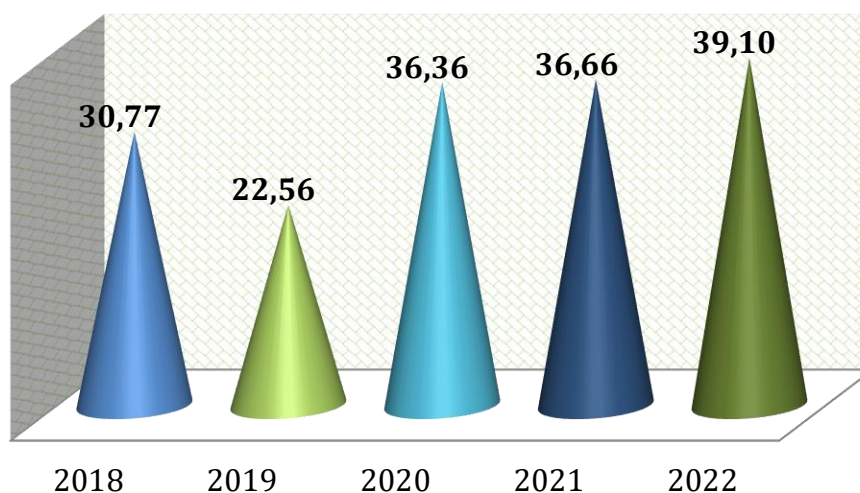
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat.

1. Persentase koperasi aktif

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi rakyat yang memegang peran penting bagi pemberdayaan masyarakat miskin, terutama yang berada di daerah perdesaan. Sebagai satu diantara pelaku ekonomi, koperasi mempunyai kedudukan yang strategis bagi tatanan perekonomian yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi semestinya bisa



menjadi katup penyelamat masyarakat miskin dari jeratan dan lilitan rentenir/lintah darat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi di Kabupaten Morowali selama periode 2018-2022 dilaksanakan cukup baik namun belum maksimal. Semakin banyak koperasi aktif dalam suatu daerah tentunya akan semakin berkembang perekonomian masyarakat. aktifnya koperasi tersebut akan mendorong terjadi pergerakan dan perkembangan aktivitas atau usaha ekonomi produktif masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah koperasi aktif di Kabupaten Morowali terdapat pada Gambar 2.47 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.47
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

Perkembangan persentase koperasi yang aktif dalam periode Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dari 30,77 persen pada Tahun 2018 menurun hingga Tahun 2019 menjadi 22,56 persen, dan ditahun 2020 sebesar 36,36 persen, sampai dengan tahun 2022 mencapai 39,10 persen. Pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi kedepan perlu ditingkatkan.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Kabupaten Morowali memiliki daerah perairan yang mempunyai potensi perikanan baik perikanan laut dan perikanan darat. Di sepanjang daerah pesisir



Teluk Tolo, mata pencaharian penduduk umumnya nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain menjadi nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. Indikator kinerja pada urusan perikanan dan kelautan di Kabupaten Morowali menyangkut Produksi perikanan (Produksi perikanan laut, Produksi perikanan darat), Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Produksi perikanan kelompok nelayan, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial, dan Nilai tukar nelayan.

a. Produksi Perikanan (ton)

Produksi perikanan di Kabupaten Morowali berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, baik itu di wilayah perairan laut, perairan darat maupun perairan umum. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan pertahun terhadap target daerah. Indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah produksi ikan dengan target produksi ikan daerah. Data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya disajikan pada Tabel 2.43 sebagai berikut ini.

Tabel 2.43
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.126,00	38.573,00	32.203,20	33.309,30	33.420,80
2	Produksi Perikanan Darat (Ton)	27,88	305,00	618,90	2.993,00	2.981,00
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	451,19	20.372,00	18.260,00	58.414,00	2.220,32

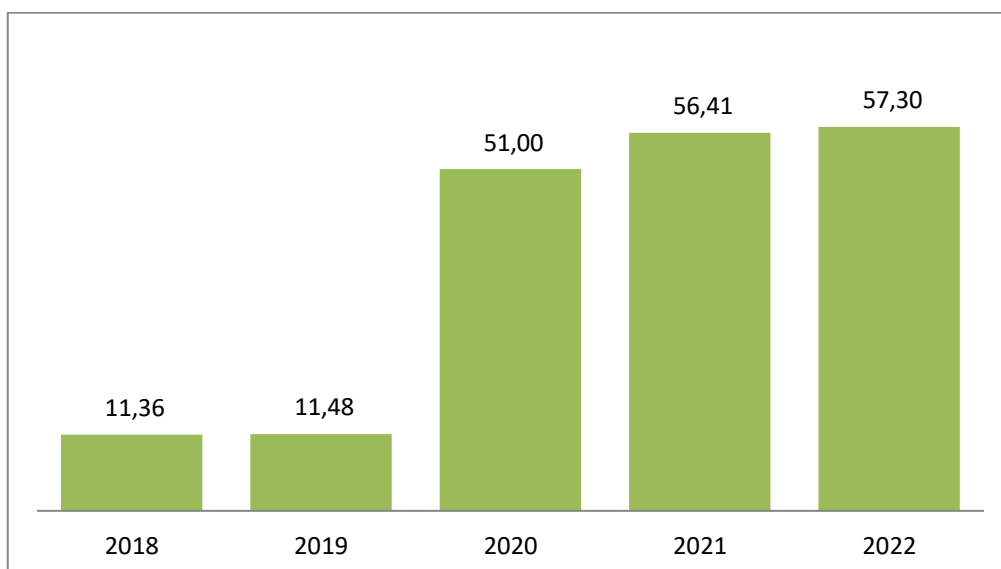
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Produksi perikanan Kabupaten Morowali masih didominasi oleh produksi perikanan laut. Produksinya cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2018-

2022, namun pada perkembangan setiap Tahunnya berfluktuatif, dimana hingga Tahun 2023 untuk produksi perikanan laut sebesar 33.420,80 ton, kemudian untuk produksi perikanan darat sebesar 2.981,00 ton dan untuk produksi perikanan budidaya sebesar 2.220,32 ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan oleh individu guna memenuhi kebutuhan gizi manusia. Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah ikan yang dikonsumsi terhadap target daerah setiap Tahunnya. Berdasarkan perilaku pengeluaran pangan rumahtangga telah menunjukkan pergeseran dari perilaku pangan ikan di dalam rumah ke perilaku pangan ikan di luar rumah. Konsumsi langsung di dalam rumahtangga turut berubah sesuai dengan pertambahan jumlah anggota rumahtangga yang serumah dan pendapatan. Khusus perilaku pangan ikan di luar rumah tangga semakin beragam bentuk dan menu sajiannya, baik yang disediakan oleh hotel, restoran, rumah makan, dan warung tenda. Nilai persentase konsumsi ikan perkapita diperoleh dari rasio konsumsi ikan perkapita dengan target konsumsi ikan perkapita pada RPD Morowali yang disajikan pada Gambar 2.48 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.48
Konsumsi Ikan Perkapita
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa konsumsi ikan perkapita perTahun di Kabupaten Morowali perkembangannya berfluktuatif di Tahun 2018 konsumsi ikan perkapita sebesar 11,36 kg/Tahun, meningkat s/d Tahun 2019 menjadi 11,48 ton/Tahun. Meningkat signifikan Tahun 2020 sebesar 51 ton/Tahun. Meningkat kembali ditahun 2021 sebesar 56,41 ton/tahun dan ditahun 2022 sebesar 57,30 kg/tahun.

c. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial dimaksudkan untuk meningkatkan kelestarian ekosistem sumberdaya perairan melalui peningkatan luas kawasan lindung guna meningkatkan populasi sumberdaya ikan. Rasio kawasan lindung perairan diperoleh dari rasio/perbandingan antara luas kawasan lindung perairan dengan total luas perairan teritorial Kabupaten Morowali yang disajikan pada Tabel 2.44 sebagai berikut ini.

Tabel 2.44
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Tahun 2018-2022 di Kabupaten Morowali

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas 100awas an Lindung (ha)	114.322,01	114.322,01	114.322,01	114.322,01	114.322,01
2	Luas Perairan Teritorial (ha)	2.996.288	2.996.288	2.996.288	2.996.288	2.996.288
	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Perikanan Daerah Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas kawasan lindung terhadap luas teritorial perairan Kabupaten Morowali. Makin kecil nilai perbandingan tersebut makin luas wilayah perairan yang dilindungi. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan pada Tahun 2018 sebesar 0,04 dan Tahun 2020 sebesar 0,04.



2.1.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk memajukan ekonomi di suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengembangan sektor kepari-wisataan antara lain bertujuan untuk: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3) menghapus kemiskinan, dan 4) mengatasi pengangguran.

Kabupaten Morowali memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata bahari sampai dengan wisata budaya yang cukup beragam. Pariwisata di Kabupaten Morowali lebih diarahkan untuk pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Morowali terdapat beberapa jenis obyek wisata bahari seperti pantai pasir putih dan beberapa pulau (Pulau Sombori dan Pulau Koikoila) yang terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan. Kemudian, wisata budaya seperti peninggalan makam Raja Bungku yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah serta Masjid Tua di Kota Bungku dan benteng dekat Kota Bungku. Sedangkan wisata alam seperti air terjun, hutan *mangrove* yang juga terletak di Kecamatan Bungku Tengah.

Pemerintah Kabupaten Morowali saat ini sangat gencar dalam melakukan promosi di bidang pariwisata. Hal ini ditandai dengan banyak dilaksanakannya kegiatan wisata seperti pada Tahun 2015, diadakan acara Festival Bajo Pasakay yang diselenggarakan di Kecamatan Bungku Selatan. Ribuan kapal hias memenuhi dermaga dalam upaya pemecahan rekor MURI untuk rangkaian karnaval perahu terpanjang di Indonesia. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan asli suku Bajo dan sekaligus mempromosikan pariwisata dalam upaya menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

1. Jumlah Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata diyakini akan mempunyai dampak langsung dan positif terhadap peningkatan ekonomi daerah dalam bentuk peningkatan kegiatan berusaha dan peningkatan kesempatan kerja. Perkembangan sektor pariwisata akan dapat membangkitkan berbagai kegiatan usaha: rumah makan (restoran), penginapan (perhotelan), transportasi lokal, dan penyedia cenderamata bagi wisatawan. Seiring dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat di



Kabupaten Morowali, maka diperlukan sarana-prasarana (akomodasi) yang memadai dan berkualitas. Para wisatawan perlu memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, mengingat mereka yang berwisata akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Morowali.

Tabel 2.45
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mancanegara	643	194	34	7	79
2.	Domestik	1.525	4.822	5.461	7.234	3.545
	Total Kunjungan Wisata	2.168	5.016	5.495	7.241	3.624

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.45 di atas ditunjukkan perkembangan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Morowali terus menunjukkan angka angka berfluktuatif, yaitu dari 2.168 orang pada Tahun 2018, dan meningkat terus menjadi 5.016 orang pada Tahun 2019 dan ditahun 2020 juga meningkat sebanyak 5.495 orang. Ditahun 2021, meningkat cukup banyak sebanyak 7.241 orang, dan ditahun 2022 menurun sekitar 50% menjadi 3.624 orang. Dari keseluruhan jumlah wisatawan tersebut sebagian besar berasal dari wisatawan domestik, dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari mancanegara.

2. Lama Kunjungan Wisata

Dampak dari semakin lamanya kunjungan wisatawan, akan menghidupkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Lama kunjungan wisata yang berkunjung di kabupaten Morowali rata-rata dalam 5 Tahun terakhir yakni 3 hari. Untuk meningkatkan lama kunjungan pemerintah daerah perlu mengembangkan destinasi wisata secara menyeluruh (obyek, industri, pemasaran, pertunjukan) agar wisatawan yang berkunjung memiliki alternatif aktivitas wisata yang akan menahan mereka



untuk lebih lama berkunjung di Kabupaten Morowali. Data Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.46 sebagai berikut.

Tabel 2.46
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata (Hari)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab Morowali Tahun 2023

2.1.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Morowali. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Dua indikator untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :



Tabel 2.47
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON) Kabupaten Morowali
Tahun (2018 – 2021)

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2018					2019				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
PADI SAWAH+										
PADI LADANG	12,146.50	10,695.50	2.00	4.873	52,119.17	9,880.30	11,264.30	252.50	4.873	54,890.93
PADI SAWAH	11,891.50	10,458.50	2.00	4.89	51,131.61	9,743.30	11,129.30	250.50	4.89	54,411.15
PADI LADANG	255.00	237.00	-	2.44	578.99	137.00	135.00	2.00	2.44	329.81
JAGUNG	628.00	1,530.4	4.00	3.695	5,654.83	1,347.30	1,179.7	3.00	3.695	4,358.99
KEDELAI	1,978.20	1,543.70	514.50	1.326	2,046.95	56.00	61.00	1.00	1.33	80.89
KACANG TANGGAH	54.00	51.50	1.00	1.259	64.84	49.50	52.50	1.00	1.26	66.10
UBI KAYU	127.00	160.00	6.00	26.669	4,267.04	133.00	144.00	-	26.669	3,840.34
UBI JALAR	40.50	46.50	1.00	13.027	605.76	41.00	38.50	-	13.027	501.54
KACANG HIJAU	136.80	137.80	-	0.802	110.52	58.00	61.00	-	0.802	48.92
TALAS	22.00	35.00	-	-	-	17.50	19.50	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.48



Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2020					2021				
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi (Ton)	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi (Ton)
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)	
PADI SAWAH + PADI LADANG	10.443,30	9.852,00	45,00	4,559	44.915,27	8.974,20	9.433,00	21,00	4,900	46.221,70
PADI SAWAH	10.362,30	9.766,00	45,50	4,560	44.532,96	8.895,20	9.343,00	21,00	4,950	46.247,85
PADI LADANG	81,00	86,00		3,720	319,92	79,00	90,00	-	3,500	315,00
JAGUNG	2.405,20	1.814,40	48,00	4,415	80.190,58	945,30	1.040,10	2,00	4,200	4.368,42
KEDELAI	426,00	229,00	8,00	1,327	303,88	63,50	190,00	4,00	1,000	190,00
KACANG TANAH	59,00	53,00	1,00	1,122	59,47	60,90	69,90	-	1,122	78,43
UBI KAYU	182,00	173,00	4,50	27,883	4.823,76	228,00	224,50	-	27,883	6.259,73
UBI JALAR	75,90	68,90		15,842	1.091,51	81,00	87,00	-	15,842	1.378,25
KACANG HIJAU	73,90	73,40	3,00	0,790	57,99	53,50	57,50	-	0,790	45,43
TALAS						44,50	55,00	-	0,790	43,45

Sumber data: Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Morowali Tahun 2022



2.1.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

2.1.4 Ekspor bersih Perdagangan

Ekspor (export) adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Gross Nasional Product (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor, maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap guncangan-guncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu Tahun tertentu. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000). Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar perdagangan internasional.

Dalam konteks daerah, ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari daerah yang bersangkutan kepada daerah lain, baik dalam negara yang sama maupun pada negara yang lain. Hal yang sebaliknya tentang pengertian impor. Ekspor berarti tambahan permintaan atas barang dan jasa daerah yang bersangkutan yang dengan demikian mendorong meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pengekspor. Ekspor barang dan jasa ke daerah lain dalam negara yang sama tidak menambah devisa bagi negara. Di lain pihak, ekspor barang dan jasa ke negara lain akan menambah devisa bagi negara dari daerah pengekspor. Makna



lain dari semakin terbukanya ekonomi suatu daerah adalah bahwa pengaruh eksternal (daerah lain, dalam negara yang sama dan atau negara lain) terhadap ekonomi lokal semakin besar. Data Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 tersaji pada Tabel 2.48 sebagai berikut.

Tabel 2.48
Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 (Miliar)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp)	15.458	18.712	30.229	39.453,40	37.654,87

Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2019-2023 (diolah)

Ekspor perdagangan bersih Kabupaten Morowali dalam periode Tahun 2018-2022 selalu surplus yang artinya nilai ekspor lebih besar ketimbang import yang terjadi di Kabupaten Morowali. Mayoritas ekspor di Kabupaten Morowali yaitu Nikel dan lainnya. Pada Tahun 2018 menjadi Rp15.458 Miliar, setelah itu meningkat 2 Tahun berturut-turut hingga Tahun 2018 sebesar Rp15.458 Miliar. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.229 Miliar. Kembali meningkat di tahun 2021 sebesar Rp39.453,40 miliar dan di tahun 2022 sebesar Rp37.654,87 miliar.

2.1.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi ini telah menarik banyak investor. Kondisi tersebut telah memajukan Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri. Kabupaten Morowali telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali (RPIK) Tahun 2021-2041 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2021-2041 dengan prioritas atau industri Unggulan yang tersaji pada Tabel 2.49 sebagai berikut:



Tabel 2.49
Industri Prioritas Morowali

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2024 – 2028	2029-2039	
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Perikanan			
		A. Pengolahan Makanan			
		• Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Rumput Laut • Pengolahan Ubi (Tortila) • Pengolahan Ranggina Kacang Khas Morowali • Pengolahan Sambel Ikan Roa • Pembuatan Abon Ikan • Pengolahan Ikan Asap (Ikan Fufu) • Penambahan fasilitas Sentra Pangan Wosu • Pembangunan Sentra Ranggina Desa Lanona • Pembangunan Sentra Ikan di Desa Umbele • Pengembangan industri Tahu dan Tempe	• Budidaya cacing Laut • Pengeringan Ikan Teri kualitas Eksport di Desa Kaleroang • Revitalisasi Rumah Produksi Pengolahan Cacing Laut Kelurahan Ulunambo • Revitalisasi Rumah Produksi Pengeringan Ikan Teri Desa Kaleroang	• Pengolahan Ikan Asap/Ikan Kayu kualitas Eksport • Pembentukan UPT Sentra IKM sebagai Pengelola Teknis	Seluruh Kecamatan, (Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan dan Menui Kepulauan)
		B. Industri Pengolahan Gula Aren			
		• Gula Merah • Gula semut		• Minuman Sirup berbahan baku	Kecamatan Wita Ponda,



No	Industri	Jenis Industri		Wilayah	
				Gula aren	Bungku Tengah
		C. Industri Air Minum Dalam Kemasan			
		•Industri Air Minum Dalam Kemasan Gelas	•AMDK Botol		Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bungku Tengah
2.	Industri Hulu Agro	A. Industri Pengolahan Kelapa Terpadu			
		• Air kelapa dalam kemasan •Briket arang •Nata de coco	• Santan bubuk dan cair • Tepung kelapa •Asap cair	•Carbon aktif	Kecamatan Bungku Barat, Bungku Tengah dan Bungku Pesisir,
		B. Industri Pengolahan Kelapa Sawit			
		•Industri margarine •Olein •Dan produk turunan berbahan baku kelapa sawit	• Asam lemak Nabati	• Industri margarine • Olein • Plastik bio berbasis limbah industri sawit • Polimer turunan minyak sawit	Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya dan Bungku Barat
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu, Rotan dan Daur Ulang)	A. Industri Furniture dan pengolahan Kayu			
		• Furniture kayu dan aluminium • Penambahan Rumah Produksi pada Sikim Furniture Bungku Tengah • Industri penggergajian kayu • Peningkatan Sarana dan Prasarana Sikim Furnitur	• Furniture kayu. • Industri penggergajian kayu • Vokasi SDM ke Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal.	• Furniture kayu dan kerajinan lainnya	Kecamatan Bungku Tengah, Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Timur dan Bahodopi



No	Industri	Jenis Industri			Wilayah
		B. Industri Kerajinan kayu, Rotan dan Daur Ulang			
		• Kerajinan furniture berbahan baku Rotan • Pemanfaatan Mesin Peralatan Rotan pada Sikim Furniture • Kerajinan Daur ulang dari kerang-kerangan, Koran bekas dan Botol AMDK Bekas	• Kerajinan dan Meubel Rotan • Kerajinan anyaman Rotan yang memiliki nilai tinggi	• Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan Rotan dan daur ulang • Kerajinan Rotan dan daur ulang yang memiliki nilai tinggi	Kecamatan Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Pesisir
		C. Industri Bahan Bangunan dan Umum			
		• Industri Pembuatan Batako • Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya berbahan baku pasir local • Industri Batako standar nasional	• Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah)	• Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku liat (Gerabah)	Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir
4.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	A. Industri Besi			
		Industri Biji Besi Dan stainless	Industri Besi dan Stainless steel	Industri Besi dan Stainless steel dan turunannya	Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi dan Bungku Pesisir
		B. Industri Nikel			
		• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel	• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate,	Industri Stainlees steel untuk bahan kontruksi, perabotan,	Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi dan Bungku Pesisir



No	Industri	Jenis Industri			Wilayah
		Murni) • Industri Kokas • Industri Baterai Litium	dan Nikel Murni) • Indsutri Kokas • Industri Baterai Litium	peralatan kesehatan, kawat, peralatan listrik/elektonika dan produk turunannya lainnya	
		C. Industri Bahan Galian Bukan Logam			
		• Industri Batu Kapur • Galian C • Industri pengolahan sirtu	• Industri Batu Kapur • Galian C • Industri pengolahan sirtu	• Industri Pengolahan Batu Kapur • Industri pengolahan sirtu	Kecamatan Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Pesisir.

Sumber: RPIK, Morowali 2021-2041

2.1.3.3.7 Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Morowali masih merupakan kegiatan yang masih mendominasi sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan data mengenai keadaan sektor pertanian di Kabupaten Morowali beserta sub sektornya, yakni: Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura, Sub-Sektor Perkebunan, Sub Sektor Kehutanan, dan Sub Sektor Peternakan. Indikator kinerja urusan pilihan sektor pertanian dapat dievaluasi melalui pencapaian besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas, cakupan bina kelompok pada setiap sub sektornya. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi menjadi sektor dengan



kontribusi terbesar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Namun hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Morowali.

Merujuk pada tabel dibawah ini diketahui bahwa, kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali dalam periode Tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap Tahunnya baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010. Kontribusi sektor ini Tahun 2018, sebesar 5,48 persen untuk PDRB ADHB dan 4,98 persen PDRB ADHK 2010. Terus menurun setiap Tahunnya sampai Tahun 2022 kontribusi sektor ini sudah turun menjadi sebesar 1,46 persen untuk ADHB dan 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010. Penurunan kontribusi sektor ini menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah tepat dan cepat dalam menyelamatkan sektor ini ke depan antara lain meningkatkan nilai tambah (value added), kualitas produksi dan penggunaan teknologi. Tahun 2022 terus menurun hingga sangat rendah menjadi sebesar 1,46 persen PDRB ADHB dan sebesar 2,05 persen untuk PDRB ADHK 2010, secara lengkap disajikan pada Tabel 2.50 sebagai berikut ini.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,5 0	45.244.727,1 0	61.985.633,2 0	98.779,8 1	146.599,3 2
- ADHK 2010	28.358.401,6 0	34.085.704,8 0	43.947.504,4 0	54.916,2 4	70.515,62
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)					
- ADHB	2.049.001,70	2.063.374,20	2.023.944,10	2.147,50	2.147,50
- ADHK 2010	1.411.278,90	1.437.272,30	1.397.644,00	1.442,50	1.442,50
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	5,48	4,56	3,27	2,17	1,46
- ADHK 2010	4,98	4,22	3,18	2,63	2,05

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan setiap Tahun. Hal tersebut di tunjukan dari persentase kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Dimana



Tahun 2018 kontribusi sektor ini sebesar 0,30 persen PDRB ADHB menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,001 persen. Sedangkan untuk kontribusi PDRB ADHK 2010 di Tahun sebesar 0,26 persen, menurun hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 0,15 persen. Persentase kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB mengalami penurunan. Selanjutnya nilai dari Sektor Pertanian Palawija di Tahun 2022 sebesar Rp133.186,05 juta untuk PDRB ADHB dan sebesar Rp80.715,77 PDRB ADHK 2010, yang dapat dilihat pada Tabel 2.51 sebagai berikut ini.

Tabel 2.51
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,5 0	45.244.727, 10	61.985.633, 20	98.779.810, 00	146.599.320, 00
- ADHK 2010	28.358.401,6 0	34.085.704, 80	43.947.504, 40	54.916.240, 00	70.515.620,0 0
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Palawija) (Rp)					
- ADHB	111.855,35	122.510,75	133.166,15	133.176,10	133.186,05
- ADHK 2010	72.766,06	76.735,38	80.704,71	80.710,15	80.715,77
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	0,30	0,27	0,21	0,001	0,001
- ADHK 2010	0,26	0,23	0,18	0,15	0,11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Subkategori tanaman perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan Tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lain sampai kegiatan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Pada Tahun 2022 Nilai Sektor Perkebunan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp652.916,52 juta, kemudian untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp465.019,89 juta. Sementara itu, untuk kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali sebesar 0,45 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,66 persen juga menurun dari Tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 2.52 sebagai berikut ini.



Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	37.356.484,5 0	45.244.727, 10	61.985.633,2 0	98.779.810,0 0	146.599.320,0 0
- ADHK 2010	28.358.401,6 0	34.085.704, 80	43.947.504,4 0	54.916.240,0 0	70.515.620,00
Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Rp)					
- ADHB	627.095,85	640.004,72	652.913,58	652.913,35	652.916,52
- ADHK 2010	463.514,08	464.267,29	465.020,50	465.019,60	465.019,89
Kontribusi Sektor (%)					
- ADHB	1,68	1,41	1,05	0,66	0,45
- ADHK 2010	1,63	1,36	1,06	0,85	0,66

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

4. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Mengutip dari Tabel di atas, tanaman padi dan bahan makanan lainnya yang mengalami produktivitas paling tinggi menurut jenis ton/ha pada Tahun 2022 adalah tanaman ubi kayu sebesar 290,69 ton perhektar kemudian diikuti oleh tanaman ubi jalar sebesar 203,95 ton perhektar. Tanaman padi berada pada posisi ketiga produktivitas perhektar yaitu sebesar 45,67 ton perhektar. Tanaman yang paling rendah produktivitas yaitu tanaman kacang hijau sebesar 0,66 ton perhektar yang disajikan pada Tabel 2.53 sebagai berikut ini.

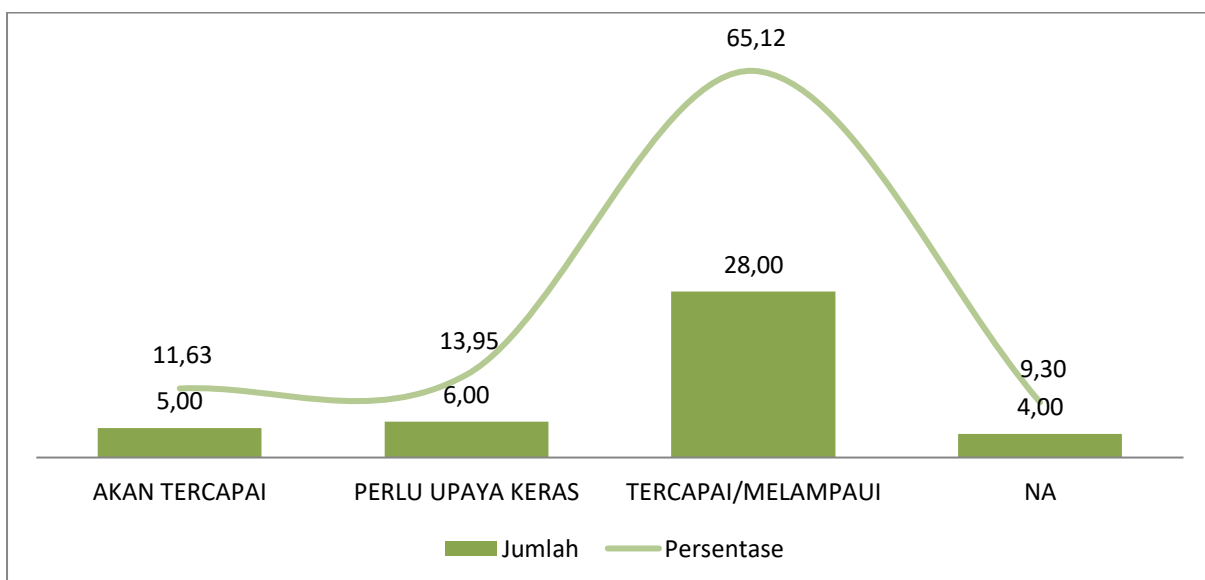
Tabel 2.53
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	52,15	49,26	45,6	51,11	45,67
Jagung	46,28	44,78	15,81	15,81	15,81
Ubi Kayu	263,67	289,69	290,69	290,69	290,69
Ubi Jalar	135,6	201,35	203,95	203,95	203,95
Kacang Tanah	12,01	10,75	10,77	10,77	10,77
Kacang Kedelai	12,22	7,46	20,82	20,82	20,82
Kacang Hijau	8,2	0,67	0,66	0,66	0,66

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Serta Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap capaian Visi Misi RPJMD diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan sampai dengan tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 data capaian belum tersedia. Total indikator RPJMD Misi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 sebanyak 52 indikator. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sampai dengan tahun 2022 terdapat 28 indikator atau 65,12 persen dengan status capaian tercapai/melampaui, kemudian sebanyak 6 indikator atau sebesar 13,95 persen dengan capaian perlu upaya keras. Selanjutnya terdapat 5 indikator dengan status capaian akan tercapai dan 9,30 persen atau 4 indikator dengan status capaian tidak dapat diketahui karena ketidaksediaan data. Berikut ini rekap capaian misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.



Sumber Data: Hasil Olahan, Tahun 2023

Gambar 2.49
Rekapitulasi Capaian Indikator Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2022 dan Status Capaian Terhadap target Akhir Periode RPJMD



Evaluasi capaian visi misi RPJMD Kabupaten Morowali dapat dijelaskan berikut ini.

2.2.1 Evaluasi Misi 1 RPJMD

Misi ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Indikator tujuan misi berfokus pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Morowali. Sampai dengan tahun 2022 nilai IRB Kabupaten Morowali yakni CC tidak mencapai target di Tahun 2022 yang ditetapkan B. Status capaian terhadap target akhir yakni Akan Tercapai, namun dengan ketentuan terdapat komitmen yang kuat dari seluruh komponen pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sampai tahun 2022 terdapat 3 Indikator dengan status capaian *Tercapai/Melampaui* yakni Indeks kepuasan masyarakat, Opini hasil pemeriksaan oleh BPK dan Persentase Status Desa Maju. Selanjutnya terdapat dua indikator dengan status capaian *Akan Tercapai* diantaranya Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali, dan terdapat satu indikator dengan status capaian *Perlu Upaya Keras* yakni Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP). Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.54
Evaluasi Capaian Indikator Misi 1 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

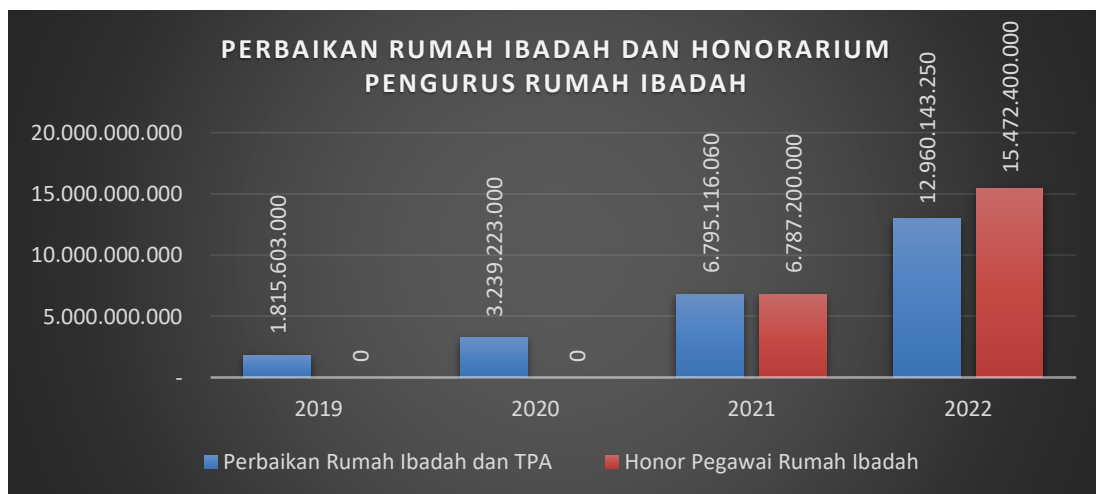
INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
1.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali	NA	NA	CC	B	B	B	NA	NA	CC	CC	NA	NA	100	85	85	AKAN TERCAPAI	▶
1.1.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	C	CC	B	B	BB	BB	C	C	CC	CC	100	100	85,71	85,71	71,43	PERLU UPAYA KERAS	▼
1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat	NA	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	100	100	100	TERCAPAI/ MELAMPAU I	●
1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	NA	100	TERCAPAI/ MELAMPAU I	●
1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	NA	0,6147	0,6647	0,7147	0,7647	0,7647 (Maju)	NA	0,6147	0,6261	0,6528	NA	100	94,19	91,34	85,37	AKAN TERCAPAI	▶
1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju	8	8	10-11	11-12	12-13	12-13	NA	8	15,87	28,57	100	100	144,3	219,78	219,78	TERCAPAI/ MELAMPAU I	●

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)

Nilai Sakip Pemerintah Daerah jika melihat Data realisasi dalam tabel diatas, menunjukkan kinerja yang belum mencapai target. Sekretariat Daerah sebagai pendukung dalam menjalankan roda pemerintahan daerah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk mencapai target dalam indikator sasaran ini. Satu hal yang menjadi catatan penting dalam hasil evaluasi ini yaitu alokasi anggaran yang di berikan untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat, seperti diketahui dalam RKA Bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat alokasi anggaran untuk perbaikan rumah ibadah dan pemberian honor pengurus rumah ibadah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah anggaran yang berikan pemerintah dalam mensejahterakan pengurus rumah ibadah dan perbaikan rumah ibadah seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber Data: (Perubahan RKA Bagian Sekretariat)

Gambar 3.2
Perbaikan Rumah Ibadah Dan Honorarium
Pengurus Rumah Ibadah

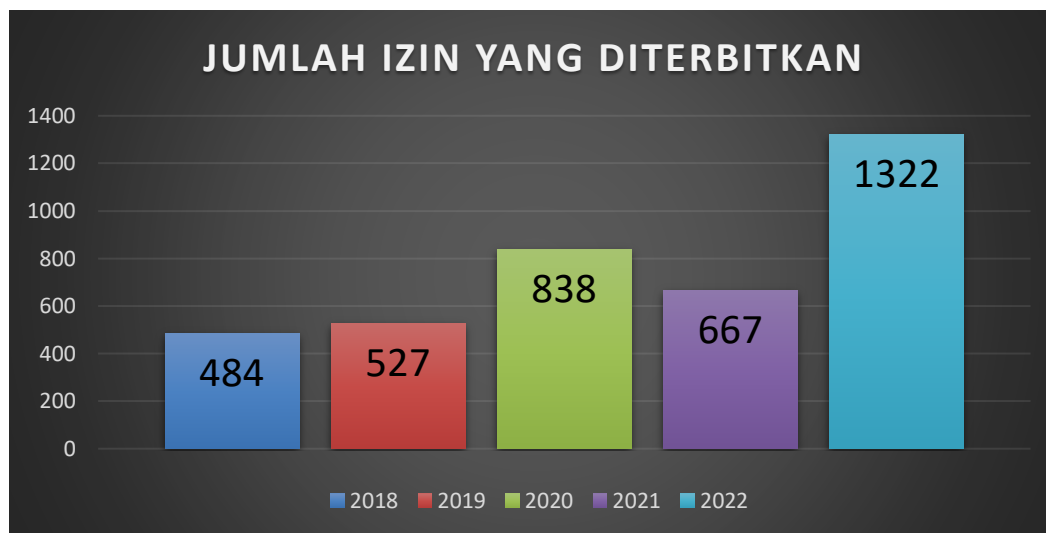
Program yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten morowali diantaranya: program penunjang urusan, program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta program perekonomian dan pembangunan.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik, DPMPSTSP merupakan salah satu OPD yang ikut mengambil peran untuk mencapai target pada sasaran ini. Jika melihat



capaian pada tahun 2021 kinerja pemerintah daerah di unit Pelayanan Perizinan belum mencapai target dengan realisasi Cukup atau kategori (C), sementara jumlah izin yang diterbitkan semakin hari semakin meningkat hal ini menjadi perhatian unit DPMTSP untuk lebih meningkatkan kinerja terkait pelayanan perizinan. Adapun jumlah izin yang diterbitkan setiap tahun pada grafik dibawah ini:



Sumber Data: (Cascading Resntra DPMPTSP)

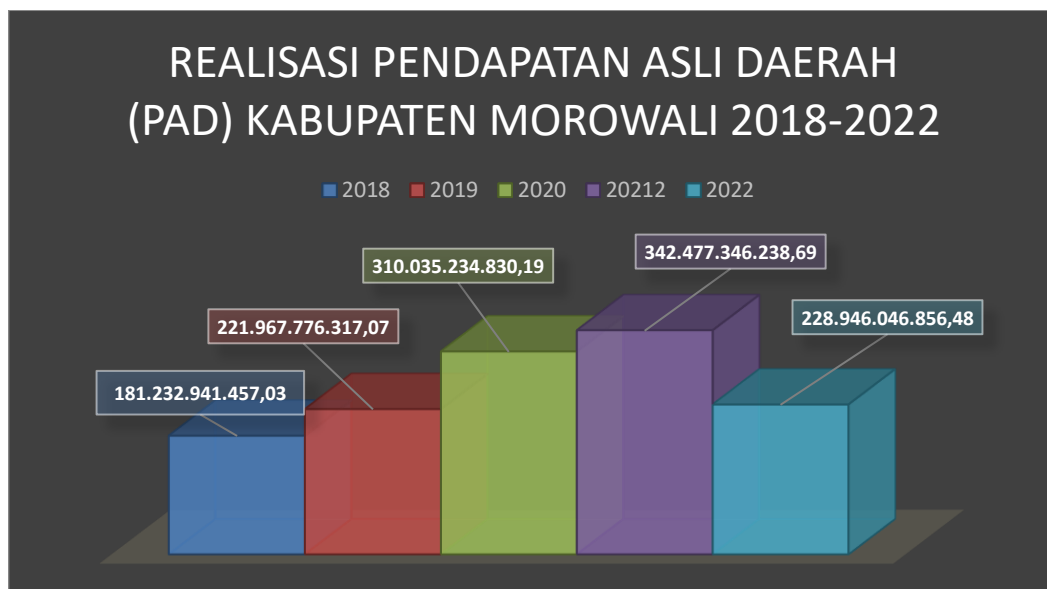
Gambar 2.50
Jumlah Izin yang dikeluarkan (DPMPTSP) Tahun 20218-2022

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik diatas jumlah izin yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir sejumlah 3.838 Izin, hal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2021 namun jika dibandingkan dengan tahun awal 2018 kinerja pemerintah unit penerbitan izin masih menunjukkan kinerja yang baik. DPMPTSP selain memberlakukan penerbitan Izin melalui Online Singel Sistem (OSS) yang sudah terintegrasi secara elektornik, dalam hal meningkatkan kepuasan masyarakat DPMPTSP juga pada tahun 2022 telah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan anggaran Rp. 11.460.372.702. Program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan Meningkatkan kinerja pelayanan publik di unit pelayanan perizinan Daerah dikabupaten morowali yakni Program pelayanan penanaman Modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu menunjukkan kinerja

yang sangat baik, dapat dilihat dari capaian pada 2019 (100 %), 2020 (100 %), 2021 (95 %) dan Tahun 2022 (144 %).

Opini hasil pemeriksaan oleh BPK

Kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten morowali jika diukur dengan Opini hasil Pemeriksaan BPK maka Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari capaian yang disajikan pada tabel evaluasi misi 1 diatas dari tahun awal 2018 sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut kabupaten morowali berada pada opini WTP. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih bukan hanya sebatas wacana tapi dibuktikan dengan kinerja aparatur yang ada di pemerintahan kabupaten morowali saat ini. Disamping penyajian laporan keuangan dan asset daerah yang baik, sasaran ini juga didukung dengan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada grafik dibawah ini yang menunjukkan peningkatan PAD setiap tahunnya.



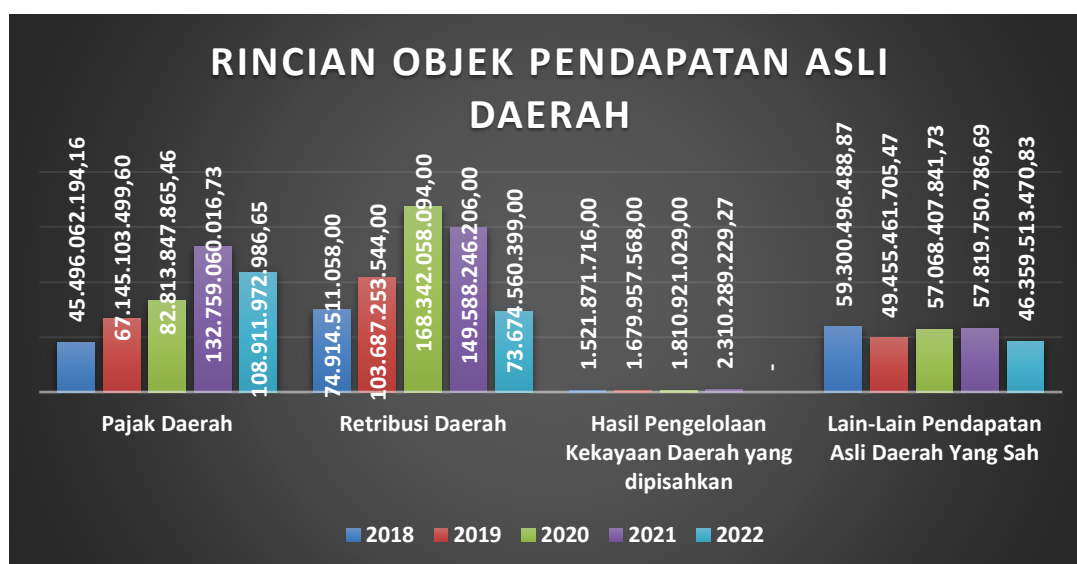
Sumber Data: (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Tahun 2023

Gambar 2.51

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali 2018-2022

Jika melihat realisasi pendapatan yang disajikan pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan hasil yang sangat baik, Adapun persentase pertumbuhan pendapatan setiap tahun adalah tahun 2019 (22,48), Tahun 2020

(39,68), Tahun 2021 (10,46) dan Tahun 2022 (-33,15). Pertumbuhan minus yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena data realisasi pendapatan yang diakumulasi dalam perhitungan adalah Realisasi Triwulan III dan masih memungkinkan untuk mencapai target pada akhir tahun 2022. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan berada di angka 9,87%. Adapun rincian per objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber Data: (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Tahun 2023

Gambar 2.52

Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah Mengalami peningkatan setiap tahun, begtu juga dengan Retribusi daerah walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami peningkatan setiap tahun. Program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah dikabupaten morowali diantaranya program pengelolaan barang milik daerah, program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah. Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap Total PAD dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun awal pada 2018, dan untuk persentase realisasi penerimaan pajak dan



retribusi daerah di tahun 2020 mencapai angka 101,54 persen ini menunjukkan jika pada tahun 2020 kinerja pemerintah daerah melebihi dari apa yang ditargetkan.

2.2.2 Evaluasi Misi 2 RPJMD

Misi ini fokus untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis kelestarian alam dan lingkungan, mendorong peningkatan proses nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi melalui pelibatan UKM, Koperasi, dan Korporasi guna meningkatkan PAD, penyerapan tenaga kerja lokal dan melindungi hak-hak pekerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Indikator tujuan Misi 1 yakni Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif capaian dari tahun 2019 s/d tahun 2021 mengalami peningkatan dari 5,44 poin sampai dengan tahun 2021 mencapai 6,27 poin. Sedangkan untuk capaian tahun 2022 masih menunggu rilis dari Bappenas.

Sampai dengan tahun 2022 evaluasi indikator Misi 2 menunjukkan bahwa dari sebelas indikator terdapat 10 indikator atau sebesar 90,91 persen dengan status capaian Tercapai/ Melampaui yakni Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), PDRB Perkapita, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Skor Pola Pangan Harapan (SPPH), dan indikator Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya. Sedangkan satu indikator atau 9,19 persen dengan status capaian *Akan tercapai* yakni Indikator Presentase Penduduk Miskin.

Status kesejahteraan masyarakat berdasarkan aturan pemerintah terbagi kedalam Desil-desil. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Status kesejahteraan menurut desil dilihat berdasarkan data keluarga ataupun Individu.

Status kesejahteraan menurut keluarga menurut desil menunjukkan bahwa total keluarga yang di Kabupaten Morowali sebanyak 13.663 RT, dimana keluarga terbesar pada desil 3. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.



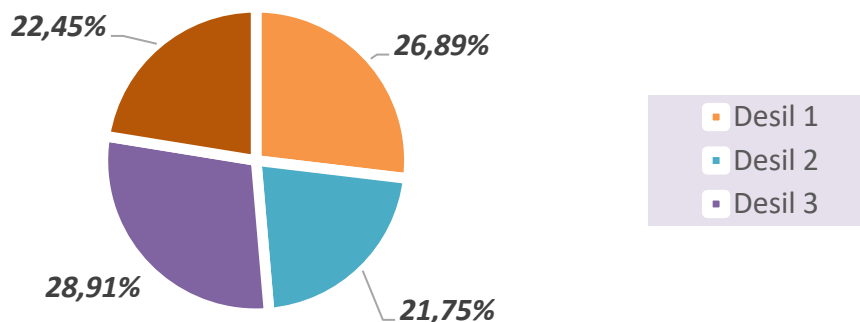
Tabel 2.55
Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di
Kabupaten Morowali Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1.	Bungku Tengah	1.072	131	179	387	375
2.	Bungku Selatan	2.502	1.117	551	549	285
3.	Menui Kepulauan	2.408	917	562	563	366
4.	Bungku Barat	1.397	374	293	415	315
5.	Bumi Raya	1.428	223	326	493	386
6.	Bahodopi	1.110	138	220	395	357
7.	Wita Ponda	2.136	448	484	645	559
8.	Bungku Pesisir	561	88	133	180	160
9.	Bungku Timur	1.049	238	224	323	264
	Total	13.663	3.674	2.972	3.950	3.067

Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa kecamatan Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Wita Ponda adalah Kecamatan dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraannya tertinggi hingga mencapai angka dua ribu namun kecamatan paling tertinggi dengan angka sebesar 2.500 adalah Bungku Selatan. Sedangkan Bumi raya, Bungku barat, Bungku Tengah, Bungku Timur dan Bahodopi adalah kecamatan dengan jumlah keluarga berdasarkan status kesejahteraan mencapai angka seribu. Namun yang terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraan sebanyak 561. Sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya dilihat dari desil 1, keluarga yang masuk kategori desil 1 terbesar terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, untuk Desil 2 terbanyak berada di Kecamatan Bungku Selatan, untuk Desil 3 terbesar berada di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Menui Kepulauan. Dan untuk desil 4 terbanyak di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bumi Raya. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan pada keluarga khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2.

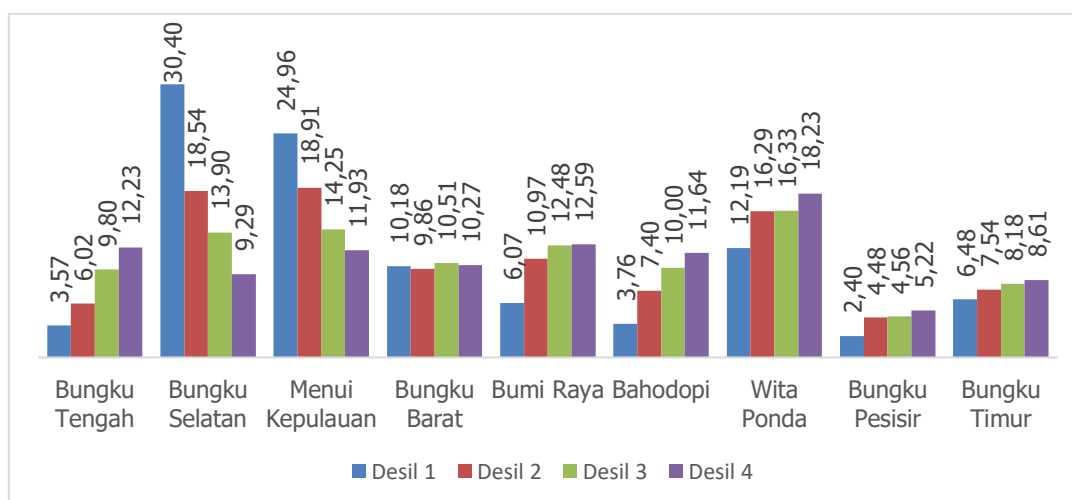


Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Gambar 2.53
Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil
di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Merujuk pada Gambar 2.53 di atas, persentase kesejahteraan keluarga menurut desil Kabupaten Morowali, tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 28,91 persen, kemudian tertinggi kedua desil 1 dengan jumlah persentase sebesar 26,89 persen, berikut desil 4 dengan jumlah persentase sebesar 22,45 persen dan terakhir desil 2 dengan jumlah persentase sebesar 21,75 persen.

Selanjutnya pada grafik berikut ini juga disajikan data persentase sebaran kesejahteraan keluarga menurut kecamatan.



Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, diolah 2022

Gambar 2.54
Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di
Kabupaten Morowali Tahun 2022



Berdasarkan gambar diagram di atas diketahui persentase keluarga menurut status kesejahteraan pada desil 1 adalah kecamatan Bungku Selatan sebagai kecamatan tertinggi persentase keluarganya dengan nilai persentase sebesar 30,40 persen. Sedangkan yang paling terendah adalah Bungku Pesisir dengan jumlah persentase keluarga sebesar 2,40 persen pada desil 1. Kemudian, pada desil 2 dengan jumlah persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Menui Kepulauan dengan jumlah persentase sebesar 18,54 persen dan yang terendah pada desil 2 yaitu kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,48 persen. Berikut kecamatan Witaponda sebagai kecamatan yang memiliki jumlah persentase keluarga tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 16,33 persen dan yang paling terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,56 persen. Dan pada desil 4, kecamatan yang memiliki persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Witaponda dengan jumlah persentase sebesar 18,23 persen sedangkan yang paling terendah persentase keluarganya adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 5,22 persen. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Bungku Pesisir adalah kecamatan yang paling terendah tingkat persentase keluarganya menurut status kesejahteraan pada masing-masing desil sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Morowali.



Tabel 2.56
Evaluasi Capaian Indikator Misi 2 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
2.1.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5,37	6-5	6-5	6-5	6-5	6-5	5,44	6,13	6,27	Menunggu Rilis Bappenas	101,30	102,17	104,50	NA	104,50	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●
2.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	20,2	28,93	10-15	10-15	10-15	10-15	20,26	28,93	25,31	26	100,30	100,00	168,73	173,33	173,33	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●
2.1.2.1	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13,09	-4,7	6-4	6-4	6-4	6-4	188,63	12,43	27,04	28	1.441,02	(264,47)	450,67	466,67	466,67	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●
2.1.3.1	PDRB Perkapita	281,01	356,2	300-400	300-400	300-400	300-400	281,01	356,2	375,09	380	100,00	100,00	107,17	108,57	108,57	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●
2.1.5.1	Gini Rasio	0,304	0,304	0,30-0,24	0,30-0,24	0,30-0,24	0,30-0,24	0,304	0,290	0,297	0,285	-	(4,61)	(1,00)	(5,00)	(5,00)	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●
2.1.6.1	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	3,03	5,21	5-3	3-2	3-2	3-2	3,03	5,21	3,73	3,20	-	-	(25,40)	6,67	6,67	TERCA PAI/ MELAM PAUI	●

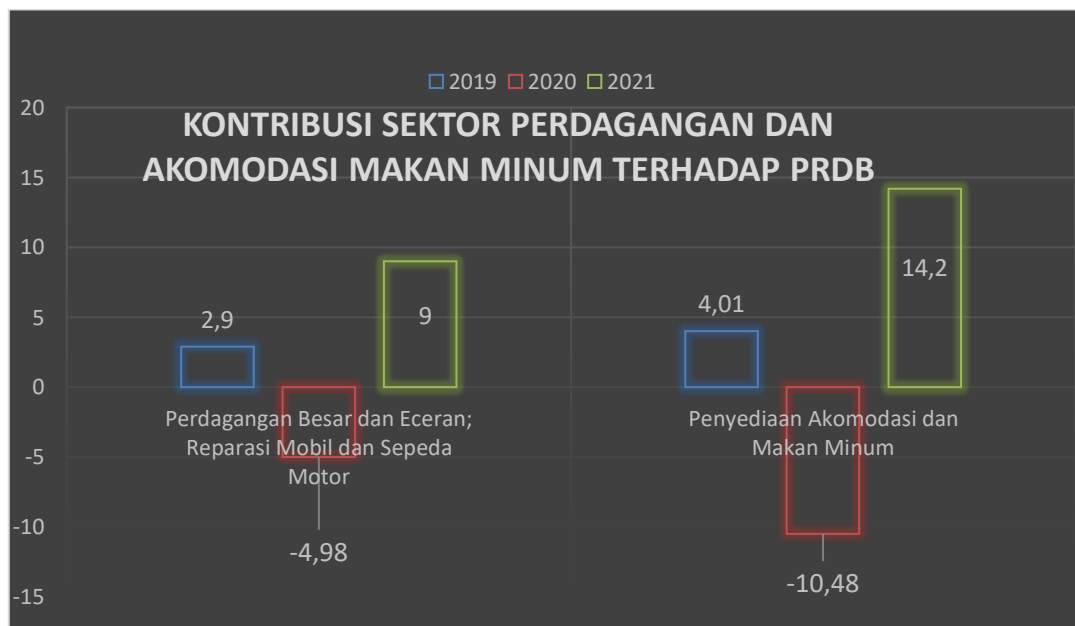


INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
2.1.7.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	95-98	97,5 - 98,5	100-102	100-102	100-102	100-102	91,8	95,27	103,51	103,6	96,63	97,71	103,51	103,60	103,60	TERCA PAI/ MELAM PAUI	
2.1.7.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103	103	104	105	106	106	114,69	99,47	104,56	105	111,35	96,57	100,54	100,00	99,06	TERCA PAI/ MELAM PAUI	
2.1.8.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	NA	NA	80.00-82.00	83.00-85.00	86.00-88.00	86.00-88.00	NA	NA	80,1	84	NA	NA	100,13	101,20	97,67	TERCA PAI/ MELAM PAUI	
2.1.9.1	Presentase Penduduk Miskin	13,75	13,14	13,10-12,22	12,75-11,01	12,40-9,8	12,40-9,8	13,75	13,43	13,75	13,75	-	2,21	4,96	5,10	10,89	AKAN TERCA PAI	
2.1.10.1	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhannya	NA	NA	65-70	70-75	75-80	75-80	36,00	71,00	72,00	72,00	55,38	101,43	96,00	96,00	96,00	TERCA PAI/ MELAM PAUI	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Opini hasil pemeriksaan oleh BPK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi di daerah, apabila melihat data realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang disajikan pada table diatas, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dapat dikategorikan fluktuasi, kondisi ini jika disandingkan data awal tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, 2020 dan 2021 maka kinerja pemerintah daerah akan dikategorikan menurun setiap tahun. Namun realisasi pada tahun 2020 dan 2021 adalah yang tertinggi di Sulawesi Tengah, walaupun dalam struktur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan kontribusi ekonomi lokal belum terlalu signifikan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali.



Sumber: Data (Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2022)

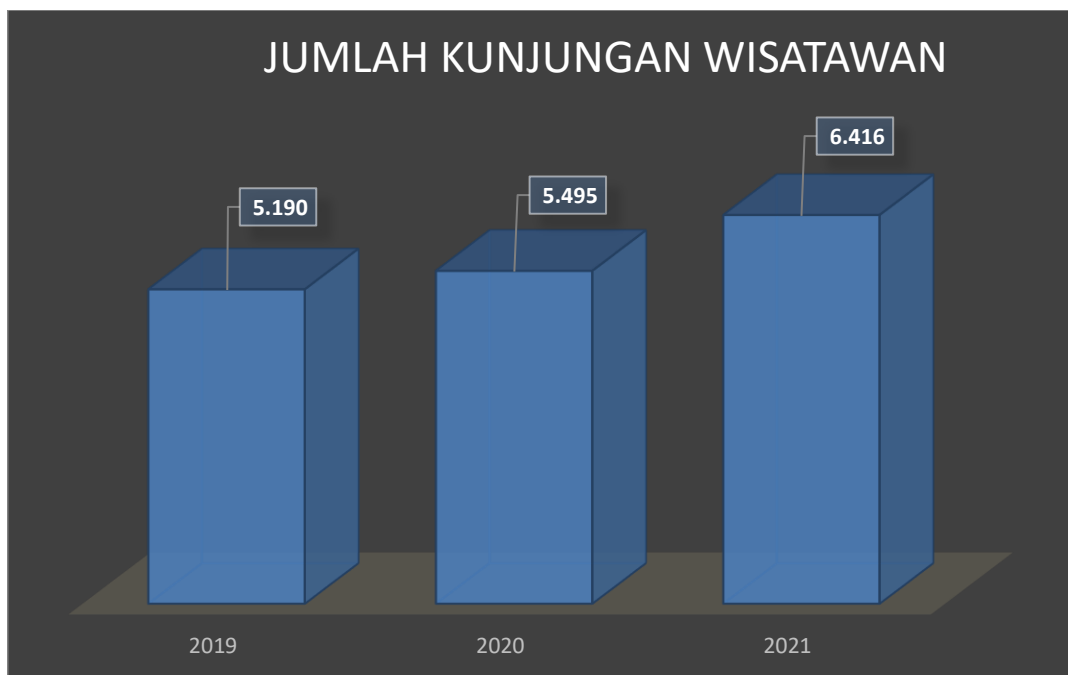
Gambar 2.55
Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Akomodasi Makan Minum
Terhadap PRDB

Berdasarkan data per sektor diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten morowali untuk kedua sektor tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten morowali bahkan mencapai Minus pada tahun 2020 karena terdampak akibat pandemic Virus



Covid-19 pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kabupaten morowali di dominasi oleh sektor Pertambangan dan Galian dan Sektor Industri Pengolahan.

Disektor Pariwisata Kabupaten Morowali memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata bahari sampai dengan wisata budaya yang cukup beragam. Pariwisata di Kabupaten Morowali lebih diarahkan untuk pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Morowali terdapat beberapa jenis obyek wisata bahari seperti pantai pasir putih kecamatan bungku pesisir dan beberapa pulau (Pulau Sombori dan Pulau Koikoila) yang terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan. Kemudian, wisata budaya seperti peninggalan makam Raja Bungku serta Masjid Tua di Kota Bungku dan benteng dekat Kota Bungku yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah. Sedangkan wisata alam seperti air terjun, hutan mangrove yang juga terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Untuk meningkatkan daya Tarik destinasi wisata pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan Pembenahan objek wisata terbukti sebanyak 10 sarana Wisata yang tersebar di kabupaten Morowali sejak tahun 2020 sampai 2022, disamping pembenahan objek wisata juga dilakukan pelatihan pemandu wisata sebanyak 35 Orang dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif sektor pariwisata sebanyak 24 Orang pada tahun 2021. Adapun dampak dari semakin lamanya kunjungan wisatawan, akan menghidupkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Lama kunjungan wisata yang berkunjung di kabupaten Morowali rata-rata dalam 5 Tahun terakhir yakni 3 hari. Untuk meningkatkan lama kunjungan pemerintah daerah perlu mengembangkan destinasi wisata secara menyeluruh (obyek, industri, pemasaran, pertunjukan) agar wisatawan yang berkunjung memiliki alternatif aktivitas wisata yang akan menahan mereka untuk lebih lama berkunjung di Kabupaten Morowali. Sementara itu kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah hanya berada diangka (0,02 %) ditahun 2019, (0,009 %) ditahun 2020 dan (0,013%) ditahun 2021. Angka ini belum mencapai 1 % sehingga perlu pembenahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pariwisata walaupun jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara mengamai peningkatan setiap tahun seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Data (Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2022)

Gambar 2.56
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan wisatawan pada grafik diatas terdiri dari wisatawan domestic dan mancanegara, Adapun jumlah kunjungan wisatawan domestic mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 (4.972 Orang), tahun 2020 (5.461 orang) dan tahun 2021 (6.409 Orang) sementara kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan setiap tahun pada tahun 2019 (218 Orang), 2020 (34 Orang) dan tahun 2021 (7 Orang).

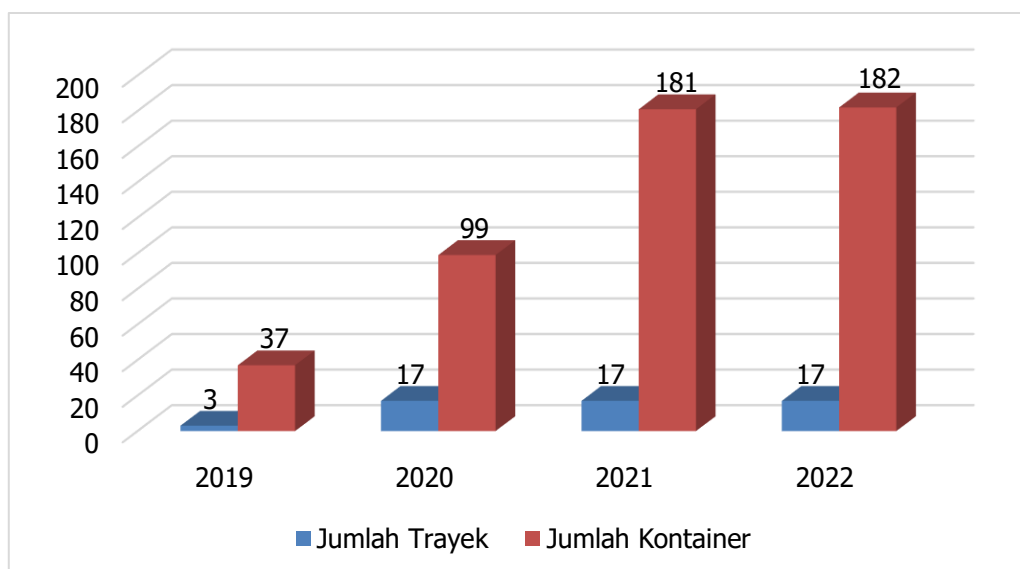
Disektor Perdagangan Pemerintah daerah juga melakukan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan pendaftaran perusahaan, sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 adapun jumlah rekomendasi dan izin yang diterbitkan sejumlah 785 dokumen yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan di kabupaten Morowali. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha dan perdagangan yang ada di kabupaten morowali. grafik dibawah ini merupakan jumlah rekomendasi dan izin dikeluarkan yang menjadi kewenangan dinas Perdagangan dan Perindustrian daerah.



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2023

Gambar 2.57
Rekomendasi Dan Izin Yang Dikeluarkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Selain itu pemerintah daerah dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan tempat mengangkut komoditas yang diperjual belikan diluar daerah Morowali juga merupakan rute yang dilewati Tol Laut Ssaat ini, dapat dilihat pada grafik dibawah ini aktifitas Tol Laut di Dermaga Bungku:



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2023

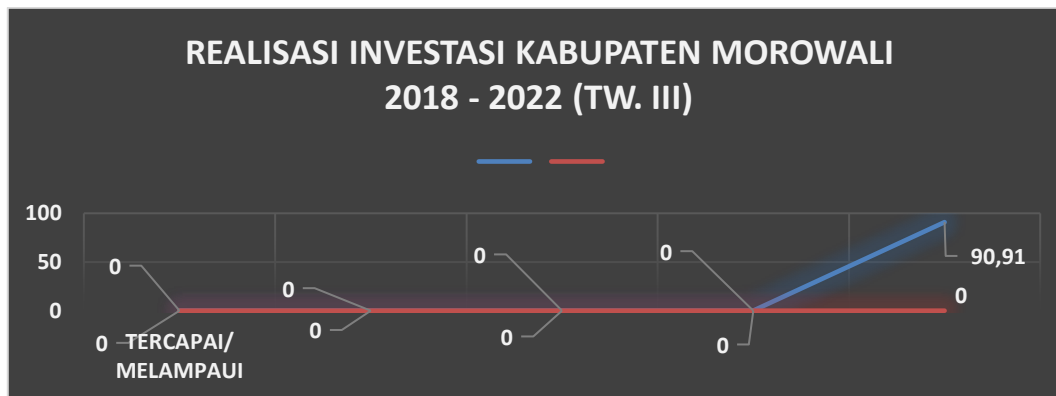
Gambar 2.58
Cargo Manivest Muatan Tol Laut



Selain itu pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah juga melakukan pembangunan pasar dan revitalisasi pasar. Tahun 2019 pemerintah menambah 2 (dua) pembangunan pasar baru yang terletak di kecamatan Bahodopi (desa Labota) dan Kecamatan Bungku Pesisir (Tangofa) yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun Jumlah pasar yang ada di kabupaten morowali hingga saat ini adalah 23 pasar dengan jumlah pedagang 3.977 orang, sementara untuk revitalisasi pasar dan perbaikan sarana Pasar sejak 2019 sampai 2022 adalah 12 pasar yang tersebar di kabupaten morowali dengan alokasi anggaran Rp1.918.971.386,-. kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mengantisipasi penambahan jumlah perdagangan yang bertambah setiap saat. Adapun Program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten morowali adalah program perizinan dan pendaftaran usaha, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tumbuhnya Investasi Daerah

Peningkatan investasi di Kabupaten Morowali salah satunya melalui kegiatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika melihat data yang disajikan pada tabel capaian misi 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PMTB Kabupaten Morowali mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2019, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 hal ini disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara nasional. Namun jika dibandingkan dengan data awal tahun 2018 Kinerja pemerintah daerah untuk menumbuhkan investasi di kabupaten Morowali patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi kabupaten morowali yang mengalami kenaikan disetiap tahun.

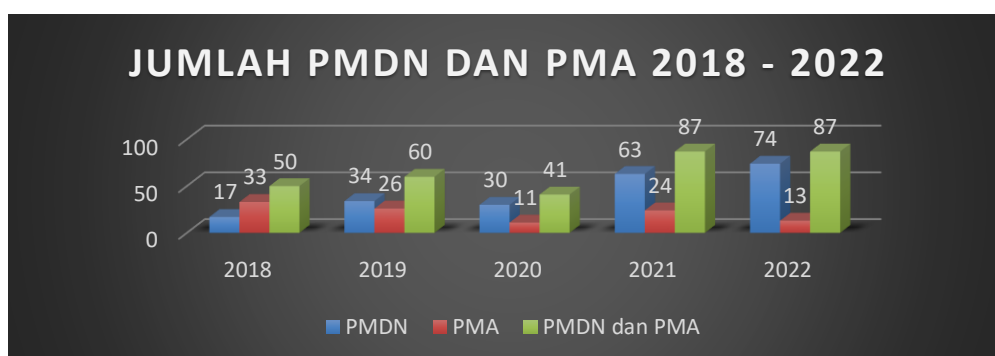


Sumber: DPMPTSP, Tahun 2023

Gambar 2.59
Realisasi Investasi Kabupaten Morowali
Tahun 2018 - 2022 (TW. III)

Capaian relaisasi investasi kabupaten morowali pada tahun 2021 menempatkan kabupaten morowali di posisi ke 4 (empat) secara nasional dan pada tahun 2022 (Triwulan III) menempatkan Kabupaten Morowali pada posisi pertama di Sulawesi Tengah maupun secara nasoinal. Adapun Program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikabupetan morowali adalah: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi investasi yang dicapai hingga saat ini tidak terlepas dari jumlah PMA dan PMDN yang melakukan investasi dikabupaten morowali yang mengalami peningkatan setiap tahun, grafik dibawah ini menunjukan Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Morowali selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir :

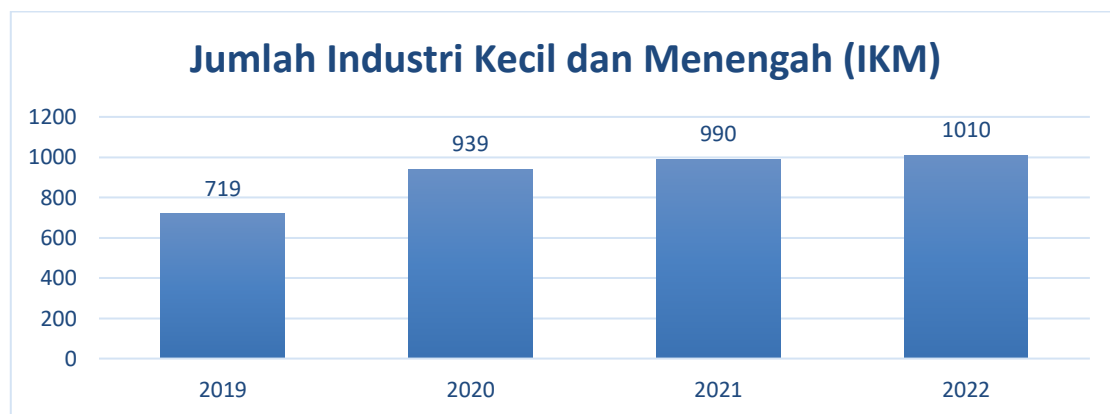


Sumber: DPMPTSP, Tahun 2023

Gambar 2.60
Jumlah PMDN dan PMA 2018 - 2022

Meningkatnya PDRB Perkapita

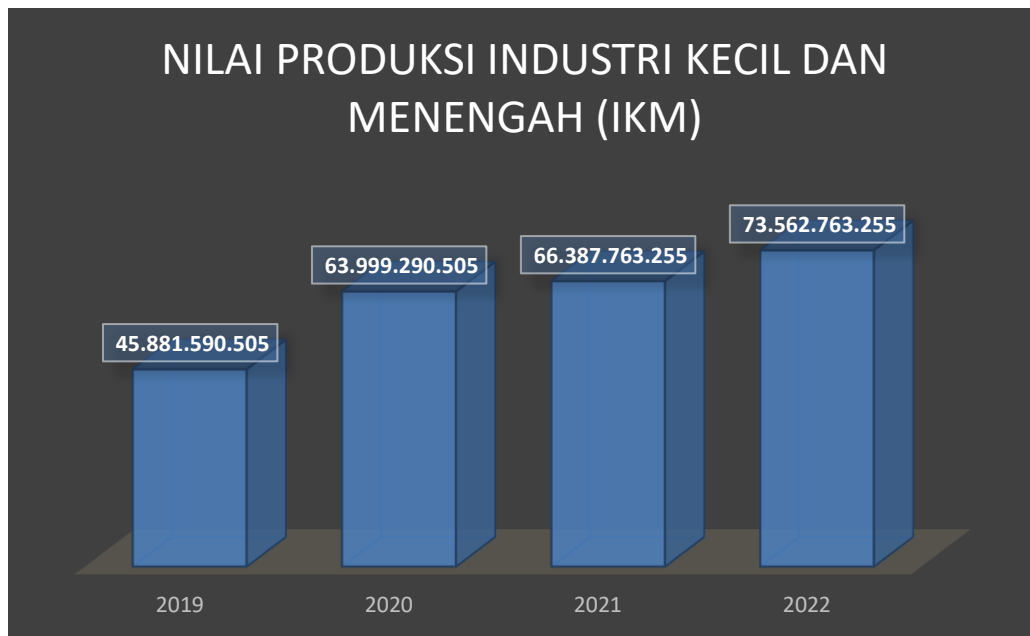
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sampai 2021 menempatkan Kabupaten Morowali pada posisi pertama dengan PDRB Perkapita tertinggi di Sulawesi Tengah. Capaian ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri karena kondisi kemiskinan berbanding terbalik dengan PDRB perkapita saat ini, yang mana seperti diketahui bahwa persoalan kemiskinan di Kabupaten Morowali saat ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah kedepannya dalam menentukan arah kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di kabupaten morowali. Memberikan rekomendasi usulan penerbitan PIRT industri pangan bagi pelaku IKM merupakan salah satu kinerja Pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan PDRB Perkapita sampai saat ini sudah 29 IRTP yang telah memiliki PIRT. Adapun untuk jumlah Industri Kecil menengah di Kabupten Morowali juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: DPMPTSP, Tahun 2023

Gambar 2.61
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Seiring dengan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang semakin meningkat setiap tahun walaupun di tiga tahun terakhir pertumbuhannya tidak terlalu signifikan namun hal ini tetap berdampak terhadap Kapasitas Produksi setiap tahun, seperti yang kita lihat bahwa kapasitas produksi IKM Tahun 2019 (Rp. 5.374.317), tahun 2020 (Rp. 236.09.9513), tahun 2021 (Rp. 236.271.765) dan tahun 2022 (Rp. 236.460.415). adapun nilai produksi IKM juga mengalami peningkatan setiap tahun seperti disajikan pada grafik dibawah ini:



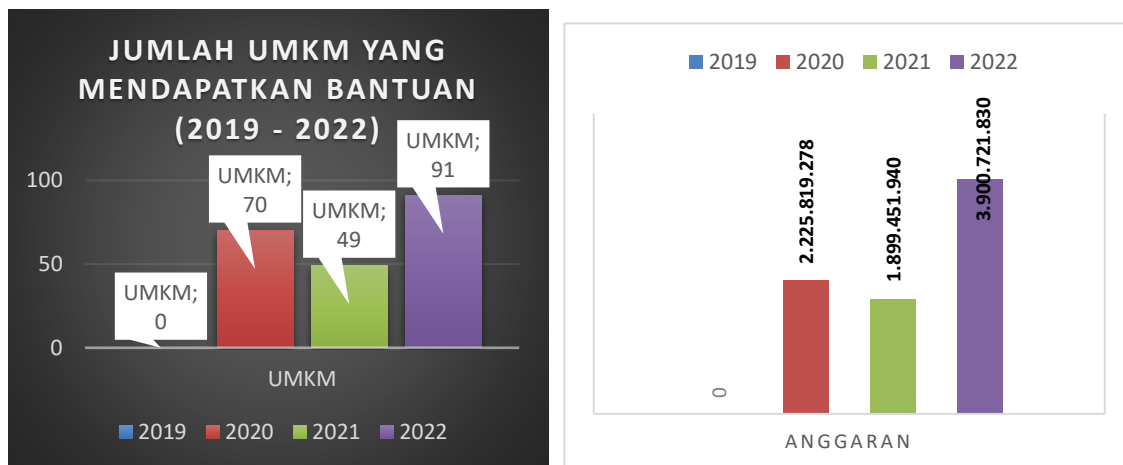
Sumber: DPMPTSP, Tahun 2023

Gambar 2.62
Nilai Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Adapun program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan PDRB Perkapita dikabupaten morowali adalah Program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Rendahnya Ketimpangan Antara Masyarakat

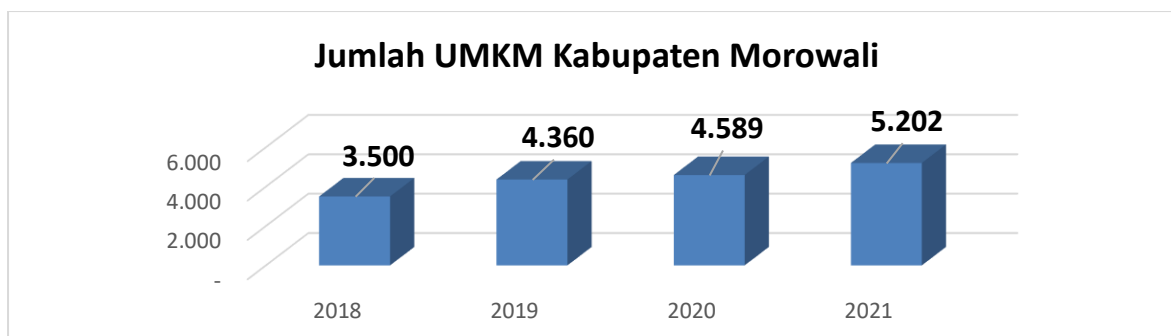
Ketimpangan antara masyarakat di kabupaten Morowali jika melihat data yang disajikan dan apabila dibandingkan dengan data awal tahun 2018 menunjukan kinerja pemerintah yang baik, walaupun di tahun 2019 tingkat ketimpangan masih tetap sama dengan tahun sebelumnya akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan tapi perlu untuk diapresiasi, data yang disajikan masih menunjukan tingkat ketimpangan yang tinggi jika kita melihat dari target RPJMD yang mengharuskan berada diangka 0,240 pada tahun 2022 sehingga Pemerintah daerah terus berupaya dalam menurunkan indeks ketimpangan dikabupaten morowali melalui berbagai program, ada beberapa program yang sudah dilakukan sampai saat ini diantaranya berupa bantuan peralatan usaha yang diberikan kepada Pelaku UMKM.



Sumber: Dinas Koperasi dan Perubahan RKA Dinas Koperasi, Tahun 2023

Gambar 2.63
Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2019-2022

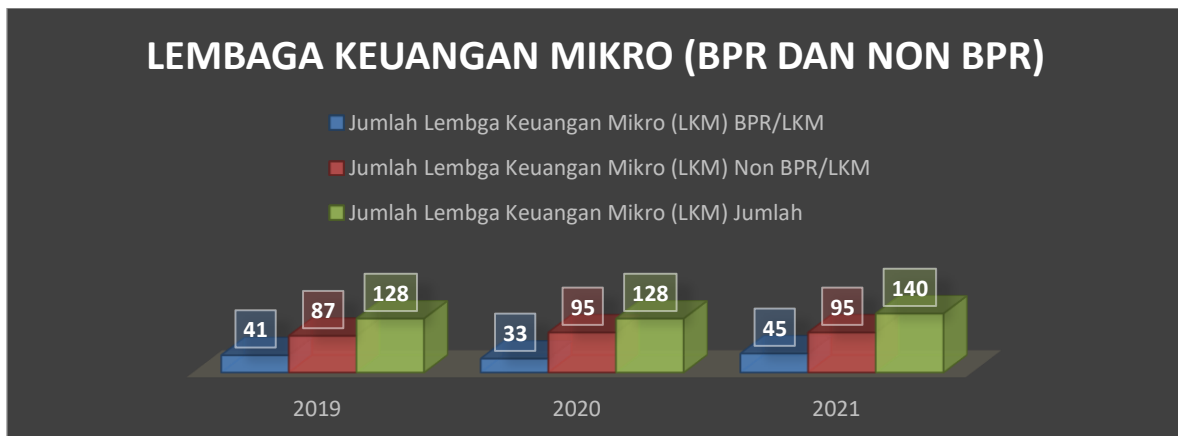
Gambar di atas menunjukkan jumlah bantuan peralatan bagi UMKM yang diberikan setiap tahun, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebanyak 201 UMKM yang mendapatkan bantuan dengan alokasi anggaran Rp8.025.993.048,-. Disamping pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi setiap UMKM pemerintah juga melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM yang tujuannya untuk meningkatkan SDM bagi pelaku UMKM dan Kualitas Produksinya. Dibuktikan dengan pelatihan bagi UMKM sebanyak 190 Orang selama 3 tahun terakhir Tahun 2020 (40 Orang), 2021 (80 Orang) dan tahun 2022 (70 Orang). pada tahun 2022 pemerintah juga memberikan bantuan Motor untuk komunitas ojek yang ada dikabupaten morowali sebanyak 50 Unit dengan anggaran Rp1.067.900.000. jumlah UMKM kabupaten morwoali mengalami peningkatan setiap tahun seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas Koperasi dan Perubahan RKA Dinas Koperasi, Tahun 2023

Gambar 2.64
Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2019-2022

Adapun jumlah BPR/LKM dan Non BPR/LKM kondisi tahun 2019 sampai 2022 adalah sebagai berikut:



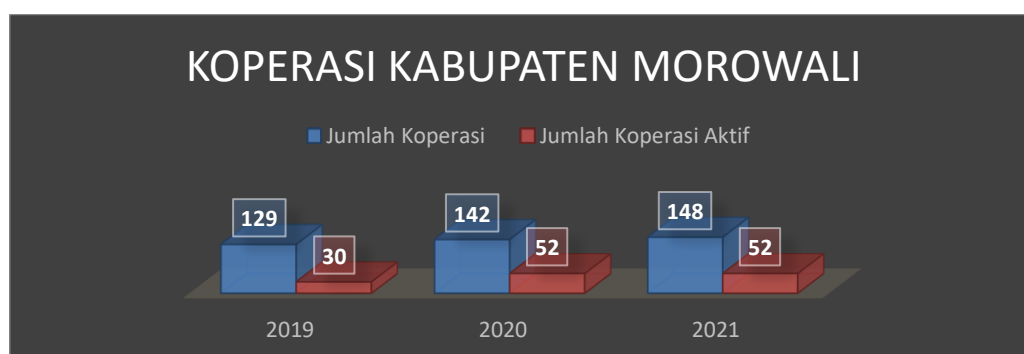
Sumber: Dinas Koperasi dan Perubahan RKA Dinas Koperasi, Tahun 2023

Gambar 2.65

Lembaga Keuangan Mikro (BPR dan Non BPS)

Adapun Program yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk menurunkan ketimpangan antara masyarakat di Kabupaten Morowali adalah Program Pengawasan dan Pemerikansaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro serta program pengembangan UMKM.

Selain pemberian bantuan usaha berupa peralatan dan pembinaan SDM, pemerintah daerah juga ikut memberikan bantuan Permodalan bagi koperasi yang ada dikabupaten morowali dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000.000,- pada tahun 2022 dan pelatihan manajemen koperasi pada tahun 2020 (40 Orang), 2021 (30 Orang) dan tahun 2022 (50 Orang). Adapun jumlah koperasi dikabupaten morowali disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Koperasi dan Perubahan RKA Dinas Koperasi, Tahun 2023

Gambar 2.66

Jumlah Koperasi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021



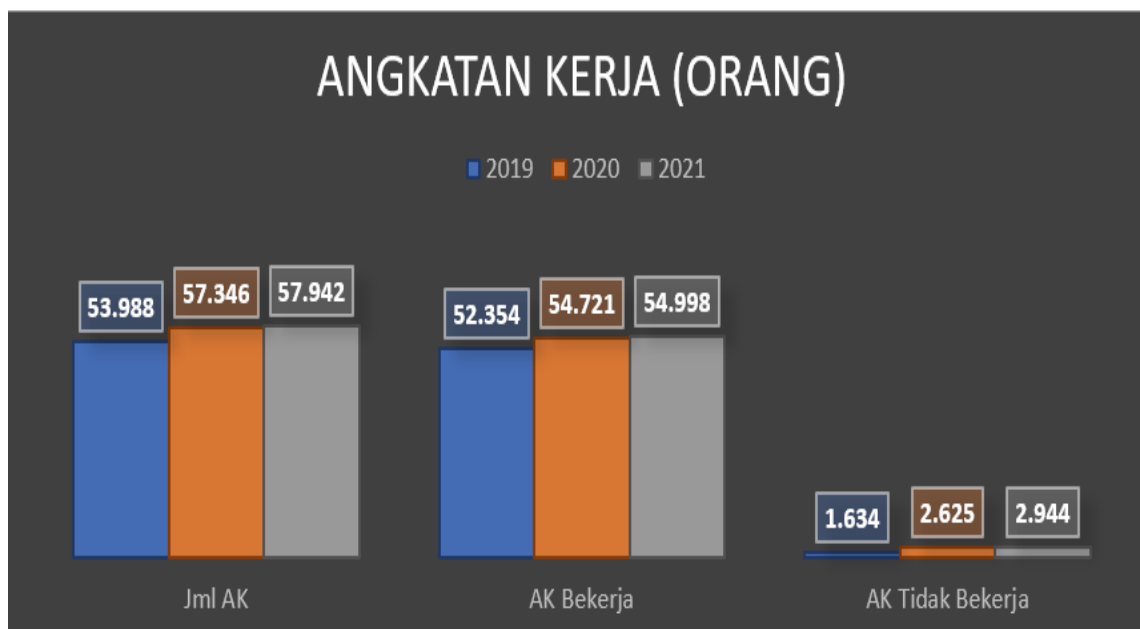
Menurunnya Jumlah Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja, dari dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 Capaian TPT sebesar 3,73 % berada pada range target 3 sampai 5 % dengan kata lain capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian ini didukung dengan kondisi geografis Kabupaten Morowali yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah khususnya dari sektor pertambangan, kondisi inilah yang seharusnya dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Untuk mencapai target pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja, ada beberapa program yang ditetapkan dalam RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah seperti diuraikan sebagai berikut program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja dan program hubungan industrial.

Pelaksanaan program-program tersebut diatas memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan ketenagakerjaan dimana Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2021 berada pada angka 68,93%, hal ini didukung oleh semakin luasnya kesempatan kerja sebagai dampak dari semakin berkembangnya industri pertambangan yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun adanya bencana non alam pada tahun 2020 berimbas pada meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2020 yaitu 5, 21 yang sebelumnya berada pada angka 3,03 pada tahun 2019. Salah satu yang menjadi tantangan pemerintah daerah saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga Kerja, oleh sebab itu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Pemerintah kabupaten Morowali telah melakukan Pelatihan pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sejauh ini BLK baru melatih 175 orang pada 2021 dan 2022. Capaian ini memang masih rendah namun untuk menjawab tantangan tentang Sumber Daya Manusia pencari kerja, Pemerintah Daerah telah membuka Pendidikan D1-Vokasi Industri kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2022. Saat ini Pendidikan Vokasi industry telah mendidik 105 orang putra-putri daerah yang terbagi dalam 3 program studi, instalasi listrik 35 Orang, Analisis Kimia Logam 35 orang dan mekanik mesin 35 Orang.

Selain data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada sasaran ini ditampilkan pula data jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Morowali kurun waktu 3 tahun terakhir, seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini :



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2023

Gambar 2.67

Jumlah Angkatan Kerja (orang) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan Persentase angkatan kerja yang bekerja terhadap angkatan kerja tahun 2019 (96,97 %), tahun 2020 (95,23 %) dan tahun 2021 (94,92 %). Kondisi ini disebabkan karena jumlah penduduk kabupaten morowali yang bertambah sangat pesat akibat adanya perusahaan pertambangan di kabupten morowali yang berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kabupaten Morowali semakin meningkat setiap tahun. Adapun data TPAK kabupaten Morowali pada tahun 2019 (62,60 %) tahun 2020 (64,70 %) dan tahun 2021 (68,93 %). Sedangkan untuk data pencari kerja yang terdaftar seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:



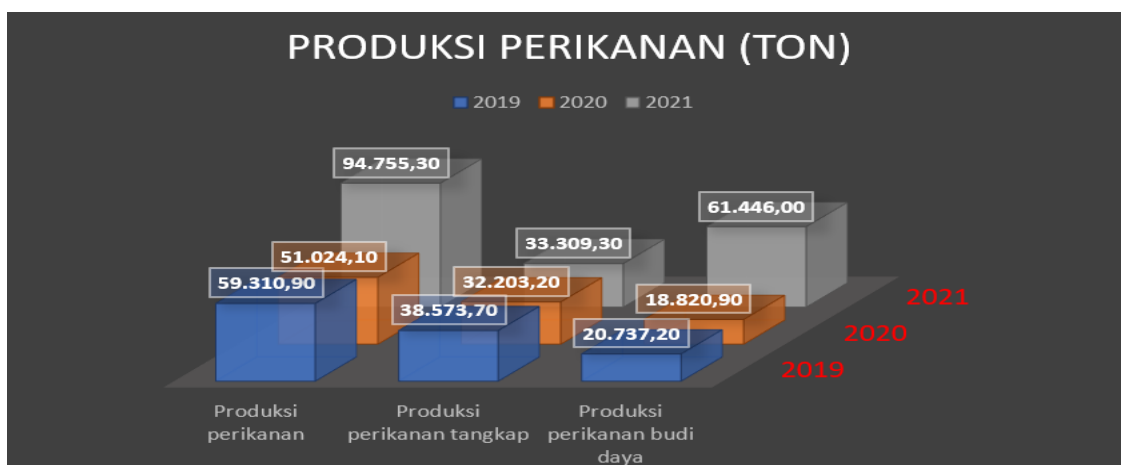
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2023

Gambar 2.68

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (orang) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan perikanan masih berfluktuasi karena mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi bencana non alam yaitu pandemi covid 19 berdampak pada produksi perikanan yang berimbas pada melemahnya nilai tukar nelayan yang semula berada di angka 114,69 pada tahun 2019 turun ke angka 99,47 pada tahun 2020 sehingga tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan yaitu 103. Dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2021 diangka 104,56, pencapaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah disektor perikanan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2023

Gambar 2.69

Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 perikanan budidaya berkontribusi lebih besar terhadap produksi perikanan dibandingkan dengan perikanan tangkap. Hal ini menempatkan Kontribusi Sektor Perikanan dan pertanian terhadap PDRB pada angka 1,84 % ditahun 2019, -2,77% tahun 2020 dan 3,22% pada tahun 2021. Adapun program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolaan sumber daya kelautan dan program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

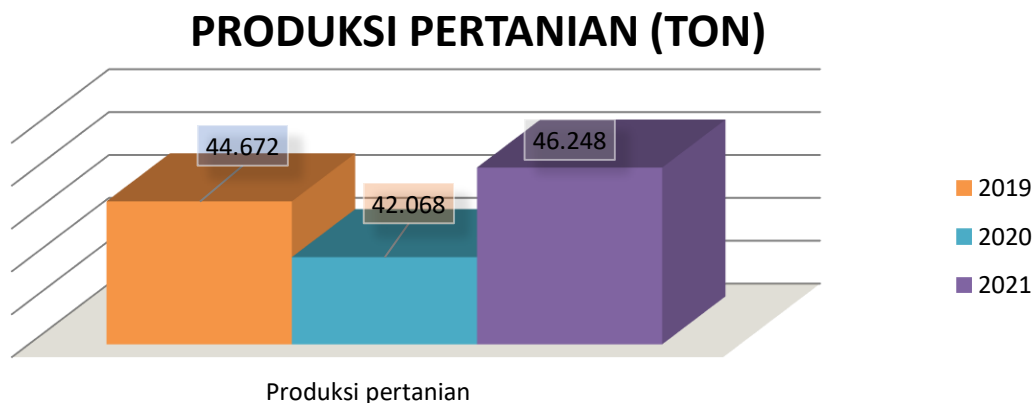
Untuk peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NT) demi mencapai kesejahteraan paya nelayan pemerintah daerah terus mensuport melalui program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, misalnya pemberian bantuan alat tangkap berupa perahu, mesin tempel, pukat, fish finder dan lain-lain. Selain itu untuk mulai tahun 2021 pemerintah meluncurkan program BPJS nelayan yang mengcover sebanyak 8.000 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp.806.400.000,- Selanjutnya pada tahun 2022 kepesertaan bertambah menjadi 13.000 orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.260.000.000-, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan mengingat resiko pekerjaan yang cukup tinggi. Adapun alokasi anngaran untuk dinas perikanan adalah sebagai berikut: Tahun 2019 (Rp. 12.936.267.308,-), tahun 2020 (Rp.22.758.305.000,-), Tahun 2021 (Rp.34.562.841.626,-) dan Tahun 2022 (Rp. 33.378.758.482)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Sejauh ini kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun awal 2018 (5,48%) sedangkan tahun 2019 (1,84 %), tahun 2020 (-2,77 %) dan tahun 2021 (3,22 %). Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan itu akibat kontribusi sektor pertambangan yang

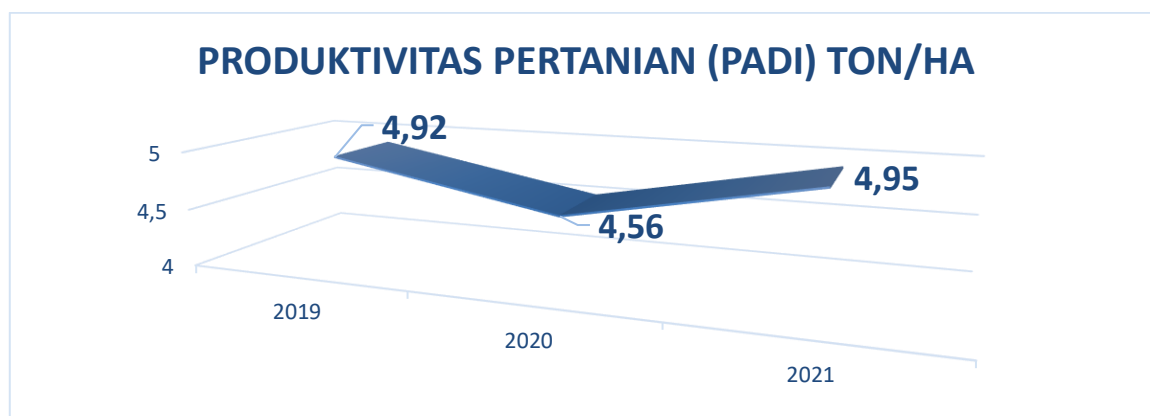
semakin tinggi sehingga secara akumulasi mempengaruhi besaran kontribusi pertanian terhadap PDRB dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi kondisi pertanian di kabupaten morowali saat ini. Namun kondisi ini menjadi tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian setiap tahun, pada grafik dibawah ini disajikan produksi pertanian 3 tahun terakhir :



Sumber: Data BPS (Kabupetn Morowali dalam Angka Tahun 2020,2021, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Tahun 2023

Gambar 2.70
Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar di atas produksi pertanian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020, sementara luas panen tahun 2019 (9.068,94 Ha), tahun 2020 (9.225 Ha) dan tahun 2021 (9.343 Ha). Dan produktifitas pertanian seperti pada grafik dibawah ini:



Sumber: Data BPS (Kabupetn Morowali dalam Angka Tahun 2020,2021, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Tahun 2023

Gambar 2.71
Produktivitas Pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

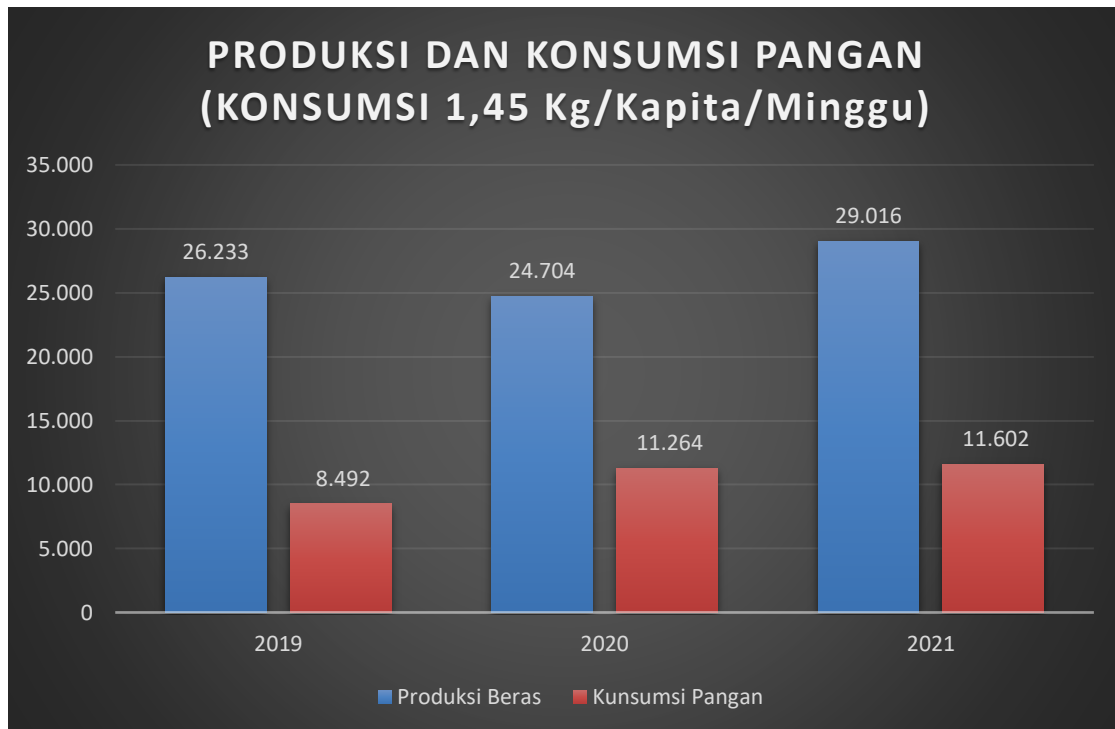


Meningkatkan kesejahteraan petani merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, salah satunya yaitu dengan memberikan perlindungan kepada petani dengan mengikutsertakan petani pada BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2022 jumlah kepesertaan BPJS petani berjumlah 25.339 org dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.108.342.400,-. Program Panen Gratis salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp.9.695.757.440,-. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian yang nantinya akan berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu sejumlah pembangunan fisik dan pemberian bantuan kepada petani terus dilakukan setiap tahunnya. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah pembangunan fisik dan alokasi bantuan yang telah dilaksanakan melalui dana APBD sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun alokasi anggaran untuk dinas pertanian dan ketahanan pangan adalah Tahun 2019 (Rp.19.529.500.854,-), tahun 2020 (Rp.36.783.359.388,-), Tahun 2021 (Rp.55.571.741.450,-) dan Tahun 2022 (Rp.68.544.264.678,-)

Meningkatkan Ketersediaan Dan Mutu Pangan

Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi dalam penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman tersebut berasal apakah dari tanaman, ternak atau ikan bagi keluarga dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan dalam keluarga sangat dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan. Capaian skor pola pangan harapan pada tahun 2021 sebesar 80,1 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Program Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2021 mencapai angka 8 % meningkat sebesar 2% dari kondisi awal tahun 2019 yang hanya sebesar 6%. Sementara persentase daerah rawan pangan yang tertangani meningkat menjadi 33 % pada tahun 2021 meningkat dari kondisi awal yang besarnya hanya 20%. Demikian juga pada indikator Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang pada tahun 2019 berada pada angka 20% meningkat menjadi 32 % pada tahun 2021.

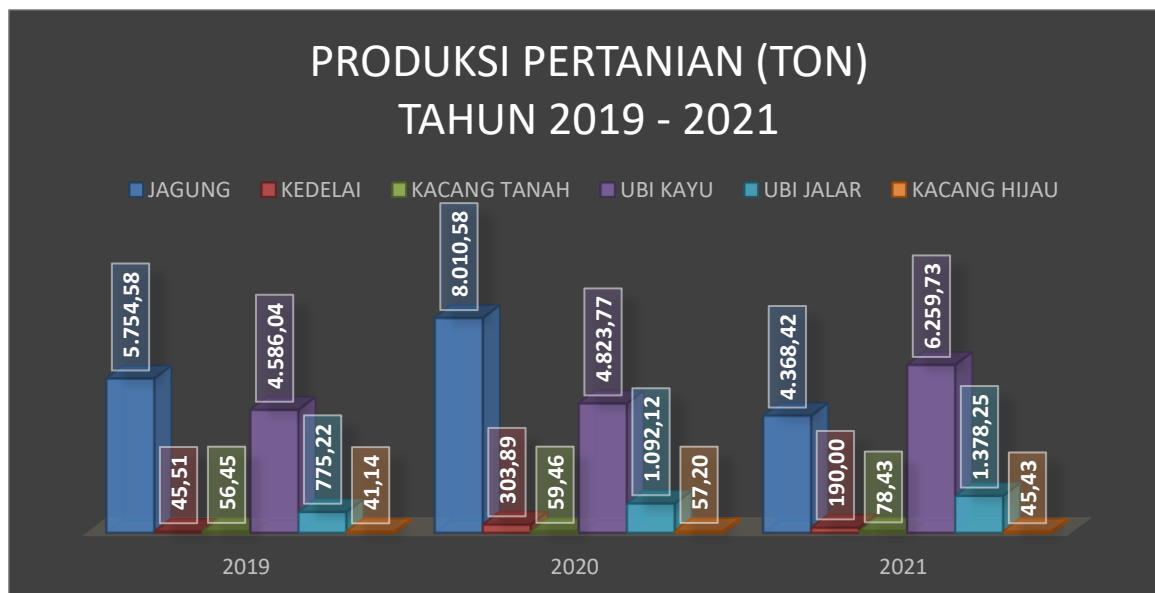
Kondisi ini disebabkan oleh optimalisasi distribusi penyediaan dan penyaluran pangan pokok, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan dan melalui penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan secara masif.



Sumber: BPS (Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2020,2021,Data Diolah Bid. Ekonomi dan SDA Bapelitbangda dan Survei Soisal Ekonomi Nasional)

Gambar 2.72
Produksi dan Komsumsi Pangan (Konsumsi 1,45 Kg/Kapita/Minggu)
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

Gambar di atas memberikan gambaran Produksi beras jika dibandingkan dengan konsumsi pangan (asumsi 1,45 Kg/Kapita/Minggu) maka Surplus pangan sebanyak 17.741 Ton pada tahun 2019, 13.440 Ton pada Tahun 2020 dan 17.414 Ton pada tahun 2021, Ini menunjukan jika produksi beras mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten morowali yang mengalami peningkatan yang begitu signifikan setiap tahun. Namun kondisi ini sangat memprihatinkan karena tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dikabupaten morowali karena distribusi pangan yang tidak merata.



Sumber: BPS (Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2020,2021,Data Diolah Bid. Ekonomi dan SDA Bapelitbangda dan Survei Soisal Ekonomi Nasional)

Gambar 2.73
Produksi Pertanian (Ton) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2021

Adapun program yang ditetapkan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran ini adalah Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan dan program pengawasan keamanan pangan.

Menurunnya Penduduk Miskin

Kemiskinan (poverty) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Merujuk pada tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali masih mengalami fluktuasi kurun Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 16,61 persen, dan menurun hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 13,43 persen Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa, dan Tahun 2020 sebanyak



16,50 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 17,07 ribu jiwa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah adanya mobilisasi penduduk secara masif dari luar daerah ke Kabupaten Morowali, sebagai dampak dari semakin berkembangnya industri pertambangan. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, melalui program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait seperti bantuan IKM dan UKM, bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan, bantuan rumah layak huni dan lain lain dengan tetap memperhatikan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.

Disektor perdagangan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau pemerintah daerah melakukan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai 2022. Beberapa program dalam urusan perdagangan dan transmigrasi telah ditetapkan dalam RPJMD dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program perencanaan Kawasan transmigrasi, program pembangunan Kawasan transmigrasi serta program pengembangan Kawasan transmigrasi.

2.2.3 Evaluasi Misi 3 RPJMD

Misi ini berfokus pada pewujudan peningkatan SDM yang cerdas, kreatif dan bertaqwa, sehingga memiliki daya saing dan inovatif, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan dan penambahan sarana pendidikan serta pemberian beasiswa. Hasil evaluasi misi 3 menunjukkan terdapat 7 indikator atau sebesar 53,85% diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Harapan lama sekolah, Rata-rata lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Angka Stunting, Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta indikator Peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya 4 indikator atau sebesar 30,77% yang tidak diketahui capaiannya, dikarenakan data capaian yang tidak tersedia diantaranya Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan, Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan dan



Indeks Kerukunan Beragama serta indikator indeks pendidikan. Dan terdapat dua indikator dengan status capaian perlu upaya keras yakni indikator indeks Kesehatan dan indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.

Indikator tujuan misi 3 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 72,02 poin ditahun 2019 sampai tahun 2020 meningkat menjadi 72,55 poin. Untuk status capaian indeks pembangunan manusia sampai dengan tahun 2022 sebesar 96,73 persen. Berdasarkan ketetapan permendagri 86 Tahunn 2027 masuk dalam ukuran tercapai/melampaui. Hasil analisis evaluasi RPJMD Misi ke-tiga dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.57
Evaluasi Capaian Indikator Misi 3 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,02	72,21	73,00-74,00	74,00-75,00	75,00-76	75,00-76	72,02	72,21	72,29	72,55	100,00	100,00	99,03	98,04	96,73	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.1.1	Indeks Pendidikan	NA	NA	50,00-55,00	50,00-55,00	50,00-55,00	50,00-55,00	NA	NA	55,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	
3.1.1.2	Harapan lama sekolah	12,89-13,00	13,30-13,50	13,50-14,00	14,00-14,30	14,30-14,50	14,5	13,31	13,34	13,35	13,36	103,26	100,30	98,89	95,43	92,14	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.1.3	Rata-rata lama Sekolah	9,11	9,11-9,40	9,40-9,70	9,70-10	10-10,30	10-10,30	9,11	9,33	9,34	9,35	100,00	102,41	99,36	96,39	92,57	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.2.1	Indeks Kesehatan	NA	NA	69-69,33	69,33-69,50	69,50-70	69,50-70	NA	NA	30,00	40,00	NA	NA	43,48	57,40	57,55	PERLU UPAYA KERAS	▼
3.1.2.2	Usia Harapan Hidup	68,77	68,77-69	69-69,33	69,33-69,50	69,50-70	69,50-70	68,82	69,18	69,23	69,23	100,07	100,60	99,34	99,61	99,61	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.2.3	Angka Stunting	34,8	34,80-32	32-30	30-28	28-26	28-26	12,00	8,80	7,80	5,20	(65,52)	(72,50)	(75,63)	(82,67)	(100,00)	TERCAPA I/ MELAMP	●



INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
																	AUI	
3.1.3.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	55,3	60,22	68,55	75,5	100	100	55,3	60,22	14,40	14,08	100,00	100,00	21,00	18,65	18,65	PERLU UPAYA KERAS	▼
3.1.3.2	Peningkatan prestasi olahraga	19	31	31	35	37	37	19	43	0	38	100,00	138,71	-	108,57	102,70	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,71	84,89	85-90	85-90	85-90	85-90	84,71	84,89	85,03	NA	100,00	100,00	100,04	NA	100,04	TERCAPA I/ MELAMP AUI	●
3.1.6.1	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	NA	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	■
3.1.6.2	Persentase Kesenian Lokal yang	NA	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	■



INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
	dilestarikan																	
3.1.7.1	Indeks Kerukunan Beragama	NA	55-60	60-65	65-70	70-80	70-80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Sumber: hasil analisis, tahun 2023



Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang ditetapkan pada misi 3 adalah Indeks Pendidikan, Harapan lama sekolah, dan indikator Rata-rata lama Sekolah. Untuk target indeks tingkat capainnya tidak dapat diketahui. Sedangkan dua indikator lainnya yakni indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah status capaiannya tercapai/melampaui.

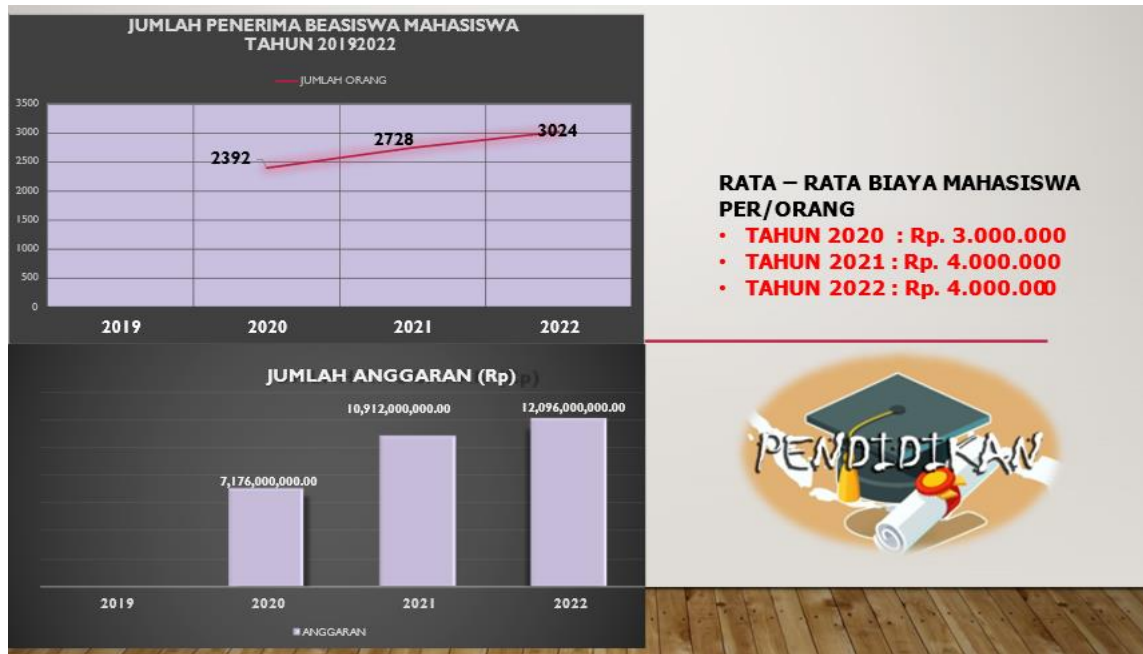
Data diatas menunjukkan Kabupaten Morowali Harapan lama Data Awal (2018) 12,89 tahun kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami kenaikan pada Tahun 2022 sebesar 13,36 tahun . Hal ini menunjukan keseriusan Pemerintah dalam penanganan Pendidikan, dimana selama empat tahun ini anggaran pendidikan terus bertambah bahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan anggaran pendidikan disetiap daerah harus 20% dari APBD juga sudah terpenuhi.

Salah satu indikator tunggal lainnya untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Penetapan usia penghitungan rata-rata lama sekolah mulai usia 25+ merupakan perubahan dari metode penghitungan sebelumnya yang menggunakan batasan usia 15+.

Sesuai dengan target pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994, rata-rata lama sekolah penduduk diharapkan dapat mencapai sebesar 9 tahun (pendidikan dasar), yaitu minimal tamat jenjang pendidikan dasar atau tamat SMP. seperti yang ditunjukkan pada Tabel diatas bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2022 mencapai 9,60 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas telah mencapai kelas 3 SMP (kelas XI), yaitu telah tamat jenjang Sekolah Menengah Pertama hal ini merupakan upaya dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat tidak putus sekolah uapaya-upaya yang telah dilakukan

Pemerintah Daerah salah satunya dengan Program Pendidikan Gratis baik dari tingkat Dini sampai ke jenjang Mahasiswa.

Data Dukung Capaian Pembangunan Berdasarkan Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2018-2023 Bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber Data Diolah: Dinas Pendidikan Daerah

Gambar 2.74
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kuliah Tahun 2020-2022

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa keseriusan Pemerintah Daerah dalam Pendidikan gratis dalam hal ini Pemberian Beasiswa Mahasiswa yang setiap tahun adanya kenaikan jumlah mahasiswa pada tahun 2020 sebanyak 2392 orang dan ditahun 2022 sebanyak 3024 orang. Untuk biaya Mahasiswa pu mengalami kenaikan dari Tahun 2020 sebanyak Rp.3.000.000 menjadi Rp. 4.000.000 ditahun 2022.

Pemberian Beasiswa Mahasiswa ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemda Morowali terhadap kualitas pendidikan generasi muda. Sehingga memprioritaskan aspek pendidikan menjadi salah satu jalan untuk mencetak sumber daya yang berkualitas.



Sumber Data Diolah: Dinas Pendidikan Daerah

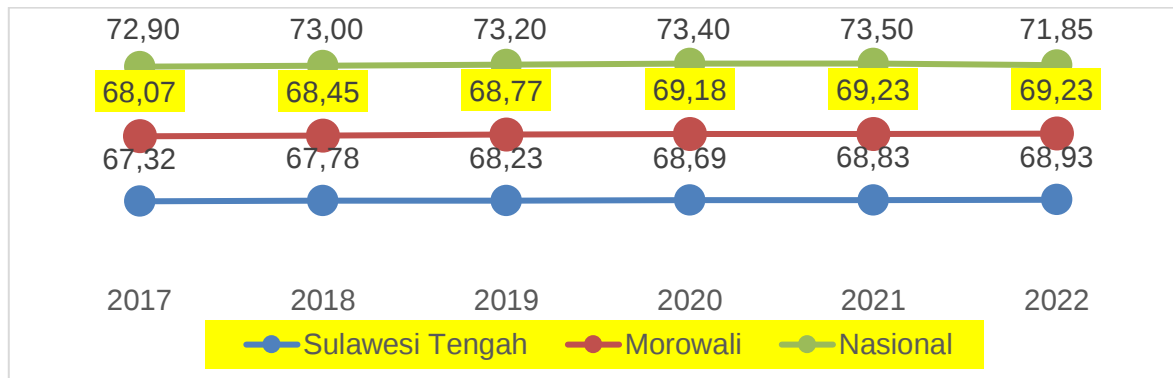
Gambar 2.75
Bantuan Tablet Pembelajaran Bagi Siswa di Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2022

Selain Biaya beasiswa mahasiswa, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan juga memberikan Bantuan Tablet bagi siswa seperti grafik diatas, tujuan pemberian Tablet Pembelajaran ini sebagai buku elektronik (e-book) untuk pembelajaran offline siswa di daerah kepulauan yang susah dijangkau jaringan internet. Pemberian bantuan Tablet Pembelajaran Siswa baru dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan jumlah 1.200 unit tablet dan di tahun 2022 sebanyak 500 unit, adanya pengurangan jumlah pada tahun 2022.

Indikator Kesehatan

Beberapa indikator kesehatan yang termuat dalam misi 3 RPJMD Kabupaten Morowali diantaranya Indeks Kesehatan, Usia Harapan Hidup, Angka Stunting. Untuk target Indeks Kesehatan terdapat perbedaan angka yang sangat signifikan dari target yang ditetapkan di RPJMD Kabupaten Morowali dan capaian berdasarkan hasil realisasi dari Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB bahwa untuk realisasi Indeks Kesehatan yang ada didasarkan pada rumus yang telah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan dengan menggunakan 12 indikator Kesehatan. Sehingga perlunya penyesuaian Kembali antara target di RPJMD dan hasil Realisasi dari Dinas. Selanjutnya untuk capaian indikator Usia Harapan Hidup dalam kurun tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak

signifikan atau melambat, dan ditahun 2022 tidak terjadi peningkatan UHH. Kondisi Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2022 masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih di bawah rata-rata Nasional. Berdasarkan realisasi Usia Harapan hidup dari data awal cenderung naik walaupun tidak signifikan artinya dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, ada kemajuan dalam aspek Kesehatan masyarakat (*public health*).

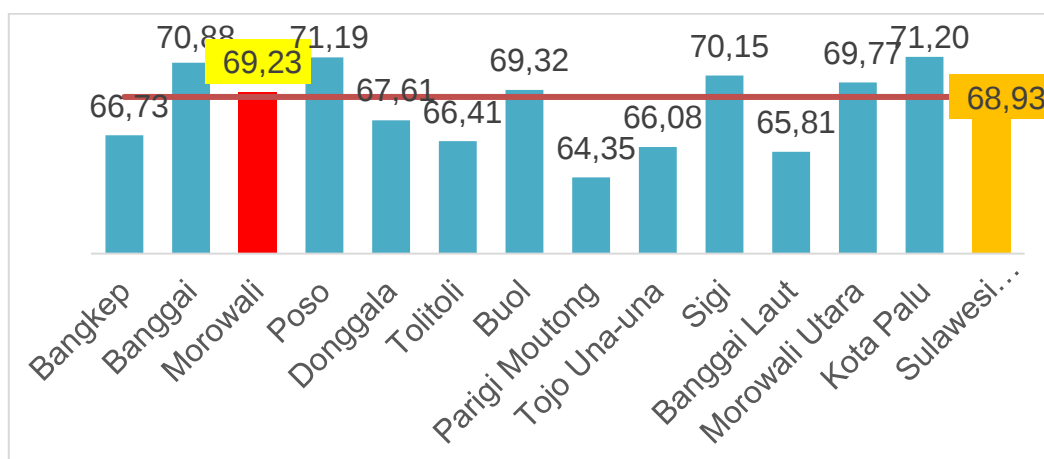


Sumber: BPS, data diolah tahun 2023

Gambar 2.76

Perbandingan UHH Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

Gambaran di bawah ini menunjukkan perbandingan usia harapan hidup dengan kabupaten lain. Dimana Kota Palu pada tahun 2022 berada urutan pertama dengan 71,19 Tahun UHH dan Kabupaten Morowali berada di urutan ke 6 UHH tertinggi yaitu 69,23 pada tahun 2022, masih berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 68,93 pada Tahun 2022.



Sumber: BPS, data diolah tahun 2023

Gambar 2.77

Perbandingan UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

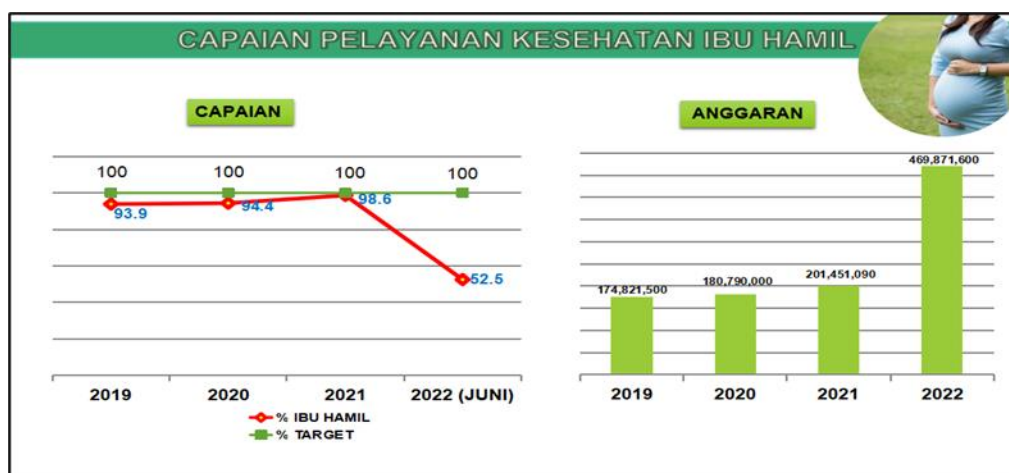
Dari gambaran diatas perlu adanya langkah-langkah atau startegi dari Pemerintah Daerah bisa mencapai UHH yang ditargetkan RPJMD yaitu 70 tahun melalui paradigma sehat dalam layanan kesehatan di antaranya pola pikir masyarakat, penguatan layanan kesehatan bersifat preventif dan promotif.

Usia harapan hidup berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup dihitung dengan angka kematian menurut usia, data tersebut dapat diperoleh dari catatan registrasi kematian dalam waktu bertahun-tahun sehingga dapat dibuat tabel kematian.

Selanjutnya untuk indikator angka prevalensi Stunting di Kabupaten Morowali Sejak 2019 hingga Tahun 2021 turun secara signifikan, Diketahui dari angka 34% persebaran stunting turun menjadi 12% pada tahun 2019, dan Tahun 2020 angka stunting kembali menurun hingga 7,7 % dan Tahun 2021 menurun 5,20%. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa bagi pemerintah daerah dalam upaya konvergensi penurunan stunting.

Walaupun Capaian ini sudah melebihi target dari RPJMD pada Tahun 2021 7,60-7,10% tetapi Pemerintah daerah tetap berupaya agar Penurunan Konvergensi Stunting menurun lagi karena pada tahun 2022 lokus bertambah menjadi 44 desa dibandingkan tahun 2021 hanya 17 desa lokus.

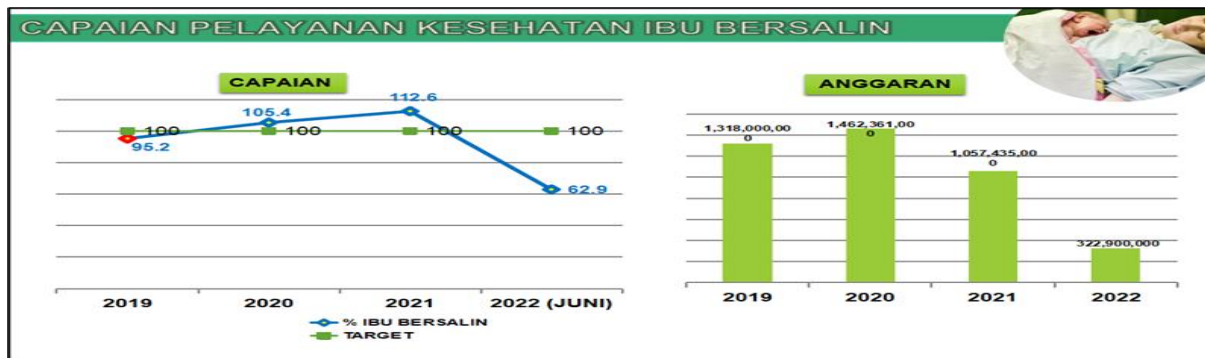
Data Dukung Capaian Pembangunan Berdasarkan Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2018-2023 Bidang Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber Data Diolah : Dinkes

Gambar 2.78
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2019-2022

Dari grafik di atas menunjukkan Pelayanan Ibu hamil sangat tinggi setiap tahun ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memeriksa kandungan ke Pelayanan kesehatan, selain itu ketersediaan Tenaga kesehatan yang tersebar diwilayah baik di daratan maupun kepulauan. Pada tahun 2022 data belum keseluruhan masuk masih di posisi bulan juni.

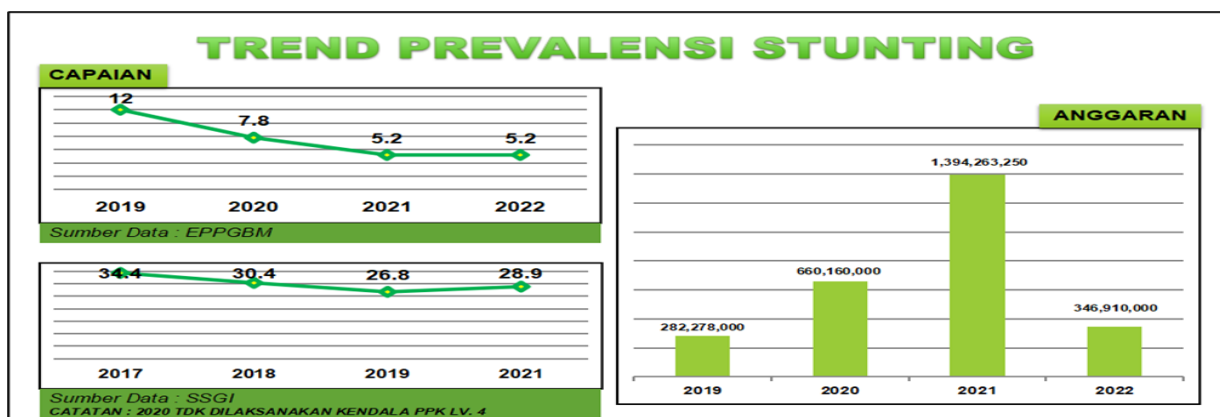


Sumber Data Diolah : Dinkes

Gambar 2.79

Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2019-2022

Dari grafik diatas menunjukkan Pelayanan Ibu bersalin sangat tinggi setiap tahun pada tahun 2020 target 100% capaian 106,4 dan pada dan 2021 target 100% dan capaian 112,6 melebihi target ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melahirkan melalui tenaga kesehatan bukan lagi ke dukun, selain itu ketersediaan Tenaga kesehatan yang tersebar diwilayah baik di daratan maupun kepulauan. Pada tahun 2022 data belum keseluruhan masuk masih di posisi bulan juni.



Sumber Data Diolah : Dinkes

Gambar 2.80

Trend Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022



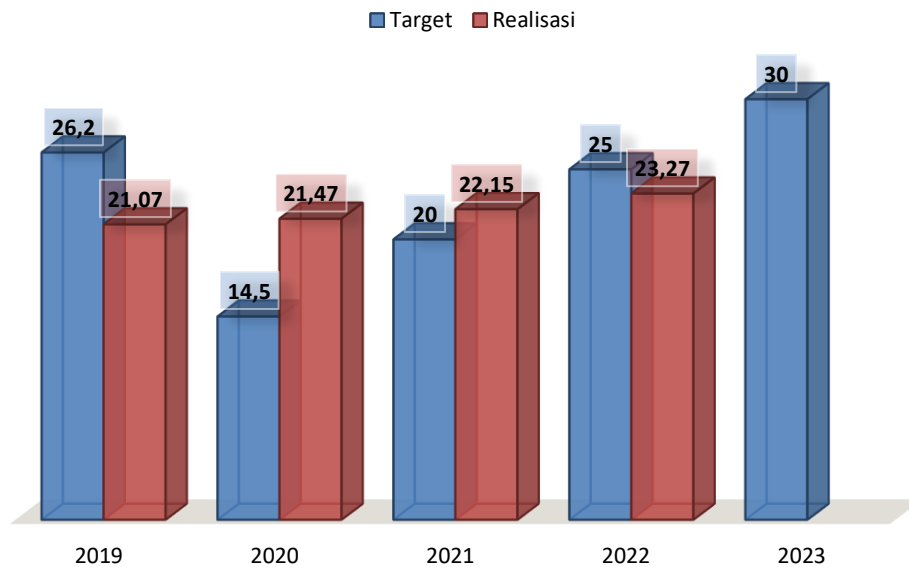
Data realisasi anggaran penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Morowali ditahun 2019 sebesar Rp282.278.000, meningkat signifikan ditahun 2021 sebesar Rp1.394.263.250, anggaran yang cukup besar tersebut berdampak pada penurunan prevalensi stunting menjadi 5,20 persen. Angka yang menurun tersebut kemudian dilakukan penyesuaian anggaran oleh Pemerintah Daerah dengan menurunkan menjadi Rp346.910.000.

2.2.4 Evaluasi Misi 4 RPJMD

Misi berfokus untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan olahraga. Evaluasi misi 2 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan terdapat empat indikator atau 57,14 persen dengan status capaian Tercapai/Melampaui yakni indikator Rasio elektrifikasi, Persentase RT berakses air bersih, Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi dan Presentase Koneksi Internet Desa. Kemudian satu indikator dengan status capaian akan tercapai yakni Presentase Rumah Layak Huni, juga terdapat satu indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk indikator tujuan misi satu yakni Indeks Infrastruktur Kabupaten capaiannya tidak dapat diketahui. Hal ini disebabkan karena data capaian indikator terkait tidak tersedia. Indikator indeks kualitas infrastruktur menunjukkan adalah pengukuran yang menjelaskan tentang kualitas infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan infrastruktur daerah masih harus menjadi prioritas pembangunan daerah morowali kedepan. Sebagai kawasan industri, infrastruktu yang harus dikembangkan adalah infrstruktur yang menyesuaikan dengan aktivitas industri. Jika hal ini diabaikan infrastruktur yang dibangun tidak akan bertahan lama, karena kemampuan yang tidak sesuai dengan fungsi. Sedangkan untuk indikator infrastruktur dasar rumah tangga capaiannya sesuai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Dari hasil capaian kinerja Pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada menunjukkan capaian Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terjadi peningkatan dari tahun 2019 81,07% dan di Tahun 2020 naik menjadi 149,93% namun pada Tahun 2021 mengalami Penurunan Capaian disebabkan karena adanya Refocusing Anggaran Untuk penanganan Virus Covid-19 di Kabupaten

Morowali sedangkan di Tahun 2022 baru mencapai 89% karena merupakan data sementara berdasarkan data realisasi Triwulan 3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dan diagram berikut ini :



Sumber Data Diolah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Gambar 2.81

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Kab +NEGARA)

Pertumbuhan kebutuhan akan rumah baru dan fasilitas Publik yang semakin meningkat tiap tahunnya perlu diikuti dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Kelengkapan PSU terkadang menjadi kendala dalam pembangunan perumahan. Kondisi lingkungan dan PSU yang di bawah standar dapat membuat semakin buruknya kondisi perumahan. Standar prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan yang dibutuhkan salah satunya yaitu prasarana jaringan Listrik. Pada tabel dibawah terlihat pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dari tahun ke tahun semakin meningkat dilihat dari Capaian Rasio Elektrifikasi dari Tahun 2019 98,3 % dan di Tahun 2022 telah mencapai 99,16% selain itu juga adanya program unggulan Bupati Morowali dengan bantuan meteran gratis bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga target di tahun 2023 bisa Tercapai dengan maksimal.



Tabel 2.58
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Keluarga			Rasio Elektrifikasi (%)			
			Berlistrik		Belum Berlistrik	PLN	NON PLN	Belum Berlistrik	Total Rasio Elektrifikasi
			PLN	NON PLN					
1	Menui Kepulauan	4.540	2.303	2.215	22	50,73	48,79	0,48	99,52
2	Bungku Selatan	4.441	1.645	2.643	153	37,04	59,51	3,45	96,55
3	Bahodopi	19.297	19.057	0	240	98,76	0,00	1,24	98,76
4	Bungku Pesisir	2.222	1.596	466	160	71,83	20,97	7,20	92,80
5	Bungku Tengah	10.818	10.516	195	107	97,21	1,80	0,99	99,01
6	Bungku Timur	4.381	4.376	0	5	99,89	0,00	0,11	99,89
7	Bungku Barat	4.927	4.639	181	107	94,15	3,67	2,17	97,83
8	Bumi Raya	5.031	4.846	0	185	96,32	0,00	3,68	96,32
9	Wita Ponda	7.155	6.961	25	169	97,29	0,35	2,36	97,64
TOTAL		62.812	55.939	5.725	1.148	89,06	9,11	1,83	98,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Morowali Tahun 2023

Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 adalah bantuan pengadaan listrik bagi masyarakat miskin. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penerima program ini mencapai 1.287 KK/Orang.

Tabel 2.59
Jumlah Orang Penerima Bantuan Listrik Gratis Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah (Orang)
	<i>Tahun 2019</i>		<i>157</i>
1	Kolono	Bungku Timur	15
2	Bahomoahi	Bungku Timur	3
3	Ululere	Bungku Timur	9
4	Lanona	Bungku Tengah	44



No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah (Orang)
5	Tondo	Bungku Barat	38
6	Topogaro	Bungku Barat	48
	<i>Tahun 2020</i>		20
1	Tersebar	Bungku Barat	10
2	Tersebar	Bungku Timur	10
	<i>Tahun 2021</i>		620
1	Bakala	Bungku Selatan	61
2	Buajangka	Bungku Selatan	61
3	Koburu	Bungku Selatan	70
4	Paku	Bungku Selatan	80
5	Jawi-Jawi	Bungku Selatan	60
6	Buton	Bungku Selatan	61
7	Bungingkela	Bungku Selatan	110
8	Lokombulu	Bungku Selatan	117
	<i>Tahun 2022</i>		490
1	Bakala	Bungku Selatan	154
2	Buajangka	Bungku Selatan	77
3	Bungingkela	Bungku Selatan	51
4	Buton	Bungku Selatan	146
5	Jawi-Jawi	Bungku Selatan	37
6	Desa Paku	Bungku Selatan	25
Total			1.287

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Morowali Tahun 2023

Cakupan jaringan listrik yang dibangun juga meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu faktor meningkatnya rasio elektrifikasi di Kabupaten Morowali. Selain itu pemerintah daerah juga berfokus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Morowali seperti Kecamatan Bungku Selatan.



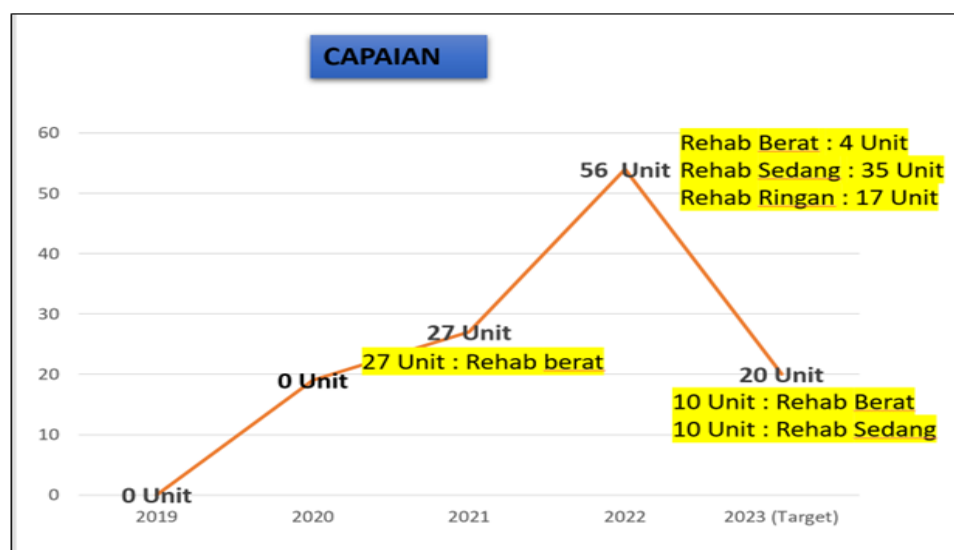
TAHUN 2019			TAHUN 2020		
NO	DESA	PANJANG (M)	NO	DESA	PANJANG (M)
1	Desa Umpanga	1500	1	Desa Larobenu	1500
2	Trans Kabera	2000	2	Desa Bahomoteffe	500
3	Desa Makarti	1500	3	Desa Kabera	5500
Total		5000	4	Trans Umpanga	2000
			Total		9500

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
NO	DESA	PANJANG (M)	NO	DESA	PANJANG (M)
1	Desa Bahoea Reko - Reko	820	1	Desa Kaleroang	293
2	Dusun 3 Desa Makarti Jaya	1400	2	Desa Bahomoleo	270
3	Dusun 5 Desa Makarti Jaya	1600	3	Desa Fonuasingko	1400
4	Trans Umpanga	1500	4	Desa Puungkoilu	258
5	Trans Kabera RT I Desa Bahoea Reko - Reko	1250	5	Trans Umpanga	1500
6	Trans Kabera RT II Desa Bahoea Reko - Reko	1250	6	Jalur 16 Fonuasingko	120
Total		7820	7	Depan Hotel Metro Desa Bente	150
			8	Desa Paku	2100
			9	Dusun Kabera	480
			10	Desa Bente	650
			Total		7221

Sumber Data Diolah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Gambar 2.82
Cakupan jaringan listrik yang dibangun Selama Tahun 2019-2022

Selain melalui program listrik gratis bagi masyarakat miskin, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah melalui perbaikan hunian masyarakat. Seperti diketahui bahwa terjadi beberapa kali bencana alam yang mengakibatkan banyak rumah warga yang mengalami kerusakan. Pemda melalui Dinas PUPR memberikan bantuan rehab rumah bagi masyarakat yang terdampak.



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Gambar 2.83
Capaian Rumah Pasca Bencana Yang di Bangun



Tabel 2.60
Evaluasi Capaian Indikator Misi 4 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
4.1.1	Indeks Infrastruktur Kabupaten	1.25 (Rendah)	1.25 (Rendah)	1.26-2.50 (Sedang)	1.26-2.50 (Sedang)	1.51-3.75 (Tinggi)	1.51-3.75 (Tinggi)	1,25	1,25	NA	NA	100,00	100,00	NA	NA	NA	NA	
4.1.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	26,22	26,22-28	28-30	30-32	32-34	32-34	26,22	21,47	24,55	23,27	100,00	81,88	87,68	77,57	72,72	PERLU UPAYA KERAS	
4.1.1.2	Rasio elektrifikasi	96,2	98-99	98-99	98-99	98-99	98-99	93,71	98,7	97,44	98,17	97,41	100,71	99,43	100,17	100,17	TERCAPA I/ MELAMPAUI	
4.1.1.3	Presentase Rumah Layak Huni	NA	NA	80-85	85-90	90-95	90-95	67,46	72,64	78,25	81,71	100,00	100,00	97,81	96,13	90,79	AKAN TERCAPAI	
4.1.1.4	Persentase RT berakses air bersih	86,99	87-90	90-92	90-92	90-92	90-92	86,99	89,64	93,17	93,17	100,00	114,92	103,52	103,52	103,52	TERCAPA I/ MELAMPAUI	
4.1.2.1	Persentase Desa/Keurahan	75-80	80-85	85-90	85-90	90-95	90-95	59,59	65,15	84,69	92,41	0,79	0,81	1,00	1,02	102,68	TERCAPA I/ MELAMPAUI	



	yang memiliki akses jaringan telekomunikasi																	
4.1.2.2	Presentase Koneksi Internet Desa	58,6	70,6	70,6	75-80	80-90	80-90	53,03	59,09	78,76	86,33	0,90	0,84	1,11	1,07	107,91	TERCAPA I/ MELAMP AUI	

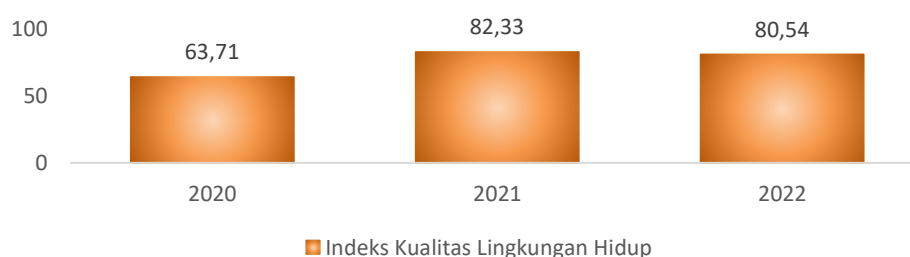
Sumber: hasil analisis, tahun 2023

2.2.5 Evaluasi Misi 5 RPJMD

Fokus misi 5 RPJMD Kabupaten Morowali adalah meningkatkan Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional dan daerah Kabupaten Morowali khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem darat dan laut.

Untuk mencapai misi ini ditetapkan beberapa indikator diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Rawan Bencana, Jumlah Desa Tangguh Bencana, Cakupan Pelayanan Persampahan Kota, Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten serta indikator Angka Kriminalitas. Dari hasil analisis yang diketahui bahwa sebanyak 3 indikator atau 50% dengan status capaian Tercapai/melampaui yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Rawan Bencana serta indikator Angka Kriminalitas. Selanjutnya terdapat 1 indikator dengan status capaian akan tercapai yakni indikator Cakupan Pelayanan Persampahan Kota, dua indikator dengan status capaian perlu upaya keras yakni indikator Indeks Rawan Bencana dan Jumlah Desa Tangguh Bencana.

Tujuan yang ditetapkan dalam misi 5 adalah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana. Fokus utama pada misi ini adalah meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

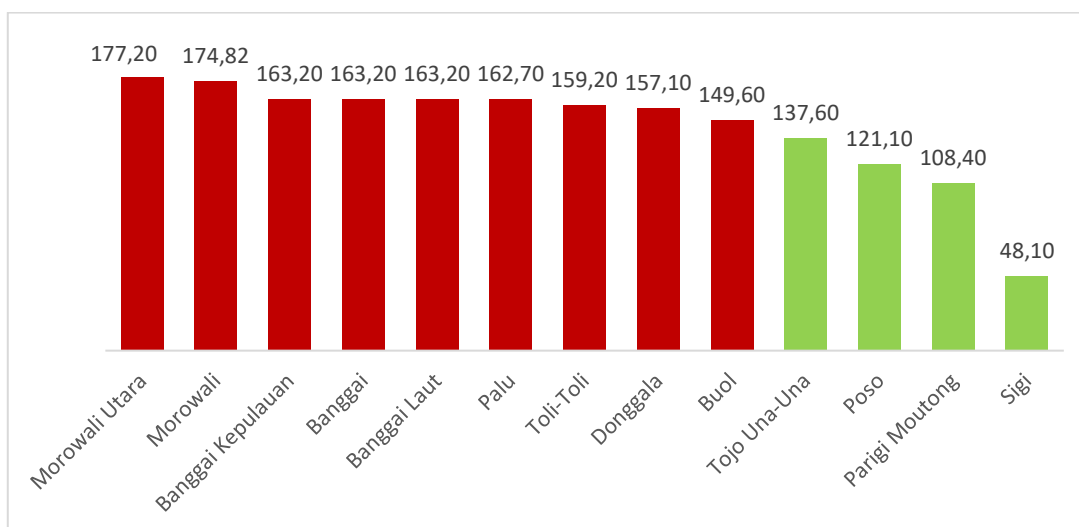
Gambar 2.84

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Tahun 2020-2022

Perkembangan IKLH Kabupaten Morowali dari tahun 2020 s/d tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Morowali sebesar 63,71 poin meningkat pada tahun 2021 menjadi 82,33 poin dan sedikit mengalami penurunan menjadi 80,54 poin. Nilai ILKH Kabupaten Morowali masuk dalam kategori Baik. Sebagai Kawasan industri pertambangan, isu lingkungan sangat serius untuk diatasi. Langkah mitigasi sangat dibutuhkan untuk memastikan aktivitas pertambangan yang ada tidak merusak lingkungan masyarakat.

Indeks Rawan Bencana

Indeks Rawan Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah. Manfaat adanya IRBI adalah untuk membantu mengatur prioritas dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai IRB di Publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI setiap tahunnya. Indeks rawan Bencana Kabupaten Morowali Sampai dengan tahun 2022 mencapai 174,82 poin atau masuk dalam kategori tinggi, yang artinya Kabupaten Morowali sangat rentan sebagai daerah Rawan bencana, urutan tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Gambar 2.85
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Morowali Tahun 2020-2022



Tabel 2.61
Evaluasi Capaian Indikator Misi 5 RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

INDIKATOR		Target					Kondisi Akhir	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap target Akhir	Status Capaian	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
5.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	50 - 55	55-60	55-60	55-60	55-60	Na	63,71	82,33	80,54	NA	127,42	149,69	146,44	134,23	TERCAPAI/ MELAMP AU	
5.1.1.1	Indeks Rawan Bencana	NA	na	100-95	95-90	90-85	90-85	Na	173,8	174,82	174,82	NA	73,80	74,82	74,82	524,36	PERLU UPAYA KERAS	
5.1.1.2	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Na	Na	15,87-17,46	17,46-19,84	19,84-23,80	19,84-23,80	0,79	2,38	2,38	2,38	5,00	15,00	15,00	15,00	12,00	PERLU UPAYA KERAS	
5.1.1.3	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	80,1	82	85	90	100	100	80,1	82	85	90	100	100	100	100	90,00	AKAN TERCAPAI	
5.1.1.4	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	85	85	95	100	100	100	85	85	95	100	100	100	100	100	100,00	TERCAPAI/ MELAMP AU	



5.1.1.5	Angka Kriminalitas	8	5-8	5-9	5-10	5-11	5-12	25,00	28,00	19,42	19,42	212,50	250,00	115,78	94,20	(100,00)	TERCAPAI/ MELAMPAUI	
---------	--------------------	---	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	------------------------	---

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



2.3 Evaluasi Capaian Indikator Makro

Evaluasi selanjutnya yang dilakukan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang harus dievaluasi adalah capaian kinerja indikator makro setiap daerah.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator capaian kinerja makro diukur dari nilai indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan. Indikator penilaian kinerja capaian indikator makro sebagai berikut.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Capaian Indikator Makro

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00-1,80	Sangat Rendah
2	1,81-2,60	Rendah
3	2,61-3,40	Sedang
4	3,41-4,20	Tinggi
5	4,21-5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 18 Tahun 2020

Capaian indikator makro Kabupaten Morowali tahun 2019 menunjukkan tingkat capaian 100% untuk keenam indikator. Skor capaian indikator sebesar 5 yakni sangat tinggi. Kondisi capaian indikator makro ditahun 2019 sangat tinggi dikarenakan pada tahun 2020 telah dilakukan perubahan RPJMD, sehingga target yang ditetapkan pada P-RPJMD merupakan nilai realiasi tahun 2019.



Tabel 2.63
Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2019

No.	Indikator Makro	Bobot Indikator	Tahun 2019			
			Target RPJMD	Capaian Tahun N	% Capaian	Skor
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7=6*3
1.	Indeks Pembangunan Manusia	20%	72,02	72,02	100,00	20
2.	Angka Kemiskinan	20%	13,75	13,75	100,00	20,00
3.	Angka Pengangguran	15%	3,03	3,03	100,00	15,00
4.	Pertumbuhan Ekonomi	10%	20,20	20,26	100,30	10,00
5.	Pendapatan Perkapita	15%	281,01	281,01	100,00	15,00
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)*	20%	0,304	0,304	100,00	20,00
Nilai Skor		100%	Sangat Tinggi			5,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Pada tahun 2020 capaian indikator Makro Kabupaten Morowali lebih rendah dari tahun sebelumnya. Khususnya pada angka kemiskinan yang capaiannya lebih tinggi dari yang ditetapkan, persentase capaian angka kemiskinan sebesar 97,79%. Selain indikator tersebut kelima indikator lainnya capainnya mencapai 100%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2020

No.	Indikator Makro	Bobot Indikator	Tahun 2020			
			Target RPJMD	Capaian Tahun N	% Capaian	Skor
1	2	3	8	9	10=9/8	11=10*3
1.	Indeks Pembangunan Manusia	20%	72,21	72,21	100,00	20
2.	Angka Kemiskinan	20%	13,14	13,43	97,79	19,12
3.	Angka Pengangguran	15%	5,21	5,21	100,00	15
4.	Pertumbuhan Ekonomi	10%	28,93	28,93	100,00	10
5.	Pendapatan Perkapita	15%	356,20	356,20	100,00	15



No.	Indikator Makro	Bobot Indikator	Tahun 2020			
			Target RPJMD	Capaian Tahun N	% Capaian	Skor
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)*	20%	0,304	0,290	104,61	20
Nilai Skor		100%	Sangat Tinggi			4,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Selanjutnya pada tahun 2021 Skor capaian indikator Makro Kabupaten Morowali lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,77 poin atau sangat tinggi. Beberapa indikator yang capaiannya dibawah 100% yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran. Selain itu indikator dengan status capaian di atas 100% diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). Capaian indikator ekonomi sangat tinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Morowali sebagai Kawasan industri pertambangan yang besar di Indonesia. Hasil evaluasi indikator makro tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2021

No.	Indikator Makro	Bobot Indikator	Tahun 2021			
			Target RPJMD	Capaian Tahun N	% Capaian	Skor
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7=6*3
1.	Indeks Pembangunan Manusia	20%	73,00	72,29	99,03	20
2.	Angka Kemiskinan	20%	13,10	13,75	95,04	19
3.	Angka Pengangguran	15%	3,00	3,73	75,67	11
4.	Pertumbuhan Ekonomi	10%	15,00	25,31	168,73	10
5.	Pendapatan Perkapita	15%	300,00	375,09	125,03	15
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)*	20%	0,300	0,297	101,00	20
Nilai Skor		100%	Sangat Tinggi			4,77

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



Selanjutnya pada tahun 2022 Skor capaian indikator Makro Kabupaten Morowali lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,85 poin atau sangat tinggi. Beberapa indikator yang capaiannya dibawah 100% yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran. Selain itu indikator dengan status capaian di atas 100% diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). Capaian indikator ekonomi sangat tinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Morowali sebagai Kawasan industri pertambangan yang besar di Indonesia. Hasil evaluasi indikator makro tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Bobot Indikator	Tahun 2022			
			Target RPJMD	Capaian Tahun N	% Capaian	Skor
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7=6*3
1.	Indeks Pembangunan Manusia	20%	74,00	72,55	98,04	20
2.	Angka Kemiskinan	20%	12,75	13,75	92,16	18
3.	Angka Pengangguran	15%	3,00	3,20	93,33	14
4.	Pertumbuhan Ekonomi	10%	15,00	28,21	188,07	10
5.	Pendapatan Perkapita	15%	300,00	380,00	126,67	15
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)*	20%	0,300	0,285	105,00	20
Nilai Skor		100%	Sangat Tinggi			4,85

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

2.4 Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah



daerah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, seperti rasio-rasio keuangan, laporan realisasi anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Selain itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menilai tingkat kesehatan dan kemajuan otonomi daerah.

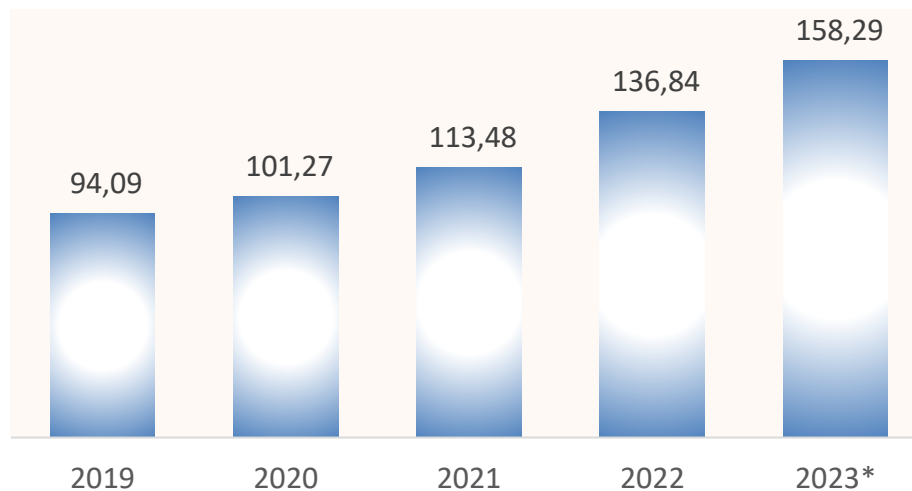
Evaluasi ini disusun untuk mengevaluasi kesesuaian antara anggaran RPJMD tahun 2019-2023 dengan realisasi keuangan dan kinerja pada tahun tersebut. Laporan ini menggunakan data dari realisasi APBD kabupaten Morowali tahun 2019-2023. Laporan ini juga membandingkan komposisi anggaran dan realisasi keuangan per belanja dan per program serta menyajikan grafik tentang realisasi keuangan bulanan². Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang pelaksanaan anggaran RPJMD serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dimasa mendatang.

2.4.1 Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah

Evaluasi pendapatan daerah merupakan proses penilaian yang subyektif dan sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri merupakan dokumen perencanaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan melakukan evaluasi pendapatan daerah secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta merumuskan strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah.

Hasil analisis realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali menunjukkan rata-rata capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 120,79 persen, rata-rata realisasinya melewati target yang ditetapkan di RPJMD. Sampai dengan tahun 2023 anggaran pendapatan daerah Kabupaten Morowali mencapai Rp1.735.913.264.918,00. Pada tahun 2019 realisasi sebesar 94,09%, meningkat

setiap tahunnya sampai tahun 2023 sebesar 158,29%, secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Hasil Analisis tahun 2023

Gambar 2.87

Persentase realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Selanjutnya penjelasan lebih rinci terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali sebagaimana yang disajikan di tabel berikut ini menunjukkan bahwa, rata-rata realisasi pendapatan asli daerah sebesar 122,01%. Sedangkan untuk pendapatan transfer capaiannya sebesar 123,26%. Selanjutnya untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata capaiannya sebesar 44,17 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67

Analisis Realisasi Pendapatan daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
		2019	2020	2021	2022	2023*	
4	PENDAPATAN DAERAH	94,09	101,27	113,48	136,84	158,29	120,79
4.1	Pendapatan Asli Daerah	152,40	104,76	111,09	123,40	118,38	122,01
4.1.1	Pajak Daerah;	136,02	101,53	154,73	147,56	145,40	137,05



Kode	Uraian		Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
			2019	2020	2021	2022	2023*	
4.1.2		Retribusi Daerah;	153,53	100,05	104,14	114,08	106,94	115,75
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	118,99	100,00	135,90	100,00	90,59	109,10
4.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	173,39	128,81	74,95	115,09	111,47	120,74
4.2		Pendapatan Transfer	81,49	100,22	114,76	142,56	177,25	123,26
4.2.1		Transfer Pemerintah Pusat	80,79	100,00	114,28	142,36	178,60	123,21
4.2.1.1		Dana Perimbangan	78,08	100,00	117,15	150,85	190,62	127,34
4.2.1.2		Dana Insentif Daerah;	0	-	100,00	-	-	20,00
4.2.1.6		Dana Desa	101,72	55,92	99,46	92,03	97,68	89,36
4.2.2		Transfer Antar-Daerah	105,60	108,48	133,16	148,42	141,49	127,43
4.2.2.1		Pendapatan Bagi Hasil; dan	106,15	108,92	133,16	148,42	141,49	127,63
4.2.2.2		Bantuan Keuangan	-	100,00	-	-	-	20,00
4.3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26,32	99,85	94,68	-	-	44,17
4.3.1		Hibah;	-	100,52	13,08	-	-	22,72
4.3.2		Dana Darurat;	-	-	-	-	-	-
4.3.3		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	100	-	-	20,00

Sumber: Hasil Analisis tahun 2023

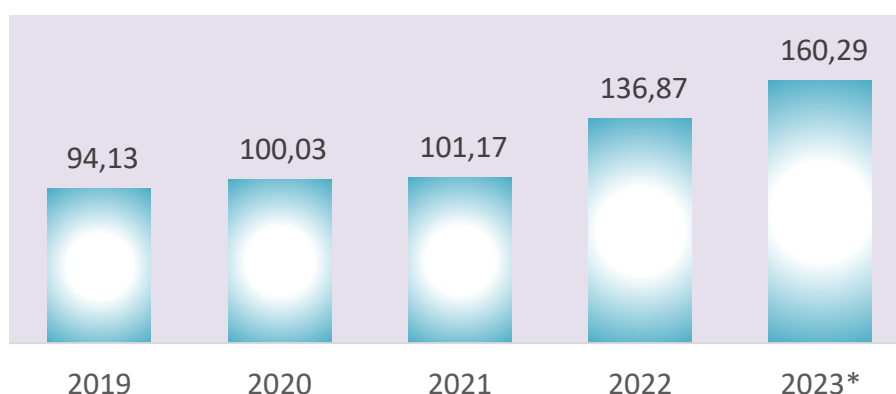


2.4.2 Evaluasi Realisasi Belanja Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Belanja pemerintah daerah harus dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai sejauh mana realisasi belanja pemerintah daerah telah sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

Salah satu kabupaten yang perlu dievaluasi realisasi belanja pemerintah daerahnya adalah Kabupaten Morowali. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas ke-10 di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah sebesar 3.037 km². Kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.415 jiwa per tanggal 30 Juni 2022 dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,92% pada tahun 2019 (BPS Sulawesi Tengah). Selain itu, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri.

Namun demikian, tidak semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja belanja pemerintah daerah di Kabupaten Morowali dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (BKPS), realisasi belanja pemerintah daerah di Kabupaten Morowali pada tahun 2019 hanya mencapai Rp1,55 triliun atau sekitar 75% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,07 triliun. Pada tahun 2020, realisasi belanja pemerintah daerah di Kabupaten Morowali turun menjadi Rp1,49 triliun atau sekitar 72% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,08 triliun.



Sumber: Hasil Analisis tahun 2023

Gambar 2.88

Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap Target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Merujuk pada gambar di atas, diketahui bahwa persentase realisasi biaya juga memiliki rata-rata capaiannya yang sangat tinggi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2019-2023. Dimana pada tahun 2019 rata-rata realisasi capaiannya sebesar 94,13%, kemudian ditahun 2020 sebesar 100,03%, tahun 2021 sebesar 101,17%. Sampai dengan tahun 2023 realisasi belanja daerah mencapai 118,50%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68

Analisis Realisasi Belanja daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
		2019	2020	2021	2022	2023*	
5	BELANJA DAERAH	94,13	100,03	101,17	136,87	160,29	118,50
5.1	Belanja Operasi	88,88	100,09	102,50	167,05	200,13	131,73
5.1.1	Belanja Pegawai;	78,52	69,40	101,08	122,77	178,44	110,04
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101,85	146,81	104,16	200,98	198,61	150,48
5.1.3	Belanja Bunga	115,17	100,00	53,41	100,00	104,00	94,52
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah; dan	534,46	103,91	98,83	845,11	1.075,56	531,58
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	185,87	100,00	94,18	95,79	505,20	196,21
5.2	Belanja Modal	104,15	99,92	90,44	94,68	107,17	99,27
5.3	Belanja Tidak	3.859,10	100,00	163,00	93,82	62,84	855,75



Kode	Uraian	Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
		2019	2020	2021	2022	2023*	
	Terduga						
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.848,17	100,00	163,00	93,82	63,02	853,60
5.4	Belanja Transfer	93,14	99,97	107,49	107,11	121,16	105,78
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	134,48	100,00	178,73	207,11	128,12	149,69
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	89,51	99,97	98,98	92,95	120,17	100,32

Sumber: Hasil Analisis tahun 2023

2.4.3 Evaluasi Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dana perimbangan yang berasal dari alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil; serta lain-lain pendapatan yang sah bukan pajak. Selain itu, pembiayaan pemerintah daerah juga meliputi pinjaman daerah yang berasal dari pinjaman dalam negeri atau luar negeri; hibah yang berasal dari pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri; serta dana cadangan yang merupakan bagian dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pembiayaan pemerintah daerah harus dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menutup defisit anggaran atau meningkatkan modal kerja pemerintah daerah. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar pemerintah. Pembiayaan pemerintah daerah juga harus dapat memberikan dampak positif terhadap keuangan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah kondisi kecukupan dana untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.



Pembangunan daerah adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Analisis realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2020 mencapai 40,01%, kemudian tahun 2021 meningkat sebesar 194,63% dan ditahun 2022 juga melampaui target yang ditetapkan, mencapai 215,77%. Sehingga rata-rata capaian realisasi pembiayaan sebesar 90,08%. Selanjutnya pada sisi pengeluaran pembiayaan reaslisasinya dari tahun 2019-2023 berfluktuatif, ditahun 2019 sebesar 378,77% dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan 32,46%. Sehingga rata-rata capaian realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 183,71%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Analisis Realisasi Pembiayaan daerah Terhadap target RPJMD Kabupaten
Morowali Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
		2019	2020	2021	2022	2023*	
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	40,01	194,63	215,77	-	90,08
6.1.1	SiLPA	-	100,00	194,63	215,77	-	102,08
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan	-	-	-	-	-	-



Kode	Uraian		Persentase Capaian					Rata-Rata Capaian
			2019	2020	2021	2022	2023*	
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	378,77	100,00	99,62	307,73	32,46	183,71
6.2.1		Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	103,38	100,00	96,73	100,00	118,92	103,81
6.2.2		Penyertaan Modal Daerah	-	-	100,00	385,71	-	97,14
6.2.3		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.4		Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-	-
6.2.5		Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
		PEMBIAYAAN NETTO	(84,40)	37,04	240,27	141,64	(296,72)	7,57
6.3		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN						

Sumber: Hasil Analisis tahun 2023

2.5 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Morowali sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, seperti potensi alam, sumber daya manusia, dan investasi. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Morowali telah



menetapkan sejumlah program dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama periode 2018-2023.

Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, perlu adanya evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis dan periodik, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Evaluasi kinerja ini juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program yang telah dijalankan, serta menemukan kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat. Hasil evaluasi kinerja indikator pemerintah daerah Kabupaten Morowali juga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan kebijakan di masa yang akan datang. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan daerah Kabupaten Morowali dan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program di masa depan.

Penetapan indikator kinerja Kabupaten Morowali bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali pada akhir periode masa jabatan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD periode 2018-2023 yang dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas dalam RPJMD Periode 2018-2023 yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Namun demikian karena apa yang diproyeksikan atau di targetkan belum dapat dicapai atau melebihi target hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan pertengahan periode RPJMD yaitu 2018-2022 dan memperhatikan peluang dan tantangan untuk periode akhir RPJMD. Hasil Evaluasi Indikator kinerja RPJMD yang dimuat dalam Bab 8 RPJMD Kabupaten Morowali periode 2018-2023 secara lengkap disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.70

Evaluasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dan Status Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1	Pertumbuhan PDRB- ADH Berlaku dengan Migas (%)	12-18	20,26	28,93	25,31	28,21	95,93	222,5 4	140,6 1	156,7 2	156,72	●
1.1.2	Pertumbuhan PDRB- ADH Konstan dengan Migas (%)	10-15	20,20	28,93	25,31	48,20	100,0 0	289,3 0	168,7 3	321,3 6	321,36	●
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	78.273.7 34,96	45.244.7 27,10	62.028,3 4	98.779, 81	146.59 9,32	100,0 0	100,0 7	146,5 2	201,2 5	187,29	●
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	78.273.7 34,96	45.244.7 27,10	62.028,3 4	98.779, 81	146.59 9,32	100,0 0	100,0 7	146,5 2	201,2 5	187,29	●
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	60.235.6 06,16	34.085.7 04,80	43.824,3 00	54.916, 24	70.515, 62	100,0 0	99,72	111,2 2	128,6 6	117,07	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	60.235.606,16	34.085.704,80	43.947,50	54.916,24	70.515,62	100,00	100,00	111,22	128,66	117,07	●
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	44.990,00	5,10	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)		-									
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	465,57	373,00	383,27	588,29	831,80	97,32	93,16	134,06	178,66	178,66	●
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	358,28	281,01	356,20	327,06	400,10	103,42	118,21	99,06	111,67	111,67	●
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	8,51	12,62	26,76	-8,18	22,14	13,77	245,73	(85,49)	260,22	260,22	●
1.1.9	Indeks Gini	0,24	0,304	0,290	0,297	0,285	0,00	0,35	8,79	10,47	17,77	▶
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin		-									
	- Garis Kemiskinan (000)	480.193,28	428.744,00	463.140,00	478.409,00	507.523,00	0,00	4,88	5,27	8,60	5,69	●
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	19,97	16,61	16,50	17,07	15,86	0,00	-23,18	-18,71	-22,60	-20,58	●
	- Persentase Kemiskinan (%)	11,88	13,75	13,43	13,75	12,58	0,00	1,13	7,34	1,94	5,89	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,53	2,12	0,67	2,11	2,03	0,00	- 65,99	15,93	21,56	32,68	▶
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,50	0,67	0,54	0,54	0,00	39,58	14,89	20,00	22,73	▶
1.1.1 0	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,14	72,21	72,21	72,29	72,55	100,0 0	100,0 0	99,23	98,71	97,86	●
1.1.1 1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	88,12	86,25	86,57	86,25	87,42	100,0 0	99,83	98,92	99,73	99,21	●
1.2.	Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	Angka Melek Huruf	98-99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0 0	100,0 0	101,0 1	101,0 1	101,01	●
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,00	9,33	9,33	9,34	9,35	100,0 0	100,0 0	97,80	95,60	93,50	●
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	13,17	13,17	13,35	13,36	100,0 0	100,0 0	100,9 1	100,4 5	100,00	●
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	70,03	69,18	69,18	69,23	69,23	100,0 0	100,0 0	99,67	99,25	98,86	●
1.2.5	Balita Gizi Buruk	6-4	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	- 99,99	- 100,0 0	- 100,0 0	-50,00	●
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	1,92	7,61	7,61	7,80	5,20	0,00	0,00	36,36	36,13	170,83	▼



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	44,13	50,01	50,01	46,92	41,83	100,00	100,00	97,64	90,76	94,79	●
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,23	64,70	64,70	63,75	60,74	100,00	100,00	97,25	91,49	90,35	▶
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	2,00	3,03	5,21	5,08	3,20	-41,84	0,00	26,68	6,67	60,00	▼
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	98,00	94,79	94,79	94,92	96,80	100,00	100,00	98,89	99,79	98,78	●
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan		-									
	- PDRB ADHB	253.215,37	113.275,77	113.275,77	179.606,19	269.687,30	100,00	100,00	112,31	130,56	106,51	●
	- PDRB ADHK	168.303,63	80.311,95	80.311,95	99.851,34	129.722,07	100,00	100,00	91,07	93,34	77,08	▶
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	31,26	23,18	23,18	22,33	26,93	100,00	100,00	83,73	93,36	86,13	▶
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten		-									
	- PDRB ADHB	1,34	3,27	3,27	2,17	1,46	100,00	100,00	82,98	73,98	109,32	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	- PDRB ADHK	1,43	3,18	3,18	2,63	2,05	100,0 0	100,0 0	101,0 3	101,7 7	143,05	●
1.2.1 4	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten		-									
	- PDRB ADHB	0,07	0,21	0,21	0,01	0,00	100,0 0	100,0 0	7,93	0,76	1,30	▼
	- PDRB ADHK	0,06	0,18	0,18	0,15	0,11	100,0 0	100,0 0	104,9 8	114,4 7	190,78	●
1.2.1 5	Produksi Tanaman Pertanian		-									
	Padi	36.613,6 3	42.068,2 2	42.068,2 2	46.221, 70	39.507, 32	100,0 0	100,0 0	114,8 4	102,8 0	107,90	●
	Jagung	1.171,89	1.865,00	1.865,00	4.368,4 2	1.865,0 0	100,0 0	100,0 0	372,7 7	159,1 4	159,14	●
	Ubi Kayu	6.970,96	4.186,00	4.186,00	6.259,7 3	4.186,0 0	100,0 0	100,0 0	122,4 0	69,27	60,05	▼
	Ubi Jalar	1.097,89	775,00	775,00	1.378,2 5	775,00	100,0 0	100,0 0	156,1 5	78,26	70,59	▶
	Kacang Tanah	68,59	56,00	56,00	78,43	56,00	100,0 0	100,0 0	130,2 8	86,97	81,64	▶



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Kacang Kedelai	765,06	127,00	127,00	190,00	127,00	100,00	100,00	55,93	22,99	16,60	
	Kacang Hijau	4,42	4,00	4,00	45,43	4,00	100,00	100,00	1097,34	93,46	90,50	▶
1.2.1 6	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	0,47	1,05	1,05	0,66	0,45	100,00	100,00	76,86	67,48	94,76	●
	- PDRB ADHK	0,49	1,06	1,06	0,85	0,66	100,00	100,00	97,33	96,98	134,58	●
1.2.1 7	Produksi Tanaman Perkebunan		-									
	Kelapa	1.147,88	1.163,23	1.163,23	1.207,30	733,49	100,00	100,00	104,25	63,62	63,90	▼
	Kelapa Sawit	142.358,12	80.148,90	80.148,90	74.092,52	76.096,25	100,00	100,00	73,44	62,57	53,45	▼
	Kopi	18.760,01	23.477,00	23.477,00	35.200,00	33.626,00	100,00	100,00	160,70	165,38	179,24	●
	Kakao	23.475,56	6.971,70	6.971,70	2.400,00	1.727,75	100,00	100,00	19,24	9,61	7,36	▼
	Karet	-	-	-	-	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1.2.1 8	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	0,03	0,12	0,12	0,07	0,05	100,0 0	100,0 0	82,76	83,66	167,32	●
	- PDRB ADHK	0,03	0,13	0,13	0,10	0,08	100,0 0	100,0 0	101,1 8	112,5 8	262,68	●
1.2.1 9	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	13,99	18,33	18,33	18,63	17,29	100,0 0	100,0 0	110,3 2	111,9 9	123,60	●
	- PDRB ADHK	19,39	23,48	23,48	23,13	21,11	100,0 0	100,0 0	104,6 1	101,7 6	108,89	●
1.2.2 0	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	0,07	0,13	0,13	0,08	0,06	100,0 0	100,0 0	73,40	67,81	87,19	▶
	- PDRB ADHK	0,07	0,12	0,12	0,08	0,07	100,0 0	100,0 0	84,81	80,78	103,85	●
1.2.2 1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	PDRB											
	- PDRB ADHB	0,77	1,66	1,66	1,04	0,70	100,0 0	100,0 0	76,37	66,03	90,89	▶
	- PDRB ADHK	0,54	1,30	1,30	1,04	0,81	100,0 0	100,0 0	99,01	102,4 8	149,93	●
1.2.2 2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	0,65	1,53	1,53	1,08	1,25	100,0 0	100,0 0	86,98	132,9 6	192,27	●
	- PDRB ADHK	0,56	1,34	1,34	1,17	1,48	100,0 0	100,0 0	108,3 9	180,3 5	264,08	●
1.2.2 3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	120,03	69,98	69,98	71,23	73,19	100,0 0	100,0 0	82,18	70,82	60,98	▼
	- PDRB ADHK	111,61	65,74	65,74	65,52	67,31	100,0 0	100,0 0	80,86	69,88	60,31	▼
1.2.2 4	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	- PDRB ADHB	1,77	3,48	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA	
	- PDRB ADHK	1,20	2,56	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	NA	NA	
1.2.2 5	Pertumbuhan Industri	0-2	0,30	(0,37)	NA	NA	30,00	- 37,00	NA	NA	NA	
1.2.2 6	Nilai ICOR	3,75	5,88	1,03	4,99	3,51	0,00	- 80,70	3,60	- 18,10	-6,45	
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
1.3.1	Seni Budaya		-									
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17-20	17,00	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.2	Olahraga		-									
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14-18	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391-395	391,00	391,00	391,00	391,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM											
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini											
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	38,80	37,35	40,83	38,29	43,86	100,00	100,00	95,34	111,09	113,04	●
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	12,80	14,68	13,92	12,87	13,75	100,00	100,00	95,05	104,43	107,45	●
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)		-									
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	104,76	121,33	108,95	109,42	109,40	100,00	100,00	101,74	103,05	104,43	●
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,11	105,13	103,84	102,31	99,41	100,00	100,00	99,72	98,09	99,30	●
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	80,61	103,50	81,03	0,00	98,22	100,00	100,00	0,00	121,63	121,85	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)		-									
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		-									
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	97,22	94,79	94,72	95,07	93,67	100,00	100,00	99,50	97,18	96,35	●
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	77,60	72,73	73,49	73,23	73,13	100,00	100,00	97,82	95,93	94,24	●
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	71,98	67,59	67,54	69,71	70,62	100,00	100,00	101,00	100,17	98,11	●
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah		-									
	- Tingkat SD/MI	99,09	98,73	98,84	97,06	97,78	100,00	100,00	98,12	98,77	98,68	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	- Tingkat SMP/MTs	97,14	94,20	94,97	94,40	94,51	100,00	100,00	98,65	98,02	97,29	●
	- Tingkat SMA/SMK/MA	92,49	84,70	89,35	89,75	90,06	100,00	100,00	99,28	98,49	97,37	●
2.1.1. 6	Angka Putus Sekolah		-									
	- Tingkat SD/MI	0,5-0,3	0,45	-	0,38	0,29	0,00	- 100,00	- 24,00	- 42,00	-42,00	●
	- Tingkat SMP/MTs	0-2	3,65	-	0,20	0,18	0,00	- 100,00	- 90,00	- 91,00	-64,00	●
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,50	10,34	0,44	0,45	0,48	0,00	0,00	- 10,00	-4,00	-4,00	●
2.1.1. 7	Angka Kelulusan		-									
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.1.1.	Angka Yang		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
8	Melanjutkan											
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	98,90	99,71	100,00	100,00	98,90	99,71	99,71	●
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	79-81	70,00	73,18	76,80	76,41	100,00	100,00	102,40	99,23	96,72	●
2.1.1. 9	Fasilitas Pendidikan		-									
	- Tingkat SD/MI	148-150	148,00	153,00	159	162,00	100,00	100,00	107,43	109,46	109,46	●
	- Tingkat SMP/MTs	57-59	49,00	49,00	51	51,00	100,00	100,00	89,47	89,47	89,47	▶
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26-27	26,00	26,00	26	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.1.1. 10	Rasio Ketersediaan Sekolah		-									
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk	0,11	0,11	0,13	0,12	0,10	100,00	100,00	111,48	92,51	92,51	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	usia sekolah SD/MI											
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,16	0,17	0,15	0,16	0,07	100,0 0	100,0 0	98,04	43,47	43,47	▼
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,18	0,20	0,22	0,03	0,03	100,0 0	100,0 0	15,27	14,91	14,91	▼
2.1.1. 11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	10,01	12,95	10,20	11,55	11,39	100,0 0	100,0 0	113,9 2	113,0 9	113,76	●
2.1.1. 12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	10,96	9,24	12,29	11,81	12,73	100,0 0	100,0 0	99,63	111,7 0	116,18	●
2.1.1. 13	Rasio guru/murid per kelas		-									
	- Tingkat SD/MI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,13	100,0 0	100,0 0	100,0 0	252,9 7	252,97	●
	- Tingkat SMP/MTs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	100,0 0	100,0 0	100,0 0	64,00	64,00	▼
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	●
2.1.2.	Kesehatan		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,01-0,2	0,87	0,01	0,01	0,611	0,00	30,00	45,00	6.008,74	6008,74	▼
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,29	0,71	0,50	0,64	1,527	0,00	0,00	48,84	324,22	426,62	▼
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	24,28	13,43	11,96	12,50	0,611	0,00	0,00	-22,22	-96,97	-97,48	●
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0-0,25	-	0,00	0,35	0,299	0,00	0,00	41,20	19,80	19,80	▼
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	6,81	14,36	8,56	8,31	8,13	100,00	100,00	104,18	110,04	119,41	●
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk		-	-	-							
	Rasio Sarana Kesehatan	0,27	0,360	0,266	0,268	0,255	100,00	98,52	99,26	94,57	94,57	●
	Rasio Puskesmas	0,05	0,070	0,056	0,077	0,074	100,00	93,33	154,84	147,52	147,52	●
	Rasio Poliklinik	0,13	0,040	0,025	0,048	0,045	100,00	125,00	79,41	50,44	34,92	▼



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Rasio Pustu	0,25	0,247	0,161	0,143	0,136	98,93	64,31	57,17	54,47	54,47	▼
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,02	0,020	0,012	0,012	0,017	100,00	120,00	59,56	85,11	85,11	▶
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,84	0,60	0,40	0,51	0,437	100,00	99,00	93,75	63,32	52,01	▼
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	8,80	4,81	4,20	4,42	5,96	100,00	99,95	77,22	82,03	67,77	▶
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94-97	94,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	103,09	103,09	106,38	●
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	100,00	135,00	145,00	140,90	155,50	100,00	100,00	140,90	155,50	155,50	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	266,00	452,00	386,00	356,00	197,00	100,00	100,00	100,00	60,43	74,06	▶
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	138,67	372,64	238,67	133,40	969,11	100,00	100,00	62,43	513,65	698,86	●
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	57,00	106,00	77,00	59,00	176,00	100,00	100,00	81,94	262,69	308,77	●
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	1.175,17	1.730,00	1.795,00	2304,00	2911,00	100,00	100,00	145,05	210,67	247,71	●
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	6,84	12,37	6,18	5,96	10,78	0,00	0,00	-6,94	62,85	157,61	●
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0-0,2	0,01	0,01	0,003	0,02	0,00	-30,00	-98,51	-89,79	10,21	▼
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang	-	-	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	HIV/AIDS											
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	19,55	26,32	19,55	18,05	18,05	100,00	100,00	92,33	92,30	92,30	●
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97,50	79,93	80,49	78,33	82,18	100,00	100,00	90,91	89,49	84,29	▶
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-									
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,27	0,13	0,15	0,19	0,18	100,00	103,57	105,56	80,02	68,16	▶
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	60,00	94,18	89,59	89,59	▶
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	19,15	17,60	19,15	26,82	24,30	100,00	100,00	140,05	126,91	126,91	●
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	82,92	79,61	82,80	78,34	71,80	100,00	100,00	94,57	86,63	86,59	▶
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,76	0,82	0,70	0,72	0,87	100,00	100,00	100,00	117,32	114,24	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	89,77	86,99	89,64	93,17	91,91	100,00	100,00	103,89	102,43	102,38	
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,40	4,22	2,05	1,98	1,91	100,00	100,00	91,39	83,50	79,67	
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;		-									
2.1.4.1	Rumah layak huni	90,00	90,00	72,64	78,25	81,71	100,00	80,71	86,94	90,79	90,79	
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;		-									
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975,99	975,00	975,00	975,00	825,00	100,00	100,00	99,97	84,56	84,53	
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	62,50	62,50	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9,19	5,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	90,56	82,74	76,17	
2.1.6.	Sosial		-									
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.380,71	49.012,00	50.680,24	50.680,24	51.030,48	100,00	100,70	100,00	100,00	99,32	
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	125,01	45,00	107,67	107,67	116,34	100,00	108,76	100,00	100,00	93,06	
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	(persen)											
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		-									
2.2.1.	Tenaga Kerja		-									
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	4,00	56,00	28,00	32,00	35,00	100,00	65,12	106,67	205,88	875,00	●
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	10,29	9,16	14,27	14,87	15,12	100,00	151,12	152,90	151,08	146,94	●
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-									
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10,59	10,19	8,59	9,99	11,74	100,00	83,50	96,19	111,94	110,89	●
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
	Rasio KDRT	0,38	0,45	0,21	0,15	0,15	100,00	48,94	36,37	37,90	39,57	▼



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,15	40,60	36,48	44,42	36,34	100,00	88,46	106,09	85,47	84,21	●
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,03	0,99	1,03	1,03	1,06	100,00	103,12	102,18	104,21	103,28	●
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,03	1,08	0,93	0,93	0,87	100,00	87,47	88,48	83,74	84,73	▶
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,18	1,31	1,09	1,09	1,01	100,00	85,54	87,80	83,64	85,98	▶
2.2.3.	Ketahanan Pangan		-									
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	185,80	216,27	152,75	158,90	132,32	100,00	100,00	97,03	75,71	71,22	▶
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	3.088,27	3.071,00	3.071,00	3.947,00	4.014,00	100,00	100,00	128,28	130,22	129,98	●
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	103,51	86,19	73,80	83,80	82,13	100,00	85,62	91,13	84,03	79,34	▶
2.2.5.	Lingkungan Hidup		-									
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	pembangunan kabupaten/kota											
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	●
2.2.5.5	Penetapan MHA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	●
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	●
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil		-									
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	193.904,89	130.014,21	114.041,00	125.361,27	132.824,27	100,00	100,00	89,12	79,40	68,50	▶
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	28.679,12	11.748,37	17.872,00	20.223,00	23.497,00	100,00	100,00	94,17	93,70	81,93	▶
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	239,41	138,47	100,00	100,00	179,00	100,00	100,00	68,27	92,77	74,77	▶



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-									
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.7.4	Posyandu aktif	154,00	154,00	154,00	153,00	153,00	100,00	100,00	99,35	99,35	99,35	●
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-									
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,68	1,64	33,33	4,54	4,96	0,00	1990,61	192,63	229,00	295,45	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	84,14	79,08	80,08	88,54	87,34	100,00	100,00	108,73	105,51	103,80	●
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	87,44	65,78	85,09	57,15	68,71	100,00	100,00	66,55	79,29	78,58	▶
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	44,54	15,33	39,16	15,90	17,54	100,00	100,00	38,83	41,04	39,39	▼
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.2.9.	Perhubungan		-									
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	21.046,88	17.000,00	17.145,00	18.241,00	18.851,00	100,00	100,00	98,89	95,47	89,57	▶
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	25,15	17,00	20,00	10,00	12,00	100,00	100,00	46,04	51,19	47,71	▼
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	100,00	100,00	333,33	333,33	333,33	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	450,00	310,00	310,00	45,00	57,00	100,00	100,00	11,25	13,41	12,67	▼
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,05	0,05	0,05	0,08	0,33	100,00	100,00	166,96	669,30	650,96	●
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		-									
	Angkutan Laut		-									
	Jumlah Penumpang Turun	11.218,17	8.726,00	8.726,00	9.556,72	9.676,72	100,00	100,00	100,00	93,16	86,26	▶
	Jumlah Penumpang Naik	10.745,86	8.419,00	8.726,00	9.194,62	9.718,62	100,00	103,65	100,00	97,48	90,44	▶
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.863,65	200.751,00	8.419,00	210.788,55	214.033,55	100,00	4,19	100,00	96,92	92,71	●
	Jumlah barang muat (ton)	514.882,60	447.724,00	200.751,00	470.110,20	500.409,20	100,00	44,84	100,00	101,61	97,19	●
	Angkutan Udara		-									
	Jumlah Penumpang Datang	60.385,06	32.301,00	32.301,00	31.271,00	31.271,00	100,00	55,27	52,92	52,35	51,79	▼
	Jumlah Penumpang Berangkat	17.242,96	33.266,00	58.447,00	21.973,00	21.973,00	100,00	383,33	138,09	132,54	127,43	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	128.538,22	107.487,00	15.247,00	270.442,00	244.256,00	100,00	12,49	217,68	193,26	190,03	●
	Jumlah barang muat (ton)	43.917,88	77.498,00	122.089,00	100.059,00	99.202,00	100,00	310,91	245,13	234,14	225,88	●
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika		-									
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		-									
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	30,86	22,56	36,36	36,66	39,10	100,00	147,62	137,25	135,87	126,71	●
2.2.12.	Penanaman Modal		-									
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	30-50	57,00	67,00	87,00	87,00	100,00	100,00	174,00	174,00	174,00	●
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	20-30 Triliun	25.862.850,46	32.786.800.000,00	52.060.945.480.000,00	101.146.180.000.000,00	100,00	100,00	173,33	336,67	336,67	●
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga		-									
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	96,70	97,20	95,04	95,04	95,04	100,00	100,00	99,42	98,85	98,28	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	pemuda).											
2.2.1 4.	Statistik		-									
2.2.1 4.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	●
2.2.1 4.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	●
2.2.1 4.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	●
2.2.1 5.	Persandian		-									
2.2.1 6.	Kebudayaan		-									
2.2.1 7.	Perpustakaan		-									
2.2.1 7.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5.373,00	3.510,00	2.286,00	2.628,0 0	2.508,0 0	100,0 0	65,13	63,62	52,78	46,68	▼
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.3.1.	Pariwisata		-									
2.3.1. 1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	7.095,00	5.016,00	5.495,00	6.416,00	3.624,0	100,00	100,00	108,84	57,57	51,08	▼
2.3.1. 2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.3.2.	Pertanian		-									
2.3.2. 1	Kontribusi Sektor Pertanian		-									
	- PDRB ADHB	1,34	3,27	3,27	2,17	1,98	100,00	100,00	82,98	100,00	147,76	●
	- PDRB ADHK	1,43	3,18	3,18	2,63	2,01	100,00	100,00	101,03	100,00	140,56	●
2.3.2. 2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		-									
	- PDRB ADHB	0,07	0,21	0,21	0,01	0,00	100,00	100,00	7,93	0,76	1,30	▼
	- PDRB ADHK	0,06	0,18	0,18	0,15	0,11	100,00	100,00	104,98	114,47	190,78	●
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	- PDRB ADHB	0,47	1,05	1,05	0,66	0,45	100,0 0	100,0 0	76,86	67,48	94,76	●
	- PDRB ADHK	0,49	1,06	1,06	0,85	0,66	100,0 0	100,0 0	97,33	96,98	134,58	●
2.3.2. 3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		-									
	Padi	51,16	49,26	45,60	51,11	45,67	100,0 0	91,70	101,7 9	90,11	89,27	▶
	Jagung	95,24	44,78	15,81	15,81	15,81	100,0 0	27,54	22,58	19,13	16,60	▼
	Ubi Kayu	360,66	289,69	290,69	290,69	290,69	100,0 0	94,55	89,39	84,77	80,60	▶
	Ubi Jalar	262,48	201,35	203,95	203,95	203,95	100,0 0	94,15	87,94	82,50	77,70	▶
	Kacang Tanah	12,77	10,75	10,77	10,77	10,77	100,0 0	95,65	91,58	87,78	84,34	▶
	Kacang Kedelai	24,30	7,46	20,82	20,82	20,82	100,0 0	178,4 1	131,1 1	103,6 3	85,68	▶
	Kacang Hijau	1,57	0,67	0,66	0,66	0,66	100,0 0	74,16	58,93	49,25	42,04	▼
2.3.3.	Kehutanan		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.3.3. 1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral		-									
2.3.4. 1	Rumah tangga pengguna listrik	93-95	93,71	98,70	98,28	99,94	100,00	100,00	103,45	105,20	105,20	●
2.3.4. 2	Daya Terpasang (Kwh)	40-43 Jt Kwh	43.966.450,00	43.966.450,00	43.966.450,00	43.968.432,00	100,00	100,00	102,25	102,25	100,00	●
2.3.5.	Perdagangan		-									
2.3.4. 1	Ekspor Bersih Perdagangan	52.683,40	18.712,00	30.229,00	39.453,40	37.654,87	100,00	100,00	104,61	83,31	71,47	▶
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan		-									
2.3.5. 1	Produksi Perikanan (ton)		-									
	Produksi Perikanan Laut (ton)	40.728,82	38.573,00	32.203,20	33.309,30	33.420,80	100,00	100,00	95,05	88,21	82,06	▶



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	2.344,30	305,00	618,90	2.993,00	2.981,00	100,00	100,00	250,66	168,50	127,16	●
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.220,51	20.372,00	18.260,00	58.414,00	2.220,32	100,00	100,00	308,85	11,35	10,98	▼
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	52,33	11,48	51,00	56,41	57,30	100,00	100,00	109,66	110,45	109,50	●
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	0,04	1,04	1,04	1,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang		-									
2.4.1	Perencanaan Pembangunan		-									
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.2	Keuangan		-									
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.2.2	Persentase SILPA	-	0,93	0,84	2,58	1,01	0,00	0,00	303,06	100,00	50,00	▼
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	52,15	57,45	52,84	80,67	80,25	100,00	100,00	152,35	153,39	153,89	●
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	47,85	42,55	47,16	19,33	19,75	100,00	100,00	41,08	41,42	41,27	▼
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
2.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan		-									



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
	Pelatihan											
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan		-									
2.4.5	Pengawasan		-									
2.4.6	Sekretariat Dewan		-									
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2.4.6. 3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	
3	DAYA SAING DAERAH		-									
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		-									
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	29,56	25,93	NA	NA	NA	100,0 0	NA	NA	NA	NA	
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.404,47	651,06	803,12	998,51	1.204,0 2	100,0 0	100,0 0	99,50	100,0 0	85,73	
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		-									
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		-	-	-							
	Angkutan Laut		-	-	-							
	Jumlah Penumpang Turun	11.218,17	8.726,00	8.726,00	13.080,00	10.387,45	100,00	100,00	136,87	100,00	92,59	●
	Jumlah Penumpang Naik	10.745,86	8.419,00	8.419,00	11.100,00	9.970,24	100,00	100,00	120,72	100,00	92,78	●
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.863,65	200.751,00	200.751,00	10.640,00	220.826,10	100,00	100,00	5,05	100,00	95,65	●
	Jumlah barang muat (ton)	514.882,60	447.724,00	447.724,00	9.120,00	492.496,40	100,00	100,00	1,94	100,00	95,65	●
	Angkutan Udara											
	Jumlah Penumpang Datang	60.385,06	32.301,00	58.447,00	58.447,00	59.739,04	100,00	100,00	98,91	100,00	98,93	●
	Jumlah Penumpang Berangkat	17.242,96	33.266,00	15.247,00	15.247,00	16.577,64	100,00	100,00	95,82	100,00	96,14	●
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	128.538,22	107.487,00	122.089,00	122.089,00	126.388,48	100,00	100,00	98,27	100,00	98,33	●
	Jumlah barang muat (ton)	43.917,88	77.498,00	39.268,00	100.059,00	42.367,92	100,00	100,00	245,13	100,00	96,47	●



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang		-									
	Bank Umum	17-20	17,00	11,00	19,00	19,00	100,00	64,71	111,76	111,76	111,76	●
	Bank Perkreditan Rakyat	4-5	4-5	3,00	3,00	4,00	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	●
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan		-									
	- Jumlah Rumah Makan	35-40	16,00	16,00	62,00	75,00	100,00	100,00	206,67	250,00	214,29	●
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40-45	40,00	45,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	89,77	86,99	89,64	93,17	91,91	100,00	100,00	103,89	102,43	102,38	●
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	93-95	93,71	98,70	98,28	99,94	100,00	100,00	103,45	105,20	105,20	●
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi											
3.3.1	Angka Kriminalitas	10-13	13,00	13,00	19,42	24,74	0,00	0,00	49,35	90,30	90,30	▶



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian				Persentase Capaian				Persentase Capaian Terhadap Target Akhir	Status Capaian Terhadap Target Akhir
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6-10	6,00	6,00	6,00	8,00	0,00	0,00	- 53,85	- 38,46	-20,00	
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia		-									
3.4.1	Tingkat Ketergantungan		-									
	- Rasio Ketergantungan	43,34	35,35	43,53	43,43	43,38	100,0 0	100,0 0	99,90	99,93	100,09	

Keterangan Status Capaian:

- Tercapai
- Akan Tercapai
- Sulit Tercapai

Tidak Dapat Diolah/Tidak Diketahui



2.4 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil capaian pembangunan dan evaluasi kinerja RPJMD maka di tetapkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk di tingkatkan. Ini dapat dilihat dari capaian IPM 72,02 yang merupakan peringkat kedua setelah Kota Palu, tetapi pada angka harapan hidup 68,82 kita masih jauh dari kata ideal dan masih berada di bawah beberapa kabupaten di sulawesi tengah yang mana di ikuti oleh beberapa permasalahan pada gizi buruk dan stunting.
2. Angka kemiskinan yang masih sangat tinggi yaitu 13,75%. Jika dilihat dari persentase penurunan dari tahun sebelumnya termasuk cukup baik yaitu 13,47% tetapi masih berada dibawah angka kemiskinan beberapa kabupaten.
3. Penurunan ini juga tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan pada wilayah kepulauan.
4. PDRB kabupaten yang masih di dominasi oleh sektor industri dan pertambangan mengharuskan pemerintah daerah lebih fokus memprioritaskan sektor lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar sektor ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar wilayah.
5. Pemerataan pembangunan khususnya kecamatan yang berada pada wilayah kepulauan. Infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menunjang pengentasan kemiskinan, antara lain rumah layak huni, jalan, air bersih, jaringan irigasi bagi para petani, dan lainnya.

2.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.5.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek keterjangkauan dan aksesibilitas kewilayahan terutama pada daerah terpencil dan terisolir.
2. Distribusi dan jumlah sebaran guru yang tidak merata.



3. Kesiapan anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dasar terutama di pedesaan belum optimal.
4. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah.
5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar.
6. Ketersediaan Guru Berdasarkan Bidang Keahlian

2.5.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kesehatan belum optimal dan jaringannya masih kurang memadai.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan
3. Tingginya Angka Stunting
4. Ketersediaan Obat Yang Belum Merata
5. Usia Harapan Hidup masih dibawah usia harapan nasional
6. Angka Kematian Ibu masih tinggi
7. Angka Kematian Bayi masih tinggi
8. Status Gizi balita masih rendah.
9. Masih Tingginya tingkat penularan Virus COVID-19

2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah
2. Belum Optimalnya infrastruktur di sektor pariwisata.
3. Masih rendahnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah kepulauan

2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah yang kondisinya tidak layak huni.
2. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
3. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, jamban keluarga, dan air buangan.



2.5.5 Urusan Sosial

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai.
3. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS.
4. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

2.5.6 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran.
2. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang ketenagakerjaan.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal yang masih rendah sehingga masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;

2.5.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum tersedianya pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

2.5.8 Urusan Pangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya desa rawan pangan di sebabkan oleh akses pangan dan ketersediaan pangan.



2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang.
3. Rendahnya kemampuan daya beli disebabkan kemiskinan khususnya di wilayah kepulauan.

2.5.9 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Jumlah armada kebersihan tidak sebanding dengan jumlah perkembangan penduduk
2. Ketersediaan TPA dan TPS yang belum sebanding dengan jumlah desa dan volume sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan segala fasilitas sarana prasarana persampahan.
4. Tidak adanya teknologi pengelolaan sampah/limbah yg dihasilkan masyarakat.

2.5.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP-EI, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) belum memadai yakni jaringan yang sering terganggu, server (alat perekam) perlu perawatan setiap tahunnya serta mobil pelayanan Adminduk.
2. Gedung Kantor yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan diantaranya ruangan perekaman dan data yang kurang representatif.

2.5.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya desa yang belum memiliki BUMDES.
2. BUMDES yang sudah terbentuk belum berjalan optimal.
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan desa baik perencanaan maupun pengawasan dalam menggunakan dana desa.

2.5.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :



1. Belum mencukupinya tenaga penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah penduduk Kabupaten Morowali.
2. Peran keikutsertaan KB masih perlu di optimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB

2.5.13 Urusan Perhubungan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2. kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guradraill dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas.

2.5.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan dan pertanian (agribisnis) yang di kelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
3. Terbatasnya akses modal dan informasi pasar
4. Masih minimnya pendampingan bagi UKM dan Koperasi
5. Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
6. Belum optimalnya sarana bagi UKM dan koperasi

2.5.15 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang belum menggunakan sistem informasi teknologi
2. Sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan perizinan belum memadai seperti ruang pelayanan dan perangkatnya.
3. Penanaman investasi pada kecamatan di luar lingkaran tambang belum maksimal.
4. Promosi potensi serta keunggulan daerah yang belum berjalan optimal.

2.5.16 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga



Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Minat dan Kemauan dikalangan Pemuda dalam Kegiatan Organisasi
2. Kurangnya Minat dan Kesadaran kalangan pemuda dalam ikut serta kegiatan sosialisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
4. Pembinaan olahraga yang belum berjalan optimal.

2.5.17 Urusan Perpustakaan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat baca masyarakat namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti masih kurangnya gedung perpustakaan, literatur bacaan, serta ruang baca yang nyaman.
2. Aksesibilitas dalam pelayanan perpustakaan desa sangat sulit di jangkau.
3. Pelayanan pengunjung serta pengadministrasian buku belum berbasis informasi teknologi.

2.5.18 Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan bagi para nelayan maupun kelompok nelayan.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian
3. Sarana prasarana perikanan yang belum berbasis teknologi atau belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Keterbatasan modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan.
5. Jaringan pemasaran dan produk perikanan masih kurang
6. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan

2.5.19 Urusan Pariwisata

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pariwisata pada Destinasi Wisata sebagian besar belum tersedia.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membantu mengembangkan objek wisata.



3. Belum optimalnya penarikan retribusi pada objek wisata.

2.5.20 Urusan Pertanian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
2. Modal usaha yang dimiliki oleh para petani belum termanfaatkan secara optimal.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
4. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata.
5. Masih kurangnya intensifikasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
7. Jaringan pemasaran produk pertanian masih kurang

2.5.21 Urusan Perdagangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tata kelola perdagangan yang mengakibatkan rantai distribusi barang menjadi panjang
2. Sulitnya mengontrol peredaran barang keluar masuk daerah
3. Sulitnya mengawasi barang kadaluarsa dan tidak berizin di daerah-daerah yang jauh dari ibukota
4. Masih rendahnya fasilitas penunjang untuk pemenuhan kriteria pasar tradisional modern kabupaten

2.5.22 Urusan Perindustrian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterampilan manajemen usaha pelaku industri kecil dan menengah (IKM)
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna pelaku IKM.
3. Masih rendahnya inovasi pelaku IKM dalam menembus pasar lokal dan regional.
4. Masih rendahnya kerjasama antara pelaku IKM dengan industri besar yang ada.
5. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan Kab. Morowali sebagai bahan baku industri.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pedoman hasil pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028, dengan Visi “Morowali Sejahtera Bertumpu Pada Agribisnis”.

Upaya yang dilakukan untuk membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan mempunyai tujuan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebagai parameter ketercapaian tujuan misi tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini Kabupaten Morowali, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di tingkat global, nasional dan regional. Perkembangan kondisi perekonomian setiap tahun akan berbeda dengan kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan jangka menengah tersebut ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah yang telah ditetapkan.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2022 dan proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2023 dan tahun 2024 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2024 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah.



Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2024 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses bottom up dan top down dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah, dan semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD. Program dan kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Morowali.

3.1.1. KONDISI EKONOMI

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region.

PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan



menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,84	(2,76)	3,21	1,81
B	Pertambangan dan Penggalian	51,25	19,77	34,40	23,11	17,22
C	Industri Pengolahan	277,16	24,00	35,72	24,53	31,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,25	1,98	4,47	2,69	11,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,17	0,17	0,11	9,06	2,33
F	Konstruksi	6,27	13,31	(14,62)	70,45	34,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	2,90	(4,98)	9,00	62,22
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	6,47	(28,38)	201,86	151,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,26)	4,01	(10,48)	14,19	56,23
J	Informasi dan Komunikasi	12,87	6,80	7,09	9,83	23,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	0,17	13,23	7,89	5,92
L	Real Estat	2,12	0,90	0,15	3,77	28,73
M,N	Jasa Perusahaan	(10,02)	4,98	(1,17)	1,27	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	5,05	1,06	4,59	(3,00)
P	Jasa Pendidikan	1,21	3,00	(0,18)	0,74	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,16	8,35	6,91	4,05	2,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,93	2,59	(0,44)	14,40	10,05
Produk Domestik Regional Bruto		112,20	20,20	28,93	25,15	28,21

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)



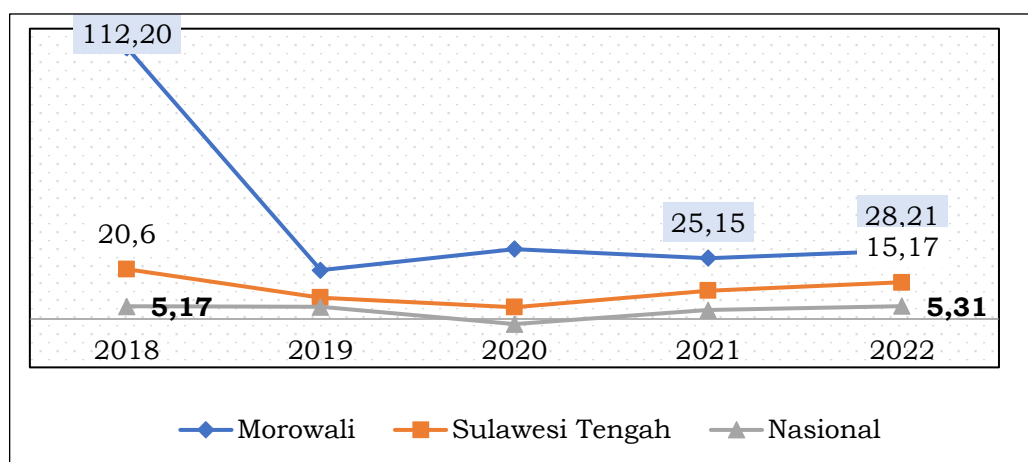
Pada Tabel 3.1 di atas ditunjukkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77 persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (-14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2018-2022 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Dan hingga Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20,20 persen, tetap lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,15 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5,02



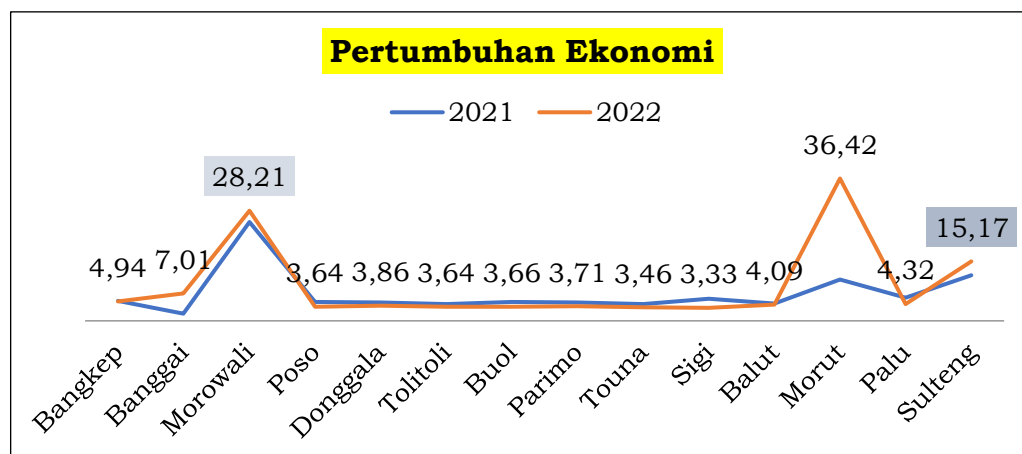
persen. Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat parah ada kondisi Perekonomian global termasuk Indonesia, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif (-2,10) persen. Namun perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, tetap tumbuh positif sebesar 4,86 persen. Sedangkan Kabupaten Morowali tumbuh sangat tinggi yakni sebesar 28,93%. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21%, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional (5,31%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (15,17%) secara lengkap terdapat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya, dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 36,42 persen dan di urutan ketiga Kabupaten Banggai sebesar 7,01 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sigi sebesar 3,33 persen, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,46 persen dan Kabupaten Poso, Tolitoli sebesar 3,64 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 dan tahun 2022, data terkait terdapat pada Gambar 3.2 berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022

2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara (daerah). Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu negara (PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk negara (daerah). Pendapatan perkapita direfleksikan melalui perhitungan PDB Perkapita atau PDRB perkapita. Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB perkapita, dilakukan dengan cara mem-bagi nilai total PDRB terhadap jumlah penduduk yang ada pada periode perhitungan PDRB perkapita tersebut.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai salah satu referensi dan indikator ekonomi sebuah wilayah (daerah), yakni besarnya pendapa-tan perkapita tersebut dapat merefleksikan kemakmuran atau kesejahte-raan sebuah wilayah (daerah) dalam suatu waktu tertentu. Pada level negara, manfaat pendapatan perkapita seringkali digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyara-kat (penduduk), (2) membandingkan perkembangan tingkat kesejahte-raan di berbagai negara, (3) dapat mengelompokkan suatu negara ber-dasarkan tingkat kesejahteraan. Data PDRB Perkapita Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.27 sebagai berikut.



Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	37.356,48	45.244,72	61.985,63	98.917	146.599
- ADHK 2010	28.358,40	34.085,70	43.947,50	55.001	70.516
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	313,16	373,00	383,27	589,11	831,80
- ADHK 2010	237,72	281,01	356,20	327,56	400,10
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	10,55	12,62	26,76	-8,04	22,14
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	119,29	121,3	161,73	167,91	176,24

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

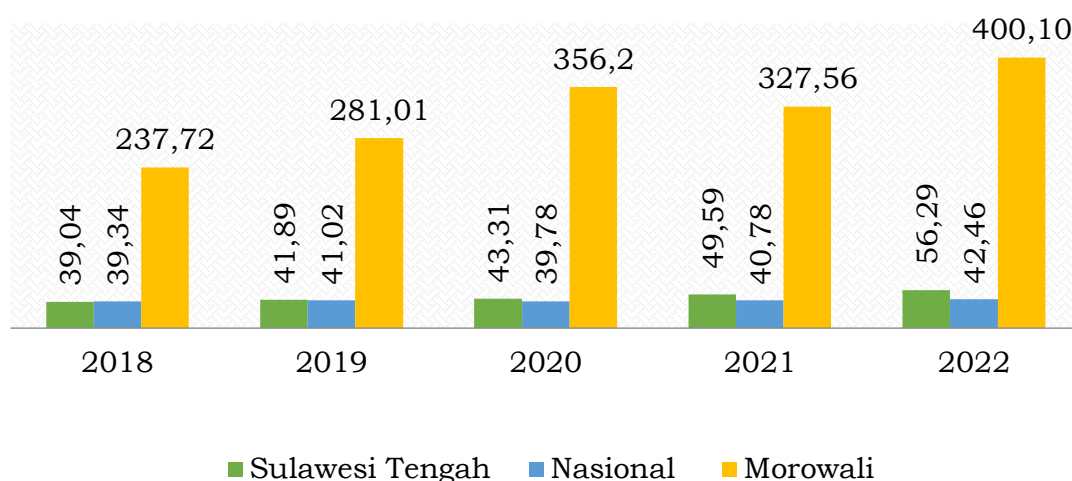
Pada Tabel 3.2 disajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Morowali selama kurun waktu 2018-2022. Selama periode tersebut pendapatan perkapita Kabupaten Morowali diukur melalui PDRB per kapita memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Tahun 2018 pendapatan per kapita sebesar Rp237,72 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp281,01 juta Tahun 2018, Rp281,01 juta Tahun 2019, dan ditahun 2020 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp356,20 Juta. Selanjutnya pada tahun 2021 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp327,56 juta, dan mencapai Rp400,10 juta ditahun 2022. Peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut.

Namun, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Morowali yang tinggi tersebut tidak serta merta disimpulkan bahwa tingkat daya beli per kapita Kabupaten Morowali 7,11 kali lipat daya beli per kapita rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum diketahui, pertumbu-han PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan yang *multiplier effect*-nya kepada perekonomian lokal masih sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal (tenaga kerja, *capital*, dan *skill*) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan *enclave* dalam ekonomi daerah Kabupaten Morowali.



Selanjutnya, PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp281,01 Juta, sedangkan Nasional sebesar Rp59,10 juta, dan Nasional sebesar Rp36,35 juta. Selanjutnya ditahun Pandemi Covid-19 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp356,20 Juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebesar Rp43,32 juta, PDRB Perkapita Nasional tumbuh minus di tahun 2020 yakni sebesar Rp56,39 Juta. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Morowali sebesar Rp327,56 juta, sangat jauh dari Nasional dan Provinsi. Hingga tahun 2022 mencapai Rp400,10 juta, sedangkan Nasional sebesar Rp42,46 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp56,29 juta.

Data Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada Gambar 3.3 sebagai berikut ini.

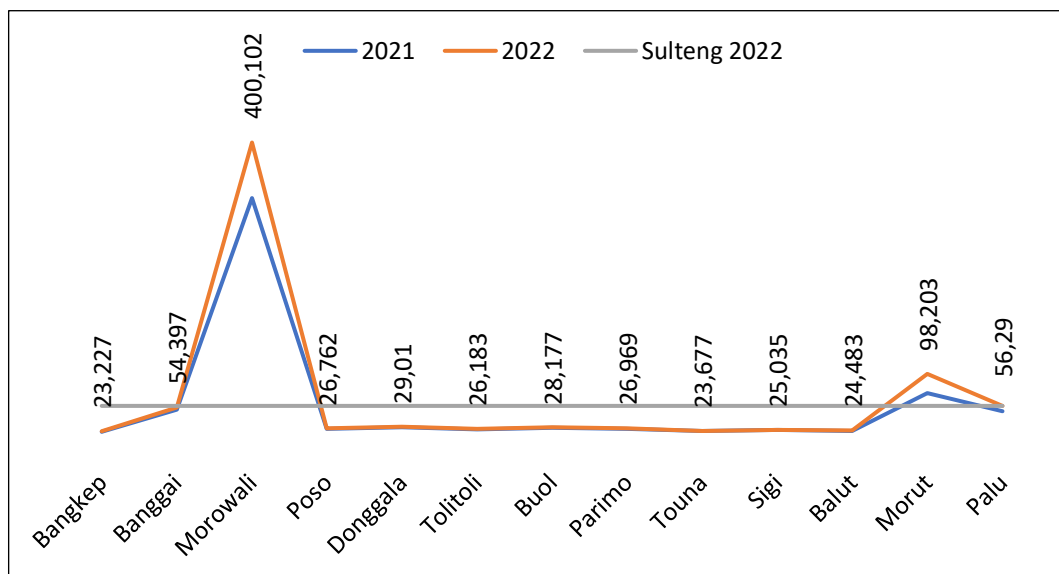


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.3
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Merujuk pada data Gambar 3.3 di atas, terlihat jelas bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 7,11 kali lipat, atau sebanyak 9,42 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2022. Dengan pendapatan perkapita yang terus mening-kat tersebut, diharapkan berdampak positif pula terhadap bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Morowali akan sema-

kin meningkat. Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan Kabupaten Morowali adalah tertinggi dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang disajikan secara lengkap pada Gambar 3.4 berikut ini.



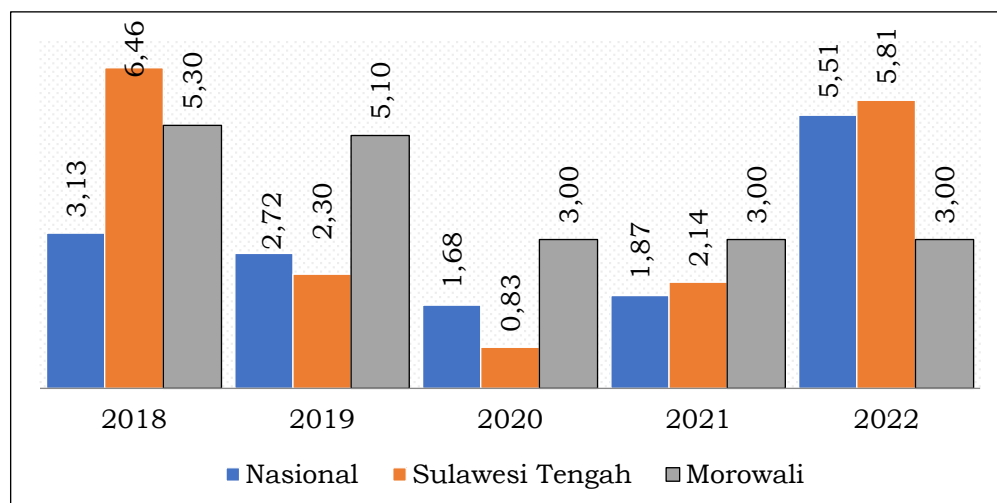
Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.4
PDRB PerKapita Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada Gambar 3.4 di atas, sampai dengan tahun 2018 capaian PDRB tertinggi adalah Kabupaten Morowali dengan PDRB Per Kapita sebesar Rp400,10 juta, dan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua sebesar Rp98,20juta, serta tertinggi ketiga Kota Palu sebesar Rp56,29 juta. Sedangkan untuk Kabupaten dengan PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kabupaten Sigi.

3. Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi akan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 3.5 di atas ditunjukkan perkembangan tingkat inflasi selama kurun waktu 2018-2022 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional. Inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebesar 5,30 persen lebih tinggi dari rata-rata inflasi secara Nasional yakni sebesar 3,13 persen dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,46 persen. Dan hingga Tahun 2022, besaran inflasi Kabupaten Morowali diangka sebesar 3,00 persen, dan jauh di bawah rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara Nasional masing-masing mencapai sebesar 5,51 persen dan 5,81 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

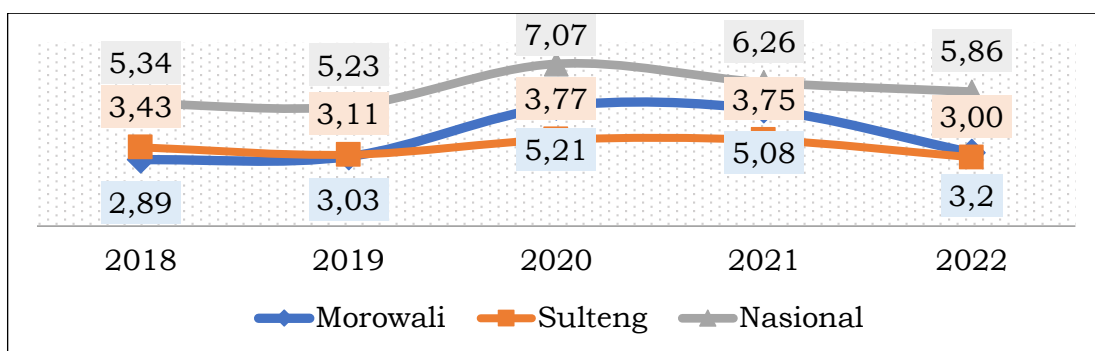
Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (*natural resources*) Kabupaten Morowali 'negeri tambang' di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui



penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru meningkat dalam kurun 5 (lima) Tahun terakhir dan juga hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2018 persentase TPT Kabupaten Morowali sebesar 2,89 persen meningkat setiap Tahun hingga Tahun 2021 menjadi 3,75 persen. Ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,20 persen. Namun, kondisi Tahun 2022 masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,00 persen. Sedangkan untuk kondisi Nasional TPT Kabupaten Morowali masih lebih baik yakni sebesar 5,86 persen.

Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkat-nya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2022, pasca pandemi kondisi ekonomi morowali semakin membaik, hal ini berdampak pada persentase TPT Kabupaten Morowali menurun menjadi 3,20 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,00 persen dan Nasional meningkat sebesar 5,86 persen yang disajikan pada Gambar 3.6 sebagai berikut ini.



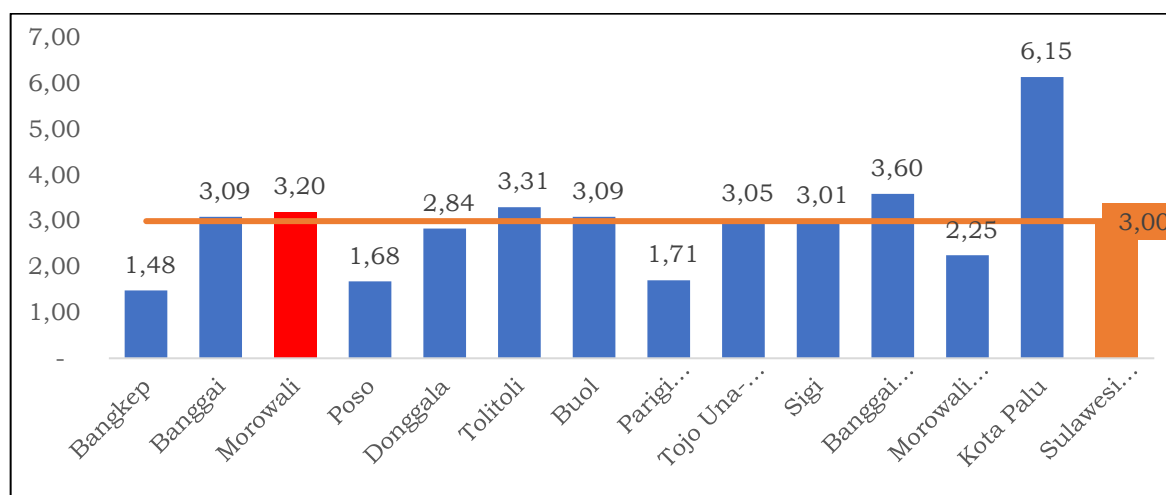
Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya, kondisi TPT Kabupaten Morowali dibandingkan de-ngan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menangani masalah pengangguran. Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali menurun cukup signifikan di Tahun 2022 menjadi sebesar 3,20. TPT tertinggi yakni Kota Palu



mencapai 6,15 persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3,60 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso sebesar 1,68 persen, Kabupaten Banggai 1,48 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,71 persen. Data capaian TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 3.7 sebagai berikut ini.



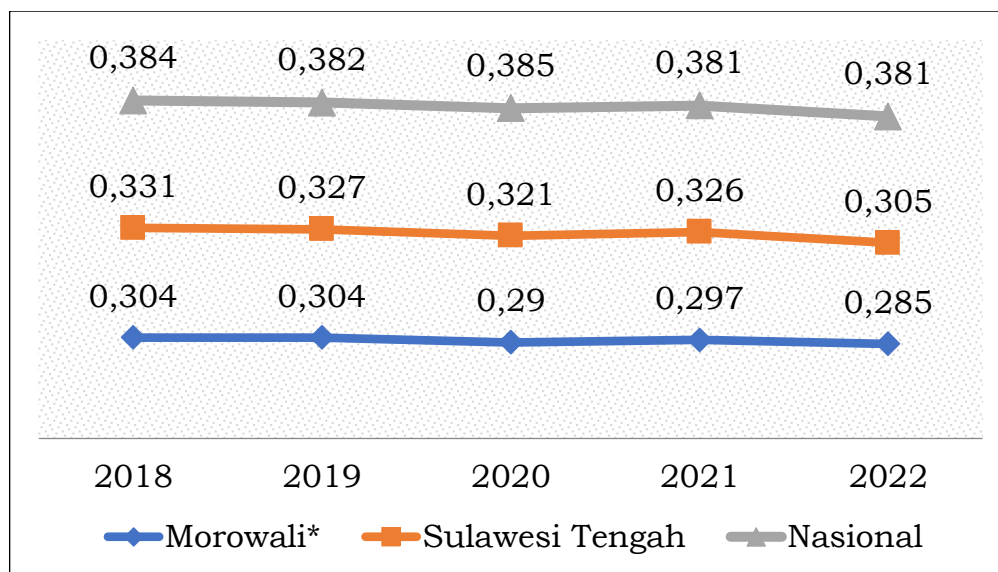
Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

5. Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hamper tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 3.8 sebagai berikut.

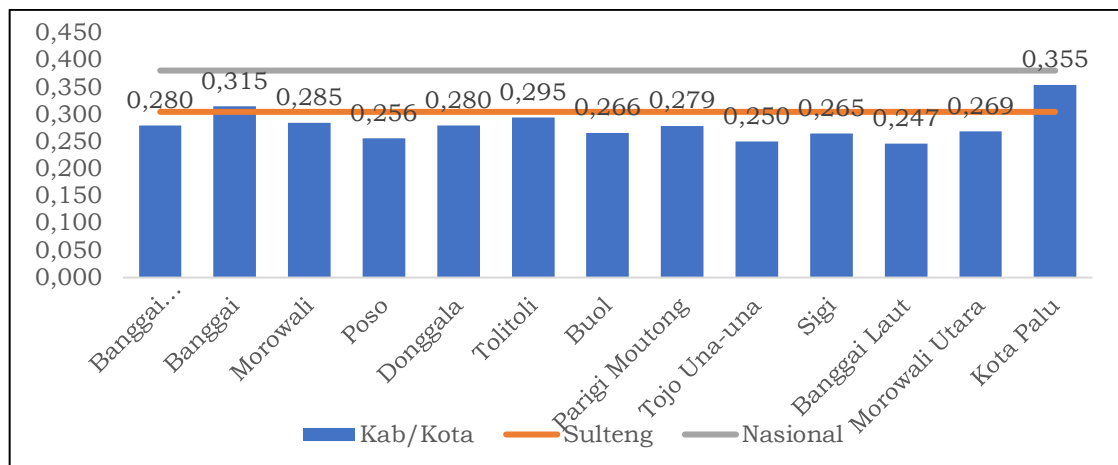


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.8
Indeks Gini Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 3.8 di atas disajikan besarnya indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional Tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

Selanjutnya jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indkes Gini tertinggi dalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 3.9 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.9
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah orang miskin terhadap jumlah penduduk suatu wilayah (negara atau daerah) pada Tahun ter-tentu. Seseorang dikatakan miskin bila pendapatan berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatan dan pendapa-tan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipe-ngaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan ting-kat harga barang konsumsi lain. Gambaran kondisi kemiskinan Kabu-paten Morowali dijelaskan pada beberapa aspek yaitu: garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang dapat dijelaskan pada beberapa bagian berikut ini.

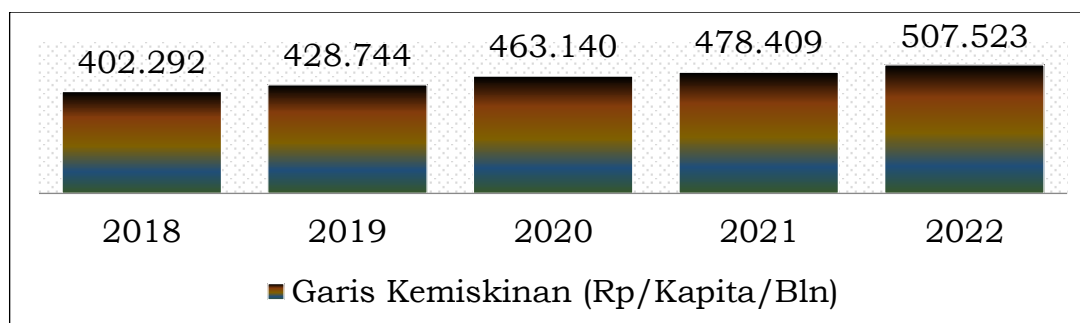
a. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.



Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali periode 2018-2022 mengalamikan peningkatan setiap Tahunnya. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dalam rentang waktu tersebut sebesar 6,22 persen. Pada Tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Morowali sebesar Rp402.292, meningkat tahun 2019 menjadi sebesar Rp428.744, selanjutnya pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Morowali meningkat menjadi Rp463.140. Setiap tahunnya Indeks Gini mengalami peningkatan dimana hingga tahun 2022 sudah mencapai angka Rp507.523. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2022 masih di bawah atau lebih baik dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp557.183. Selain itu, juga di bawah rata-rata Nasional sebesar Rp535.547. Data mengenai garis kemiskinan Kabupaten Morowali kurun Tahun 2018-2022 secara lengkap terdapat pada Gambar 3.10 berikut ini.

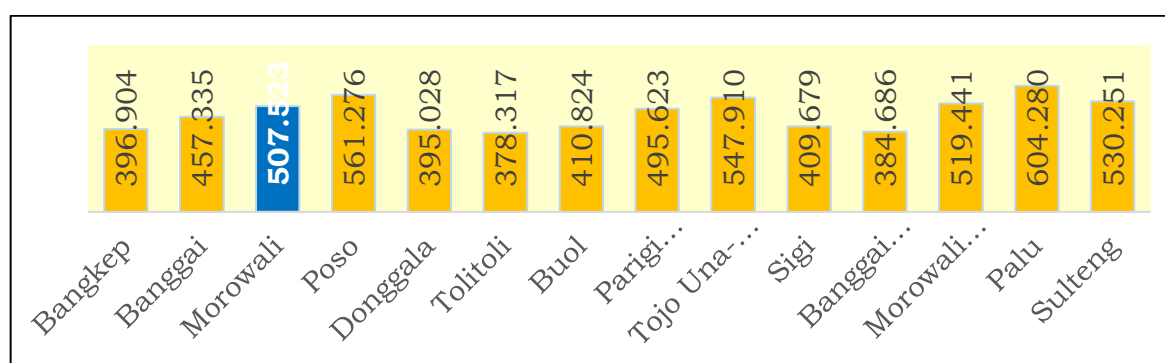


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.10
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali (Rp)
Tahun 2018-2023



Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Morowali kemudian dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tengah. Dimana rata-rata garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp557.183, beberapa Kabupaten berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu dan Kabupaten Poso. Sedangkan daerah dengan garis kemiskinan yang terendah adalah Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Donggala. Sementara itu, Kabupaten Morowali berada pada urutan kelima garis kemiskinan tertinggi, seperti yang disajikan pada Gambar 3.11 berikut ini.



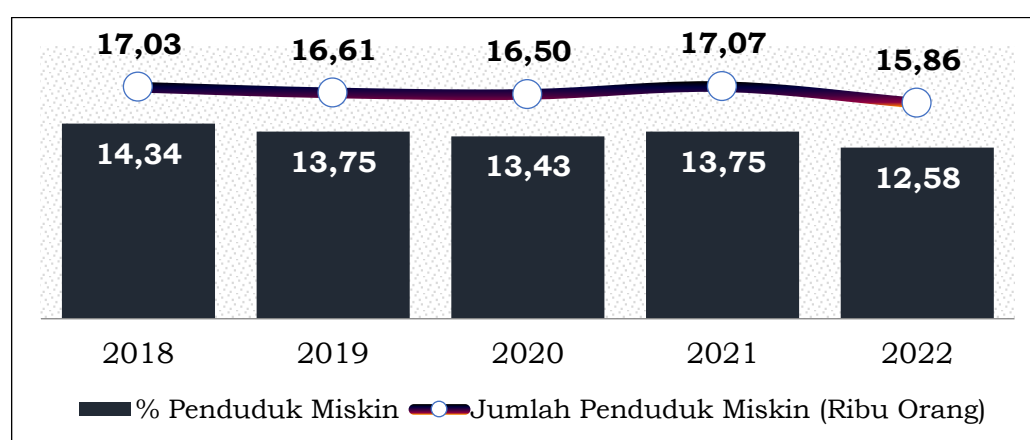
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.11
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022

b. Penduduk Miskin

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Gambar 3.12
Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Merujuk pada Gambar 2.9 di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,34 persen, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2018 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Peningkatan terjadi akibat pandemic covid-19 yang terjadi. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa.



Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Status kesejahteraan menurut keluarga menurut desil menunjukkan bahwa total keluarga yang di Kabupaten Morowali sebanyak 13.663 RT, dimana keluarga terbesar pada desil 3. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Jumlah Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

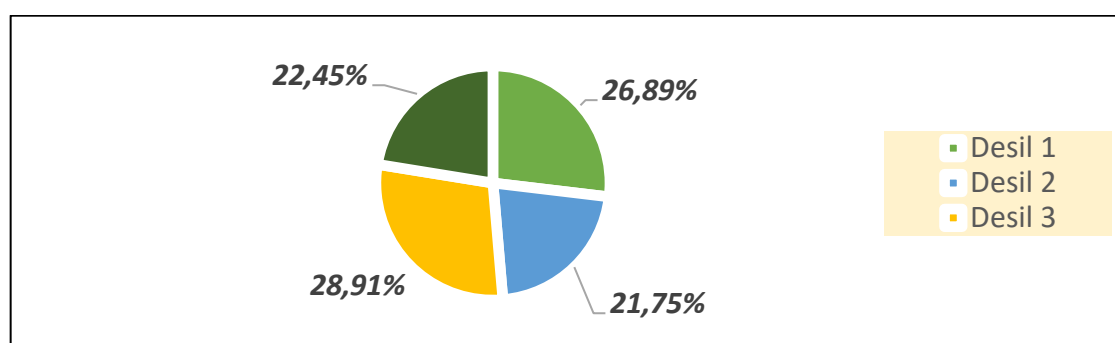
No.	Kecamatan	Keluarga				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1.	Bungku Tengah	1.072	131	179	387	375
2.	Bungku Selatan	2.502	1.117	551	549	285
3.	Menui Kepulauan	2.408	917	562	563	366
4.	Bungku Barat	1.397	374	293	415	315
5.	Bumi Raya	1.428	223	326	493	386
6.	Bahodopi	1.110	138	220	395	357
7.	Wita Ponda	2.136	448	484	645	559
8.	Bungku Pesisir	561	88	133	180	160
9.	Bungku Timur	1.049	238	224	323	264
	Total	13.663	3.674	2.972	3.950	3.067

Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa kecamatan Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Wita Ponda adalah Kecamatan dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraannya tertinggi hingga mencapai angka dua ribu namun kecamatan paling tertinggi dengan angka sebesar 2.500 adalah Bungku Selatan. Sedangkan Bumi raya, Bungku barat, Bungku Tengah, Bungku Timur dan Bahodopi adalah kecamatan dengan jumlah keluarga berdasarkan status kesejahteraan

mencapai angka seribu. Namun yang terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah keluarga menurut status kesejahteraan sebanyak 561. Sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya dilihat dari desil 1, keluarga yang masuk kategori desil 1 terbesar terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, untuk Desil 2 terbanyak berada di Kecamatan Bungku Selatan, untuk Desil 3 terbesar berada di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Menui Kepulauan. Dan untuk desil 4 terbanyak di Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bumi Raya. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan pada keluarga khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2.

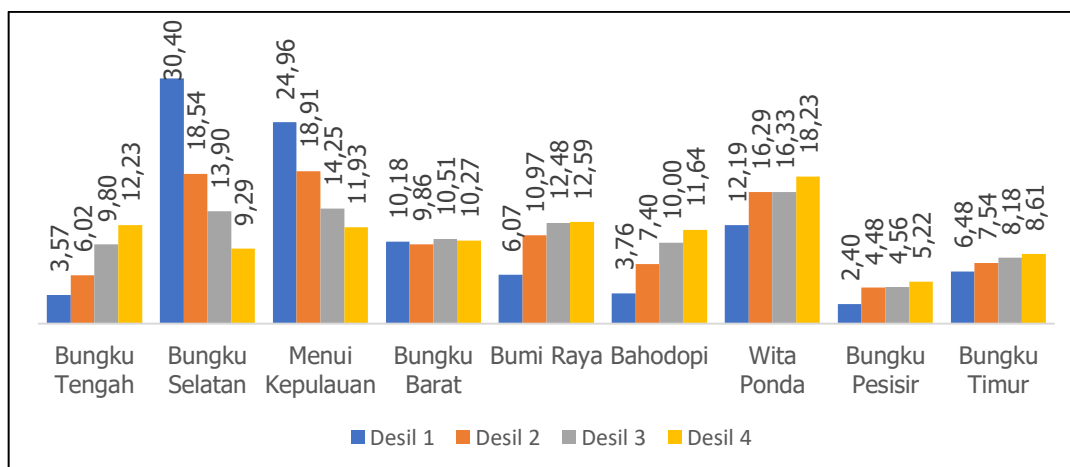


Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, 2022

Gambar 3.13
Persentase Kesejahteraan Keluarga Menurut Desil
di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Merujuk pada Gambar 3.13 di atas, persentase kesejahteraan keluarga menurut desil Kabupaten Morowali, tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 28,91 persen, kemudian tertinggi kedua desil 1 dengan jumlah persentase sebesar 26,89 persen, berikut desil 4 dengan jumlah persentase sebesar 22,45 persen dan terakhir desil 2 dengan jumlah persentase sebesar 21,75 persen.

Selanjutnya pada grafik berikut ini juga disajikan data persentase sebaran kesejahteraan keluarga menurut kecamatan.



Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>, diolah 2022

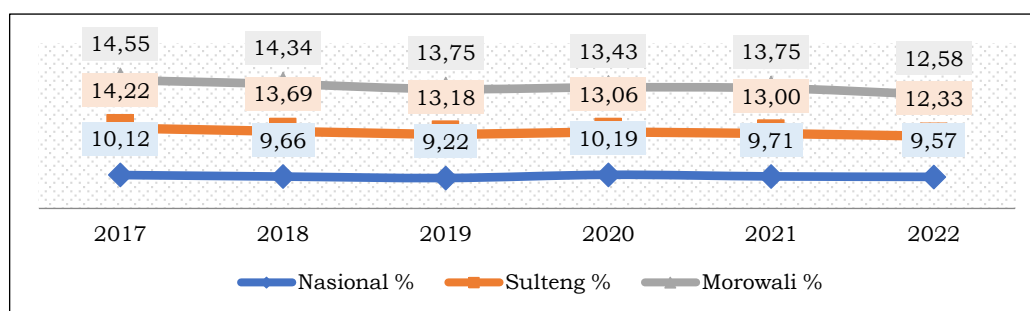
Gambar 3.14

Persentase Keluarga Menurut Status Kesejahteraan Pada Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2022

Berdasarkan gambar diagram di atas diketahui persentase keluarga menurut status kesejahteraan pada desil 1 adalah kecamatan Bungku Selatan sebagai kecamatan tertinggi persentase keluarganya dengan nilai persentase sebesar 30,40 persen. Sedangkan yang paling terendah adalah Bungku Pesisir dengan jumlah persentase keluarga sebesar 2,40 persen pada desil 1. Kemudian, pada desil 2 dengan jumlah persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Menui Kepulauan dengan jumlah persentase sebesar 18,54 persen dan yang terendah pada desil 2 yaitu kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,48 persen. Berikut kecamatan Witaponda sebagai kecamatan yang memiliki jumlah persentase keluarga tertinggi pada desil 3 dengan jumlah persentase sebesar 16,33 persen dan yang paling terendah adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 4,56 persen. Dan pada desil 4, kecamatan yang memiliki persentase keluarga tertinggi adalah kecamatan Witaponda dengan jumlah persentase sebesar 18,23 persen sedangkan yang paling terendah persentase keluarganya adalah kecamatan Bungku Pesisir dengan jumlah persentase sebesar 5,22 persen. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Bungku Pesisir adalah kecamatan yang paling terendah tingkat persentase keluarganya menurut status kesejahteraan pada masing-masing desil sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Morowali.



Namun, penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali hingga Tahun 2022 tersebut, masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen dan nasional sebesar 9,57 persen. Pasca Pandemi Covid-19 penduduk miskin di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional menunjukkan kinerja yang positif. Data terdapat pada Gambar 3.15 sebagai berikut ini.

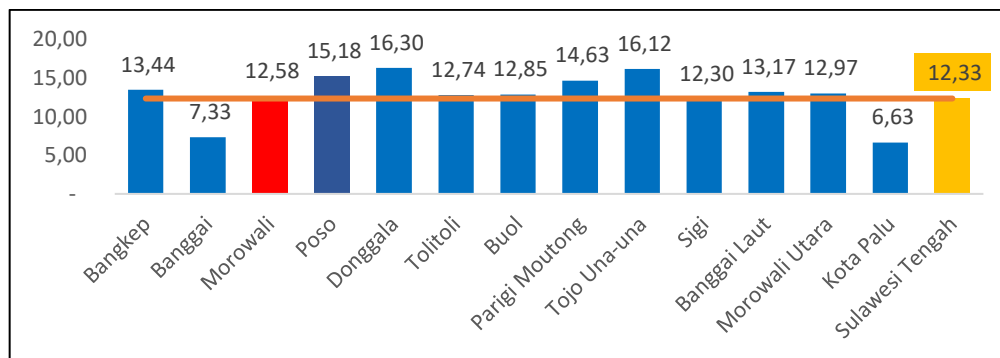


Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.15

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya perkembangan penduduk miskin antar Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Morowali masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka posisi Kabupaten Morowali berada pada urutan kesepuluh. Sedangkan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah. Beberapa daerah dengan persentase penduduk miskin lebih baik dari rata-rata Provinsi hanya Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sigi, selain itu persentase penduduk miskin masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Data mengenai persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 3.16 sebagai berikut ini.



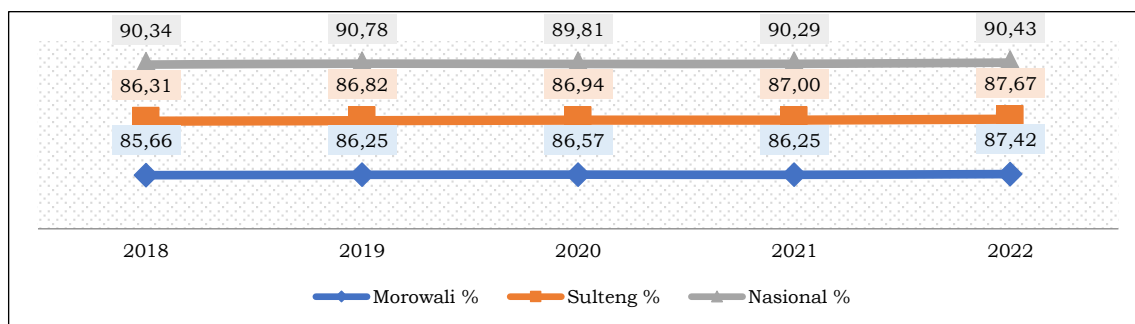
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.16

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

c. Persentase Penduduk Di Atas Kemiskinan

Persentase penduduk di atas di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan seiring dengan menurun jumlah penduduk miskin selama periode Tahun 2018-2022. Hingga pada Tahun 2022, persentase penduduk di atas garis kemiskinan yakni sebesar Rp507.523 dimana terdapat jumlah persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 86,57 persen, namun angka ini masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang disajikan pada Gambar 3.17 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.17

Persentase Penduduk Diatas Kemiskinan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2018-2022

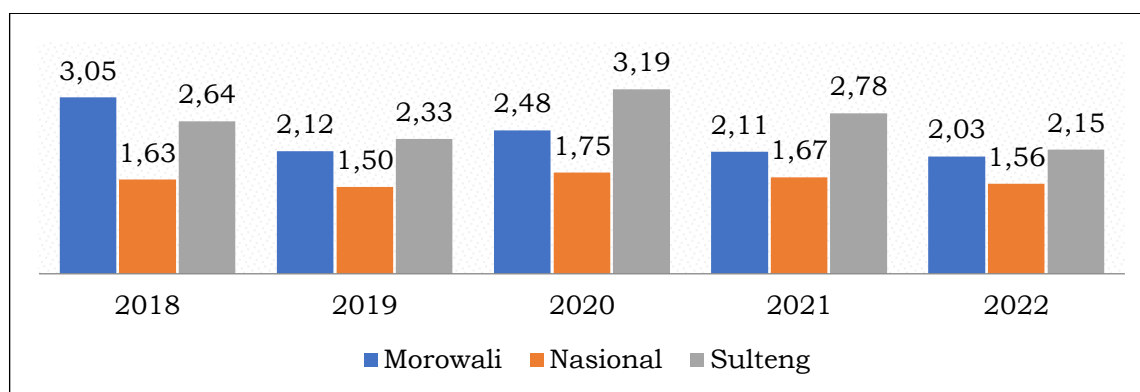
d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk



miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

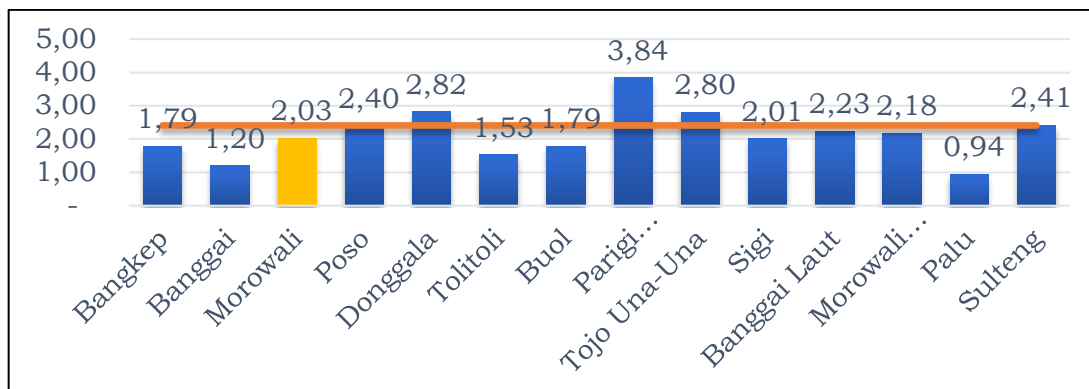
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali cenderung meningkat dan berfluktuatif. Tahun 2018, dimana P1 Kabupaten Morowali sebesar 3,05 menurun di Tahun 2019 menjadi sebesar 2,12, namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 2,48%. Pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 2,11 persen dan di tahun 2022 sebesar 2,03 persen. P1 Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih jauh lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Data P1 Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 terdapat pada Gambar 3.18 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana P1 Kabupaten Morowali Tahun 2022 lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi P1 Kabupaten Morowali berada pada urutan ketujuh. Sedangkan, P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, sedangkan P1 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala. Data P1 terdapat dilihat pada Gambar 3.19 sebagai berikut ini.



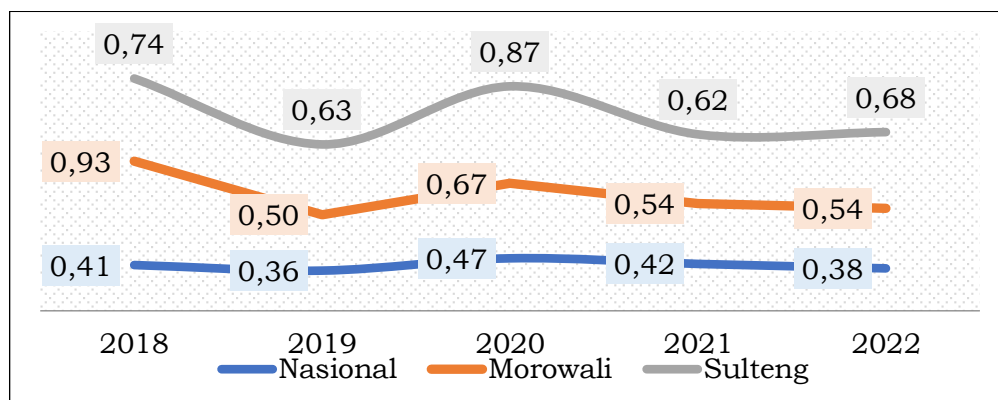
Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.19

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) me-mberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpa-ngan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data P2 ditampilkan pada Gambar 3.20 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

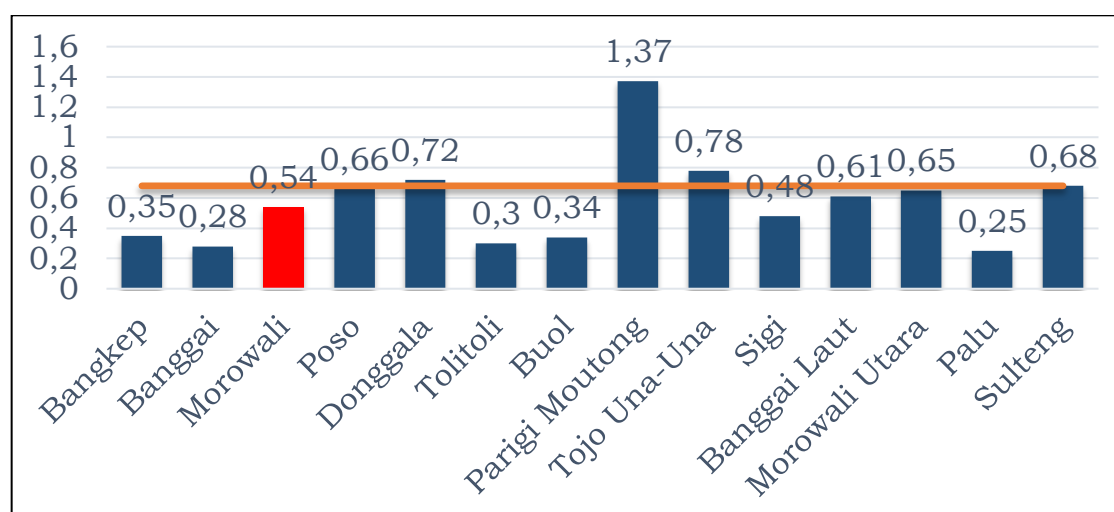
Gambar 3.20

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 3.20 di atas, diketahui bahwa perkembangan P2 Kabupaten Morowali berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2018 sebesar 0,93 menurun ditahun menjadi sebesar 0,50, ditahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,67% dan pada tahun 2021-2022 sebesar 0,54 persen. Kondisi P2 Kabupaten Morowali, tergolong tinggi. Hal ini perlu mendapat

perhatian pemerintah daerah setempat. Upaya melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dikucurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan target. Kondisi P2 Tahun 2022 tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,68 dan berada di atas rata-rata Nasional sebesar 0,38.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Selanjutnya, data P2 Kabupaten Morowali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Gambar 3.21 sebagai berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 3.21 di atas rata-rata P2 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,68. Beberapa daerah masih memiliki P2 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala. Kabupaten Morowali berada pada urutan ke-tujuh P2 di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan P2 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli.



7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

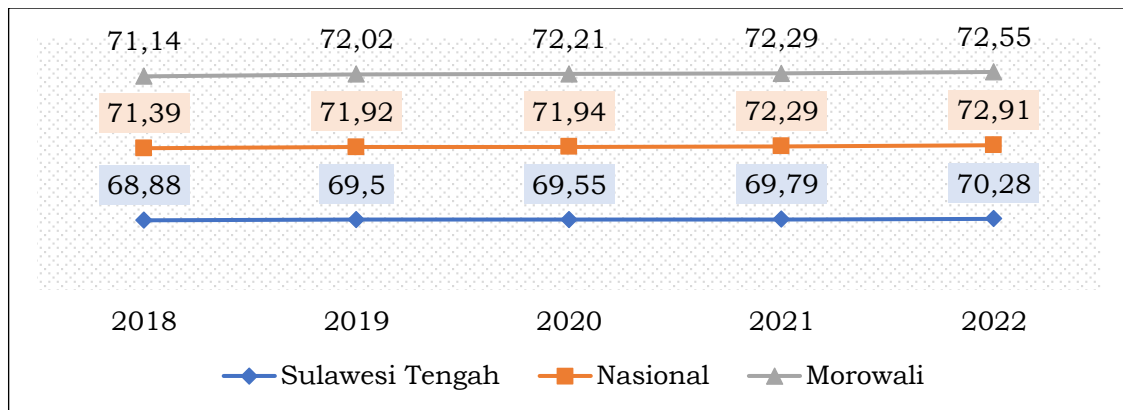
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga in-deks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018- 2022. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun



2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28 yang ditampilkan pada Gambar 3.22 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.22
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2018-2022

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 menunjukkan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 82,02 masuk kategori **sangat tinggi**. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada Tabel 2.29 sebagai berikut ini.

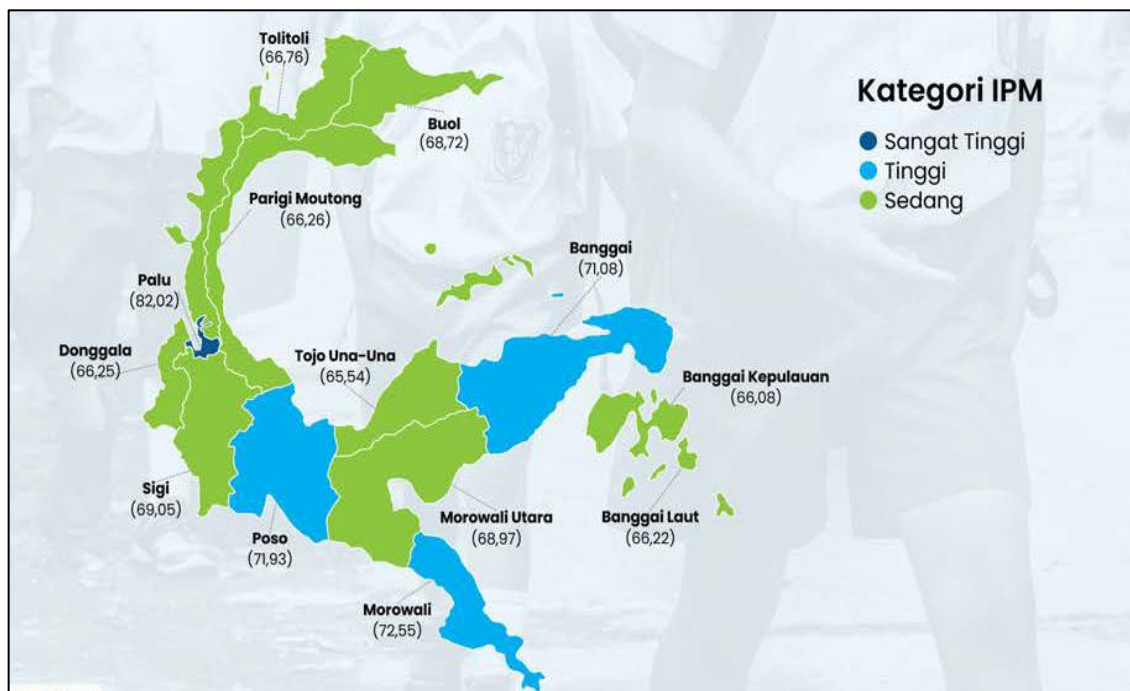
Tabel 3.4
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
Dan Nasional Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Banggai Kepulauan	64,68	65,13	65,42	65,61	66,08
Banggai	69,85	70,36	70,52	70,6	71,08
Morowali	71,14	72,02	72,21	72,29	72,55
Poso	70,68	71,40	71,28	71,45	71,93
Donggala	65,14	65,49	65,56	65,72	66,25
Toli-Toli	64,6	65,42	65,69	66,3	66,76
Buol	67,3	67,69	67,82	68,25	68,72

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Parigi Moutong	64,85	65,47	65,44	65,82	66,26
Tojo Una-Una	63,38	64,52	64,59	64,74	65,54
Sigi	67,66	68,16	68,12	68,49	69,05
Banggai Laut	64,8	65,27	65,43	65,65	66,22
Morowali Utara	67,95	68,45	68,36	68,48	68,97
Kota Palu	80,91	81,50	81,47	81,7	82,02
Sulawesi Tengah	68,88	69,5	69,55	69,79	70,28
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Pada Gambar 3.23 di bawah ini ditampilkan peta IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, hingga Tahun 2022, hanya Kota Palu dengan status IPM **Sangat Tinggi**, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai pada kategori tinggi, sedangkan sisanya dalam kategori IPM sedang.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.23
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



3.1.2. Proyeksi Perekonomian Kabupaten Morowali di Tahun 2024

Berdasarkan gambaran pencapaian perekonomian daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2022, Pada tahun 2024 indikator makro daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini Kabupaten Morowali, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia) diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	28,21	27,50 - 28,50
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	400.1	400,10-420,00
3.	Inflasi	Persen	3.00	3,00-2,00
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,2	3,00 - 2,50
5.	Indeks Gini	Indeks	0,285	0,240 - 0,265
6.	Kemiskinan	Persen	12,58	9,64 - 10,47
7.	indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55	74,39 - 75,15

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); pendapatan transfer (meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); lain-lain pendapatan daerah yang sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).



Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2022, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kabupaten Morowali.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali pada tahun 2024 masing-masing mencapai Rp 1.541.856.288.037,00 untuk pendapatan daerah dan Rp 1.480.229.453.080,00 untuk belanja daerah. Pendapatan turun sebesar 8,5 persen dari pendapatan tahun sebelumnya dan belanja turun sekitar 23,82 persen dari belanja tahun sebelumnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada beberapa regulasi, yaitu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024; (2) proyeksi pendapatan berdasarkan



RPJPD; (3) proyeksi pendapatan berdasarkan RPJMD; serta (4) proyeksi pendapatan berdasarkan hasil kajian. Pada penyusunan RKPD Tahun 2024 dasar proyeksi pendapatan yang digunakan adalah Perda RPD tahun pertama, selain itu juga memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Morowali. Pada tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan pada nilai Rp 1.685.913.264.918,00, dengan komposisi sumber pendapatan Rp 400.420.232.119,00 dari pendapatan asli daerah; Rp 1.285.493.032.799,00 dari pendapatan transfer, dan Rp 0,00 dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2024, diperkirakan mencapai angka Rp 1.541.856.288.037,00 turun sebesar 8,5% dari pendapatan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan adanya koreksi terhadap proyeksi pendapatan tahun 2021 sebagai akibat adanya kejadian luar biasa Covid-19, sehingga pada tahun 2024 ini dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan potensi dan belum memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer (DAK dan Banprov). Proyeksi pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 401.424.000.000 yang berasal dari pendapatan pajak daerah Rp 180.390.000.000,00, Hasil Retribusi Daerah Rp 167.774.000.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2.400.000.000,00, lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah Rp 50,860,000,000.00. Pendapatan transfer sebesar Rp 1.133.127.876.890,00 yang berasal dari transfer pemerintah pusat Rp 1.084.957.346.000,00 dan transfer antar daerah Rp 48.170.530.890,00. Keterangan lebih lanjut mengenai rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,685,913,264,918.00	-8.5%	1,541,856,288,037.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	400,420,232,119.00	2.1%	401.424.000.000
4.1.1	Pajak Daerah	132,800,000,000.00	35.84%	180,390,000,000.00
4.1.2	Retribusi Daerah	170,239,000,000.00	-1.45%	167,774,000,000.00



No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,810,921,029.00	38.05%	2,400,000,000.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	95,570,311,090.00	-39.24%	50,860,000,000.00
4.2	Pendapatan Transfer	1,285,493,032,799.00	-11.85%	1.133.127.876.890
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,246,874,554,000.00	-12.99%	1,084,957,346,000.00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1,134,265,098,000.00	-13.38%	982,527,741,000.00
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	507,572,843,000.00	0.00%	507,572,803,000.00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum	474,954,938,000.00	0.00%	474,954,938,000.00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus	151,737,317,000.00		
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	10,179,851,000.00		
4.2.1.6	Dana Desa	102,429,605,000.00	0.00%	102,429,605,000.00
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	38,618,478,799.00	24.73%	48,170,530,890.00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	38,618,478,799.00	24.73%	48,170,530,890.00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0		0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00		7.304.411.147
4.3.1	Hibah	0.00		0.00
4.3.2	Dana Darurat	0		0
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0		0



Mencermati proyeksi ekonomi makro Kabupaten Morowali, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 diarahkan pada upaya perhitungan pendapatan sesuai dengan potensi riil masing-masing objek pendapatan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2024, maka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Morowali diarahkan pada :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menerapkan sistem online penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
- b. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
- c. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- f. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi (BPHTB terkait Retribusi, serta PPN oleh KPP Pratama);
- g. Memantapkan kelembagaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebagai alternatif pendanaan terutama untuk pendanaan Infrastruktur;
- h. Mengembangkan networking dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah :
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Morowali;
 - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;



- d. Optimalisasi kinerja BUMD;
 - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - g. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - h. Optimalisasi pemanfaatan aset yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan transfer
- a. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana perimbangan.
 - c. Mensinergikan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - d. Mensinergikan pembangunan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov).
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, antara lain melalui:
- a. peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR).
 - b. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.

Perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2024, diperkirakan mencapai angka Rp 1.549.793.669.457,00 dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp 1.050.085.605.386,00, belanja modal sebesar Rp 212.321.424.022.00, belanja tak terduga sebesar Rp 35.000.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp 252.928.065.155,00. Rincian realisasi dan proyeksi/target belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1,942,965,827,088.00	-23.82%	1,549,793,669,487.00
5.1	Belanja Operasi	1,199,665,770,089.00	0.95%	1,050,085,605,386.00
5.1.1	Belanja Pegawai	467,925,174,335.00	21.68%	416,698,111,847.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	606,043,422,214.00	-11.73%	534,015,305,794.00
5.1.3	Belanja Bunga	1,664,000,000.00	0.00%	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0		0
5.1.5	Belanja	118,981,173,540.00	-15.95%	88,573,187,745.00



No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
	Hibah			
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,052,000,000.00	0.00%	10,799,000,000.00
5.2	Belanja Modal	487,313,773,899.00	-100.00%	212.321.424.022.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000.00	40.00%	35,000,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000.00	40.00%	35,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	230,986,283,100.00	1.39%	252,928,065,155.00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30,303,900,000.00	10.60%	33,516,400,000.00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0		0
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	200,682,383,100.00	0.00%	218.870.240.079.00

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Morowali diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Morowali. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Morowali adalah berikut ini:

- Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2024;
- Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal



tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/ kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan upaya sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan (mandatory spending) dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
2. Sinkronisasi dan integrasi belanja lintas sektor (contoh: penanggulangan kemiskinan dan stunting);
3. Akomodasi usulan musrenbang dan reses;
4. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal untuk menjamin APBD diarahkan guna menambah nilai aset milik Pemerintah daerah;
5. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masingmasing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait efisiensi belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja pengadaan pakaian dinas, serta belanja modal barang alat kerja berupa pengadaan meubeuler, komputer/laptop;
9. Selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan kendaraan dinas menggunakan spesifikasi yang disesuaikan dengan standar eselonering melalui persetujuan Ketua TAPD;



10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
11. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan;
12. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien;
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan belanja tambahan penghasilan PNS sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.
14. Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
15. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
16. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2024, perhitungan proyeksi pembiayaan daerah sebesar Rp 14.062.618.550,00, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 11.000.0000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 3.062.618.550,00 untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp 1.562.618.550,00, dan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,00. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah.

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	260,115,180,720.00	0.00%	11,000,000,000.00
6.1.1	SiLPA	260,115,180,720.00	0.00%	11,000,000,000.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0		0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0		0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0		0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0		0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0		0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,062,618,550.00	0.00%	3,062,618,550.00



No.	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI TAHUN 2024
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1,562,618,550.00	0.00%	1,562,618,550.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	0.00%	1,500,000,000.00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0		0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0		0
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0		0
	PEMBIAYAAN NETTO	257,052,562,170.00	0.00%	7,937,381,450.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00		0.00

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo untuk perusahaan daerah, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Morowali pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Morowali juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan program pembangunan tahun 2024 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKPD tahun 2024 ini merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian tujuan dan sasaran yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Morowali 2005 – 2025. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai



kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 - b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
 - c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
 - d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
 - e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
 - f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
 - g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
 - h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
 - i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi Pembangunan adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi pembangunan daerah, yaitu :
 - a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
 - c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
 - d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;



- e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
 - f. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;
 - h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
 - i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 telah menetapkan Visi pembangunan adalah **“Morowali Sejahtera Bertumpu pada Agribisnis”** untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (Lima) Misi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;
 - c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum;
 - d. Melaksanakan Penataan Wilayah;
 - e. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (*Security*) wilayah

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.	1. Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin.
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat; 3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja; 4. Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah; 5. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan; 6. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan.
3.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4.	Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.	1. Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik; 2. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang; 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5.	Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah.	1. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis; 2. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa.



4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkualitas. Berangkat dari permasalahan pembangunan, isu strategis pembangunan serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Morowali maka dalam menentukan sasaran dan prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Untuk mendukung keselarasan pencapaian tujuan pembangunan baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten maka telah ditetapkan 5 (lima) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024 termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2022	Taregt Tahun 2024		
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	28,21	5,3 - 5,7	13,70 - 15,30	27,50 - 28,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,20	5,0 – 5,7	2,61 - 2,84	3,00 - 2,50
Tingkat Kemiskinan	Persen	12,58	6,5 – 7,5	10,30 – 12,26	9,64 - 10,47



Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2022	Taregt Tahun 2024		
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55	73,99 – 74,02	71,27 – 71,39	74,39 - 75,15
Gini Ratio	Indeks	0,285	0,374 – 0,377	0,302 – 0,303	0,240 - 0,265

Sumber Data BPS Diolah

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Persen	9,64 - 10,47
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	2 - 1,90
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,54 - 0,52
			Gini Ratio	Persen	0,240 - 0,265
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Persen	6-7
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	27,50 - 28,50
			Pendapatan Perkapita	Juta Rp	370 - 400
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Inflasi	Persen	3,00 - 2,00



TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,00 - 2,50
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	3,00 - 6,00
			Nilai Investasi	Rp	65 – 70 Triliun
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	74,39 - 75,15
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43
			Stunting (SSGI)	Persen	20-17
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00
	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		Predikat	B
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	75,00 - 80,00
				Nilai Sakip	Nilai B
				Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	73,7-77,4 (Waspada)
				Indeks Inovasi Daerah	32,50 - 37,50
			Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75



TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	68,96
			Indeks Profesionalitas ASN	Persen	71-73
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	50-60 (Tidak Baik)
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	50,00 - 55,00
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00
Menciptakan Tataan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks Rasa Aman			Indeks	70,00 - 75,00
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap	Indeks	Level 2



TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024
wilayah		dan kemajuan pembangunan Desa	Bencana		
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528-0,6178

4.2.2. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Prioritas dan Sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasam industry dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, melanjutkan pembangunan infrastuktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan Presiden di atas kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :



Tabel 4.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020 – 2024

No	Prioritas	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengembangan Kawasan Strategis
		2) Pengembangan Sektor Unggulan
		3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
		4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		3) Terpenuhinya layanan dasar
		4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
		5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
		6) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
		2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan



No	Prioritas	Sasaran
		3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
		5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		2) Meningkatnya konektivitas wilayah
		3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
		5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		3) Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik	1) Menguatnya Stabilitas Polhukhamkam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik



Sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan untuk mendukung sasaran dan prioritas yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan prioritas yaitu :

1. Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah;
2. Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;
3. Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
5. Percepatan Reformasi Birokrasi.

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tahun 2024 juga merupakan tahun awal dari pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali tahun 2024–2026 sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dan hasil evaluasi kinerja pembangunan di tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstreme;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
4. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
5. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.



Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.5.
Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2024 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024 :		
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024 :		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme
		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		



NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan daya Dukung Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :



Tabel 4.6
Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan Daerah
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan Daerah
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan Daerah
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan Daerah
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA OPD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Semua Kecamatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan Daerah
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan Daerah
Meningkatkan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan Daerah



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamongpraja
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaran Pesta Demokrasi 2024	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
		Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Semua Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semua Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Semua Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Semua Kecamatan
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamongpraja



5.2.3. Telahaan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka perumusan program prioritas daerah tahun 2024 didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana kesehatan, pendidikan dll) belum optimal. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 pada peningkatan prasarana publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan IPM terutama pada bidang pendidikan harus lebih fokus dan terarah. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan pendidikan kesetaraan.
- c. Bidang kesehatan utamanya penanganan kesehatan ibu dan bayi serta penanganan gizi buruk dan stunting di masyarakat.
- d. Penanganan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi antar program agar hasilnya lebih maksimal.
- e. Potensi unggulan yang belum dikelola secara optimal. Produk-produk unggulan daerah kita dibiarkan dan tidak ada nilai tambah. Pengelolaan potensi ekonomi ini lebih difokuskan pada pengelolaan produk unggulan, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih fokus dan bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi.

5.2.4. Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendorong daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kabupaten Morowali akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan. Kabupaten Morowali dalam upaya untuk meningkatkan



kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7.
Inovasi Pembangunan Daerah

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
1.	Kesejahteraan Guru Kontrak (Kejar Kontrak)	Meningkatkan Kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Meningkatkan kualitas pendidikan berdaya saing dan generasi muda yang lmtaq	▪ Harapan lama sekolah ▪ Rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Bank Kampus (Bantuan Pendidikan Mahasiswa)				
3.	Rumah Sendiri (Rumah Sejahtera Mandiri) 50 Juta/Unit	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah
4.	Kesehatan Gratis (BPJS PBI)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB



No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
5	Padi Organik	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah



BAB V

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2023, perkiraan kedudukan tahun 2022 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
1	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	9,64 - 10,47
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,03 - 1,90
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,54 - 0,53
4	Indeks Gini kabupaten	Indeks	0,240 - 0,265
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6 - 7
6	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	27,50 - 28,50
7	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	400,10 - 420,00
8	Inflasi	Persen	3,00 - 2,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,00 - 2,50
10	Persentase Kenaikan PAD	Persen	1,00 - 2,00
11	Nilai Investasi	Triliun	65-70
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,39 - 75,15
13	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43
14	Stunting (Nilai SSGI)	Indeks	20 - 17
15	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00
16	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan	Persen	75,00 - 80,00
18	Nilai Sakip	Nilai	B
19	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,7 - 77,4



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
20	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,50 - 37,50
21	Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75
22	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP
23	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	71 - 73
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	50 - 60
25	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50
26	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata	Persen	50,00 - 55,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00
28	Indeks Rasa Aman	Indeks	70,00 - 75,00
29	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50
31	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	Indeks	174 - 173,50
32	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap	Indeks	Level 2
33	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528 - 0,6178

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu diantaranya Penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran dan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja masyarakat Kabupaten Morowali Pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2
Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	29,00
1.1.2	Pertumbuhan PDRB- ADH Konstan dengan Migas (%)	49,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	150.000,00
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	150.000,00
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	75.000,00
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	75.000,00
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	835,00
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	425,00
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	15,00
1.1.9	Indeks Gini	0,240 - 0,265
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	
	- Garis Kemiskinan (000)	525.000,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	13,00
	- Persentase Kemiskinan (%)	9,64 - 10,47
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,00
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,50
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39 - 75,15
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89,00
1.2.	Kesejahteraan Sosial	
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,36
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,37
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,25
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	20-17
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	43,00
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,00
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,00 - 2,50
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	97,00
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	
	- PDRB ADHB	270.000,00
	- PDRB ADHK	130.000,00
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,50
1.2.12	Opini BPK	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	2,00
	- PDRB ADHK	2,50
1.2.14	Kontribusi sector Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten	
	- PDRB ADHB	0,05
	- PDRB ADHK	0,12
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	
	- Padi	42.000,00
	- Jagung	2.000,00
	- Ubi Kayu	4.200,00
	- Ubi Jalar	800,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
	- Kacang Tanah	60,00
	- Kacang Kedelai	130,00
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,50
	- PDRB ADHK	0,70
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	
	- Kelapa	1.000,00
	- Kelapa Sawit	78.000,00
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,06
	- PDRB ADHK	0,09
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	18,00
	- PDRB ADHK	22,00
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,10
	- PDRB ADHK	0,09
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	1,20
	- PDRB ADHK	1,10
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	1,35
	- PDRB ADHK	1,50
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	72,00
	- PDRB ADHK	68,00
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	3,50
	- PDRB ADHK	2,50
1.2.25	Pertumbuhan Industri	0,03
1.2.26	Nilai ICOR	3,40
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
1.3.1	Seni Budaya	
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1
1.3.2	Olahraga	
	- Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	20
	- Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	394



2. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM	
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	
2.1.1	Pendidikan	
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	
	- Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	45,00
	- Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	14,00
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	100,00
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,00
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	75,00
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	71,00
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	99,00
	- Tingkat SMP/MTs	95,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	95,00
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	0,20
	- Tingkat SMP/MTs	0,10
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,40
2.1.1.7	Angka Kelulusan	
	- Tingkat SD/MI	100,00
	- Tingkat SMP/MTs	100,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan	
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
	- Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	80,00
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan	
	- Tingkat SD/MI	164,00
	- Tingkat SMP/MTs	52,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah	
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia	0,11
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia	0,08
	- Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk usia	0,05
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,50
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	13,00
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas	
	- Tingkat SD/MI	0,15
	- Tingkat SMP/MTs	0,05
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,10
2.1.2.	Kesehatan	
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,50
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,84
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran	0,50
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,25
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	10,00
2.1.2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Poskesdes dan	
	- Rasio Sarana Kesehatan	0,28
	- Rasio Puskesmas	0,08
	- Rasio Poliklinik	0,05
	- Rasio Pustu	0,17
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,18
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,50
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	6,00
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	100,00
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	100,00
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	450,00
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	2000,00
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	8,00
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,55



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100,00
2.1.2.19	Cakupan puskesmas Pembantu	20,00
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,00
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,20
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,04
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	25,00
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75,00
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,90
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	93,00
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,50
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.1.4.1	Rumah layak huni	82,00
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	830,00
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	10,00
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,00
2.1.6.	Sosial	
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	100,00
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7,00
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
2.2.1.	Tenaga Kerja	
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	30,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	16,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	12,00
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan	5,00
	Rasio KDRT	0,10
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	39,00
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,02
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,95
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,12
2.2.3.	Ketahanan Pangan	
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	150,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.100,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	85,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup	
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan	Tidak Ada
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.2.6.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	133.000,00
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	25.000,00
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	153,00
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	5,00
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,00
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	69,00
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,00
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00
2.2.9.	Perhubungan	
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	19.000,00
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	13,00
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	60,00
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,35
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	
	Angkutan Laut	
	- Jumlah Penumpang Turun	9.700,00
	- Jumlah Penumpang Naik	9.800,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	510.000,00
	- Angkutan Udara	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
	- Jumlah Penumpang Datang	32.000,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	22.000,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	250.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	100.000,00
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika	
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15%
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	40,00
2.2.12.	Penanaman Modal	
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	90,00
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150.000.000.000.000,00
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,50
2.2.14.	Statistik	
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada
2.2.15.	Persandian	
2.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15%
2.2.16.	Kebudayaan	
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6
2.2.17	Perpustakaan	
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2,600,00
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan	
2.3.1.	Pariwisata	
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	4.000,00
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00
2.3.2.	Pertanian	
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanai	
	- PDRB ADHB	2,00
	- PDRB ADHK	2,50
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,01
	- PDRB ADHK	0,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras)	
	- PDRB ADHB	0,80
	- PDRB ADHK	0,90
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal	
	- Padi	46,00
	- Jagung	23,00
	- Ubi Kayu	290,69
	- Ubi Jalar	203,95
	- Kacang Tanah	10,77



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
	- Kacang Kedelai	20,82
	- Kacang Hijau	0,66
2.3.3.	Kehutanan	
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,99
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00
2.3.5.	Perdagangan	
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	38.000,00
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan	
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)	
	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.350,00
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	3.000,00
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.500,00
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	58,00
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang	
2.4.1	Perencanaan Pembangunan	
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.4.2	Keuangan	
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,00
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,00
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	20,00
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan	
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 orang
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	75
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan	
2.4.4.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100
2.4.5	Pengawasan	
2.4.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100
2.4.6	Sekretariat Dewan	
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada

3. Aspek Daya saing Daerah;

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 6.4
Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
3	DAYA SAING DAERAH	
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	25,00
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1250,00
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	
	Angkutan Laut	
	- Jumlah Penumpang Turun	10.500,00
	- Jumlah Penumpang Naik	10.500,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	500.000,00
	Angkutan Udara	
	- Jumlah Penumpang Datang	60.000,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	17.000,00
	- Jumlah Barang Bongkar(Ton)	130.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	60.000,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	
	- Bank Umum	19,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024
	- Bank Perkreditan Rakyat	4,00
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan	
	- Jumlah Rumah Makan	75,00
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40,00
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	92,00
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,99
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	
3.3.1	Angka Kriminalitas	17,00
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6,00
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	
3.4.1	Tingkat Ketergantungan	
	- Rasio Ketergantungan	43,00



BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 terdiri dari dua (2) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dokumen perencanaan yang secara hierarkhis lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dokumen RKPD Kabupaten Morowali berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tata cara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Perubahan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.
2. Peraturan Bupati tentang RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu : **“Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme;
 - b. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;

- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
- f. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.

Pada akhirnya, untuk melaksanakan seluruh prioritas yang telah ditetapkan tersebut diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Morowali, Juni 2023

BUPATI MOROWALI



TASLIM